

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2017 - 2022



Disusun Oleh :
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
Jln. T. P. Nyak Makam No. 24 Lampineung Kota Banda Aceh
Telp. 0651 - 7552041 ; Fax. 0651 - 7555324
Email ; distanbun@acehprov.co.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua serta tidak lupa juga mengucapkan shalawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan ke alam yang lebih beriman dan berpendidikan sebagai mana saat ini sehingga ***Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017 - 2022*** telah dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan sebuah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2017 - 2022.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan. Indikator kinerja utama yang dibebankan mencakup peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan. Perencanaan program dan kegiatan yang direncanakan menentukan tindakan yang lebih tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan suatu perencanaan yang dikenal dengan perencanaan strategik untuk dituangkan dalam ***Rencana Strategis (Renstra)***.

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan yang begitu cepat, baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi. Dengan adanya pendekatan strategik yang jelas dan sinergi serta berkesinambungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh dengan memperhitungkan kekuatan dan peluang yang ada serta kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Rancangan Akhir Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh periode 2017-2022. Dalam penyusunan dokumen renstra tentunya masih terdapat kekurangan, namun upaya untuk melakukan penyempurnaan akan terus dilakukan demi terwujudnya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

Akhirnya mengingat Renstra yang disusun merupakan Rancangan Akhir setelah mengalami beberapa penyempurnaan dan merupakan komitmen kinerja bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, September 2018
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,

A. HANAN, SP. MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19680705 199103 1 006



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian, Fungsi Renstra Perangkat Daerah	
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	
1.1.3 Keterkaitan Renstra dan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan	29
2.2.1 Sumber daya manusia	
2.2.2 Asset/modal	
2.2.3 Unit usaha yang masih operasional	
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan	32
2.3.1 Pencapaian kinerja	
2.3.2 Faktor yang mempengaruhi kesenjangan dan pencapaian kinerja	
2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2.3.5 Rasio antara realisasi dan anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan.....	38
2.4.1 Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota	
2.4.2 Telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2.4.3 Jenis, perkiraan besaran kebutuhan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan	
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan	41
3.1.1 Permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya	
3.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih	53
3.2.1	Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan yang terkait dengan visi, misi serta program unggulan kepala daerah	
3.2.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah	
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota	57
3.3.1	Faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
3.4.1	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
3.4.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	103
3.5.1	Kondisi Lingkungan Strategis	
3.5.2	Analisis Lingkungan Strategis	
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	120
4.1.1	Visi (Merujuk pada RPJMD)	
4.1.2	Misi (Merujuk pada RPJMD)	
4.1.3	Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4.1.4	Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
4.1.5	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
4.2	Strategi dan Kebijakan	122
4.2.1	Strategi	
4.2.1	Kebijakan	
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Periode 2017-2022	130
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam lima tahun	132
5.2	Kelompok Sasaran dan Prioritas Program	152
5.3	Kebutuhan Anggaran	153
BAB VI.	PENUTUP.	155



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Unit Kerja
- Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
- Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon
- Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Formal
- Tabel 2.5. Jabatan Fungsional Tertentu
- Tabel 2.6. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Aceh Tahun 2012 – 2016
- Tabel 2.7. Luas Panen Palawija di Aceh Tahun 2012 s/d 2016
- Tabel 2.8. Produksi Tanaman Palawija di Aceh Tahun 2012 s/d 2016
- Tabel 2.9. Produktivitas Tananaman Palawija di Aceh Tahun 2012 s/d 2016
- Tabel 2.10. Produktivitas Tananaman Sayuran di Aceh Tahun 2012 s/d 2016
- Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan Nasional di Aceh Tahun 2013 s/d 2017
- Tabel 2.12. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKA Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
- Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
- Tabel 3.2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPA Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah
- Tabel 3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPATerhadap Sasaran Renstra SKPD dan Renstra K/L
- Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
- Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
- Tabel 3.6. Hasil Telaahan Struktur Ruang WilayahProvinsi Aceh 2009-2029
- Tabel 3.7. Hasil Telaahan Pola Ruang WilayahPemerintah Aceh
- Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
- Tabel 3.9. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
- Tabel 3.10. Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Analisis KHLS Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

- Tabel 3.11. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
- Tabel 3.12. Perhitungan Analisis Lingkungan Strategis
- Tabel 3.13. Penentuan Alternatif Strategi Berdasarkan Analisa SWOT
- Table 5.1. Indikator Keluaran Program Prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2017 – 2022
- Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Provinsi
- Tabel 5.3. Kebutuhan Anggaran Berdasarkan Program Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh Tahun 2017 s/d 2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Aceh tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Pertanian dan Perkebunan skala Nasional dan Rencana Pembangunan Aceh. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan simulasi rencana strategis yang mengacu pada RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah. Perencanaan sebagai penentu arah, bentuk pembiayaan dan prioritas pembangunan. Suksesnya Pembangunan secara baik dan tepat sasaran sesuai arah dan tujuan serta potensi yang dimiliki.

Tujuan pembangunan ditetapkan dengan orientasi tertentu dan selanjutnya tahapan dirumuskan sesuai dengan tujuan. Pertanian dan perkebunan pada masa yang akan datang membutuhkan perencanaan simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil wilayah/daerah, anggaran, kemampuan sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi. Penganggaran dan Perencanaan berbasis kinerja diarahkan pada perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan SKPA untuk melaksanakan tugas serta pekerjaannya didalam pembangunan pertanian dan perkebunan secara lebih profesional, efektif dan efisien. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diwajibkan menyusun sistem perencanaan mulai dari tujuan dan sasaran yang tertuang didalam Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Aceh.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun sebagai suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai turunan Visi, Misi Pemerintah Aceh, serta sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

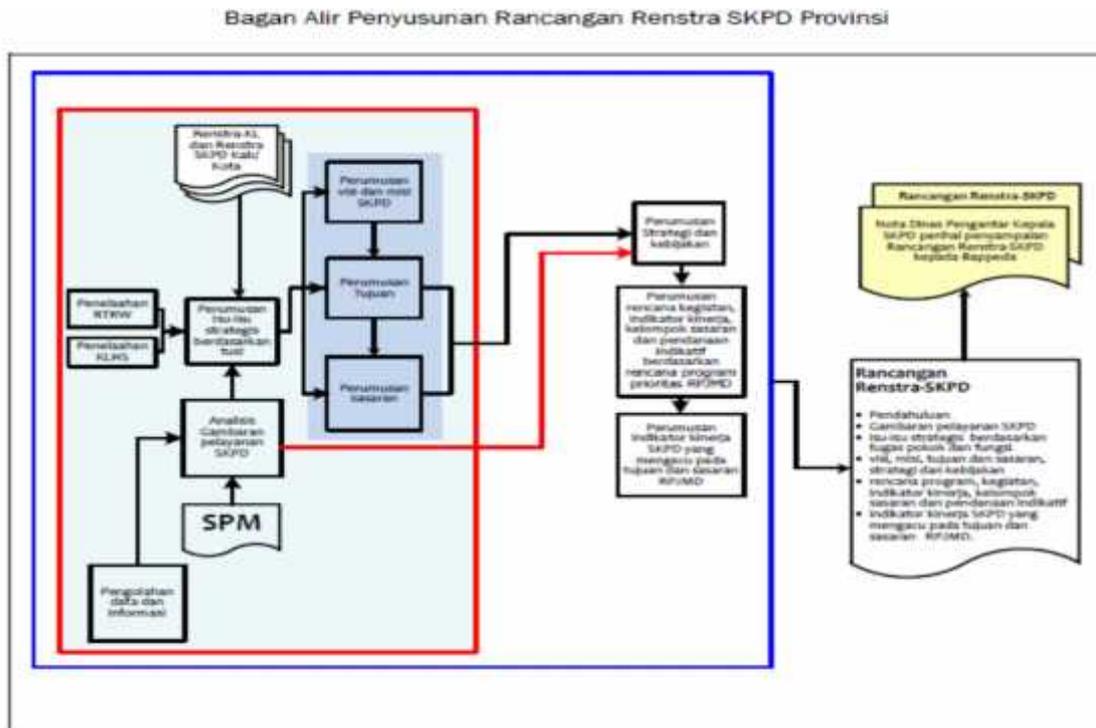


Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

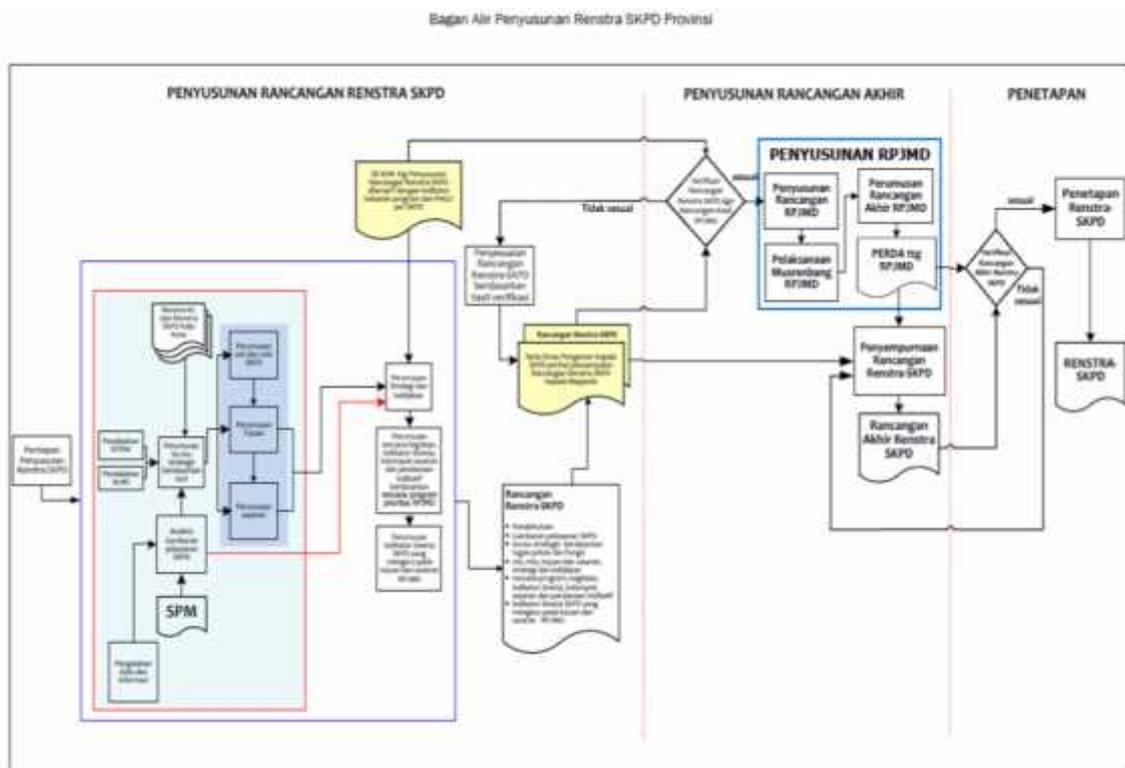
Rencana Satuan Kerja Perangkat Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dirumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Gambaran Pelayanan, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Aceh 2017-2022.

Proses penyusunan Renstra SKPA didahului dengan penyusunan Rancangan awal dari Rencana Strategis SKPA setelah melalui tahapan evaluasi oleh Tim Perencanaan Bidang di Bappeda yang disesuaikan dengan tujuan dan sarana visi misi Pemerintah Aceh, Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022, Rencana Kegiatan Pemerintah Aceh dan Program Prioritas Pembangunan Aceh. Alur proses penyusunan renstra sebagaimana yang tertera pada Gambar 1.1.

Setelah melalui tahapan proses evaluasi oleh Bappeda, maka dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh SKPA sesuai sasaran indikator kinerja dari tugas dan fungsi SKPA yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 - 2022 yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Sebagaimana bagan alir pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi



Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD Provinsi



1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
13. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tahun 2012 Tentang KawasanPertanianTanamanPangan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan
28. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;



29. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
30. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019.
31. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520 Tahun 2017 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan Pedoman dan Acuan dalam menentukan arah Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana rencana strategis ini telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Rencana Startegis ini adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan (*review*) kondisi Pertanian dan Perkebunan Aceh masa kini, sekaligus menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh.
2. Menjabarkan rencana pembangunan strategis Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Visi Misi Gubernur Aceh.
3. Menguraikan kebijakan strategis baik yang berskala nasional maupun daerah yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang dapat ditangani sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
4. Memudahkan seluruh jajaran dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kegiatan dan Program Tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program-program operasional periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022.



6. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen antara Pimpinan, Staf dan Karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
7. Membangun jaringan kerja yang saling terintegrasi antara bidang dan UPTD dalam lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2018-2022 ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Uraian terkait dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Uraian tentang sumber daya manusia
Uraian tentang asset/modal
Uraian tentang unit usaha yang masih operasional
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Uraian mengenai pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode yang lalu, SPM, MDGs atau indikator kinerja pelayanan lainnya.
 - Tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (Tabel T-C.23)



- Uraian tentang interpretasi gap/kesenjangan pelayanan dan pencapaian target kinerja serta faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan dan pencapaian kinerja tersebut
 - Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.24).
 - Uraian tentang interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Uraian tentang analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota
 - Uraian tentang Telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah.
 - Uraian tentang macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Uraian tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
 - Mempelajari Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel T-B.3%)
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih
- Uraian tentang tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program unggulan kepala daerah.



- Berdasarkan Tabel T-B.35, faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota
- Uraian tentang faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pencapaian sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Uraian tentang faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- Uraian tentang review seluruh faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah ditinjau dari tugas dan fungsi, sasaran menengah Renstra K/L dan Kabupaten/Kota, Implikasi RTRW dan KLHS.
 - Uraian tentang Metoda Penentuan Isu-Isu Strategis.
 - Uraian tentang Isu-Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Uraian tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah (Merujuk pada RPJMD).
 - Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Table T-C.25)

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

- 5.1 Uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun



5.2 Uraian tentang relevansi dan konsistensi antar penyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

5.3 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Table T-C.26)

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

7.1 Table 6.1 (Table T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Uraian tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung mengaju pada sasaran dan tujuan dan sasaran RPJMA

7.2 Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA (Tabel T-C.28)

BAB VIII. PENUTUP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. SKPA ini merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai Kepala Seksi beserta stafnya.

Tugas Pokok : Dinas Pertanian dan Perkebunan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan.

Fungsi : 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3) Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4) Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6) Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7) Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
9) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
10) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- 11) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 12) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 13) Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 14) pembinaan UPTD; dan
- 15) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mempunyai

- Kewenangan :**
- 1) Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 2) Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - 3) Menetapkan standar perbibitan/perbenihan Pertanian Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 4) Melakukan promosi ekspor komoditas Pertanian dan Perkebunan Aceh unggulan daerah Provinsi;
 - 5) Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 6) Mengatur penggunaan bibit unggul Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 7) Menetapkan kawasan Pertanian dan Perkebunan Aceh terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
 - 8) Melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh lintas Kabupaten/Kota;
 - 9) Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;



- 10) Melakukan pengawasan perbenihan, pupuk pestisida alat dan mesin dibidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- 11) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
- 12) Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sesuai dengan Pergub Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura;
- e. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- g. Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan dan aset; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi, Data dan Informasi
- l. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- m. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - a) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;

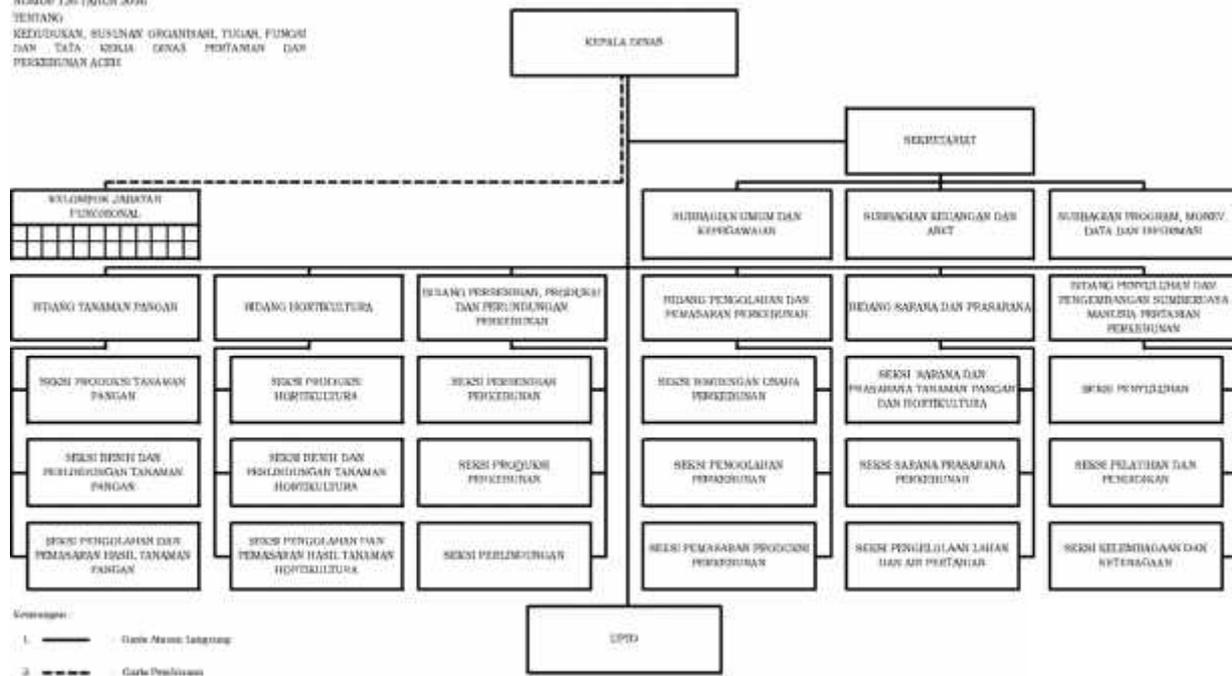


- b) Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
- c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.
- n. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perbenihan Perkebunan;
 - b) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c) Seksi Perlindungan.
- o. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - b) Seksi Pengolahan Perkebunan; dan
 - c) Seksi Pemasaran Produksi Perkebunan.
- p. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Perkebunan; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian.
- q. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Pelatihan dan Pendidikan; dan
 - c) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan.



LAMPUAN
PERATURAN GOVERNUR ACEH
NOMOR 126 TAHUN 2016
TENTANG
KELOMPOK, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN DATA KEMEREA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN ACEH

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan program Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- f. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris dinas adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat dinas membawahi secara langsung Subbagian antara lain :

2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara.

2.2. Subbagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan keuangan.

2.3. Subbagian Program, Evaluasi, Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan, data, penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan; *)
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan; *)
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Tanaman Pangan membawahi secara langsung Seksi antara lain :

3.1. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

3.2. Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

3.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

4. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang hortikultura. Bidang Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura; *)

*) Merupakan Tupoksi UPTD BPSB TPHP

- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- e. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; *)
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Hortikultura membawahi secara langsung Seksi antara lain :

4.1. Seksi Produksi Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.

4.2. Seksi Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.

4.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura.

5. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;



- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan membawahi secara langsung Seksi antara lain :

5.1. Seksi Perbenihan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang perbenihan perkebunan.

5.2. Seksi Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang Produksi perkebunan.

5.3. Seksi Perlindungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan tanaman perkebunan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan merupakan unsur Pelaksana teknis bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;



- b. penyediaan informasi harga pasar di bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. pemberian bimbingan pascapanen, bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian mutu, pelayanan bimbingan usaha dan penetapan teknologi pengolahan hasil;
- e. pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian usaha perkebunan besar dan pemetaan skala usaha perkebunan;
- f. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan promosi hasil, penyusunan dan penyajian informasi pasar;
- g. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- h. pelaksanaan pemantauan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan membawahi secara langsung Seksi antara lain :

6.1. Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang bimbingan usaha perkebunan.

6.2. Seksi Pengolahan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pengolahan perkebunan.

6.3. Seksi Pemasaran Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran produksi perkebunan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur Pelaksana teknis bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, dan alsinbun serta pembiayaan dan investasi. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan,



pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
- f. pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- j. pengkoordinasian dan pengendalian teknis terhadap identifikasi potensi penyiapan dan pemantapan lahan cadangan areal perkebunan;
- k. pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- l. pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana membawahi secara langsung Seksi antara lain :

7.1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

7.2. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang sarana prasarana perkebunan.

7.3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan, pengelolaan air dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura.



8. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan;
- b. bimbingan penyuluhan di bidang pertanian perkebunan
- c. bimbingan pelatihan dan pendidikan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perkebunan;
- d. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian perkebunan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pengembangan metode penyuluhan dibidang pertanian perkebunan;
- g. pengembangan metode pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian perkebunan;
- h. pengembangan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan membawahi secara langsung Seksi antara lain :

8.1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas

Menyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian perkebunan.



8.2. Seksi Pelatihan dan Pendidikan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelatihan dan pendidikan pertanian perkebunan.

8.3. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan ketenagaan pertanian perkebunan.

9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), diantaranya :

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan bagian struktural pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang berperan sebagai penunjang operasional dan pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2016. Maka UPTD dalam lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami perampingan dari 8 (delapan) UPTD menjadi 4 (empat) UPTD. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 50, 51, 52 dan 64 Tahun 2018.

9.1. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BTPPHP).

UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan di bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi organisme pengganggu tumbuhan dan penilai ambang ekonomi;



- d. pelaksanaan penyiapan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan, pengendalian dan pemantapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim;
- e. pelaksanaan eksplorasi, identifikasi, pengembangan, perbanyak dan penyebaran agensia hayati;
- f. pelaksanaan eksplorasi, identifikasi tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati serta mengembangkan teknik pembuatan dan aplikasi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan laboratorium pengamatan, hama dan penyakit, laboratorium unit pengendalian hayati dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- h. pelaksanaan dan pembinaan penerapan teknologi pengendalian hama terpadu dan penerapan pelaksanaan dampak perubahan iklim;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- j. pelaksanaan surveillance organisme pengganggu tumbuhan;
- k. pelaksanaan pengamatan keadaan curah hujan dan stasiun meteorologi pertanian khusus;
- l. pelaksanaan pengamatan dampak pemakaian pestisida dan biopestisida;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya di bidang teknologi untuk pemantapan teknologi proteksi tanaman;
- n. pelaksanaan revitalisasi pembinaan brigade proteksi tanaman;
- o. pelaksanaan pemetaan dan pengolahan data daerah endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

9.2. UPTD Mekanisasi Pertanian.

UPTD Mekanisasi Pertanian sesuai Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pengembangan Teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Mekanisasi pertanian menyelenggarakan fungsi



- a. penyusunan Program dan Perencanaan di bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- b. pelaksanaan Urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga ;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- e. pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian di wilayah Aceh dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
- f. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan unit/kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

9.3. *UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.*

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menyelenggarakan fungsi;

- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan dan kerumahtangga;
- c. pelaksanaan teknis di bidang mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- e. melaksanakan tugas kultivar komoditi pertanian dan perkebunan;
- f. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pelaksanaan klasifikasi, kelayakan dan pendaftaran produsen/pengedar benih;
- h. pelaksanaan pelayanan sistem informasi perbenihan dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.4. UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan.

UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 64 Tahun 2018, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang produksi, pelayanan dan penyebarluasan serta pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelaksanaan produksi benih, pelayanan, penyaluran dan pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan produksi, pelayanan dan penyaluran serta pemasaran produksi benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan penyebaran informasi pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan pembinaan secara teknis bagi kelompok benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengamatan teknologi perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan pemurniaan kembali varietas unggul baru yang berasal dari pemulia benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar dan pengamatan buah lokal unggul;
- i. pelaksanaan studi latihan dan sarana pertemuan petugas pertanian serta para ahli dalam kalangan perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;



- j. pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
- k. pelaksanaan koleksi/ klon unggul lokal dan nasional;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan uptd; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

10. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Aceh

Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Aceh merupakan sekolah binaan Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang pengelolaan pendidikan dan perubahan nomenklatur sekolah pertanian pembangunan propinsi daerah istimewa Aceh menjadi Sekolah menengah Kejuruan pembangunan Pertanian Negeri Aceh. Penetapan dan perubahan nomenklatur menetapkan pengelolaan dan penyelenggara pendidikan SMK PP Negeri Aceh yang terdiri dari SPP Negeri Saree, SPP Negeri Bireuen dan SPP Negeri Kutacane dan ditetapkan menjadi SMK PP Saree, SMK PP Bireuen dan SMK PP Kutacane.

Susunan organisasi untuk SMK PP Negeri Saree, Bireuen dan Kutacane terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Bidang Akademik, sarana dan prasarana, kesiswaan, bidang kerjasama dan hubungan masyarakat serta kelompok jabatan fungsional/dewan guru.

Pengelolaan dan pembinaan pendidikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh (Sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh) meliputi, pembinaan kelembagaan, pengembangan program studi, kurikulum kelompok produktif, sarana dan prasarana, Pembinaan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, uji kompetensi dan kerjasama teknis dalam penyelenggaraan, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Dinas Pendidikan Aceh meliputi; pengembangan standar isi dan kompetensi lulusan, supervise kurikulum, pengembangan kelompok normative, adaptif, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kependidikan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta kerjasama teknis dalam penyelenggaraan, penjaminan, pengendalian mutu pendidikan.

Dalam pembiyaannya disebutkan SMK PP Aceh dibebankan pada dokumen pelaksanaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui dokumen



Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta APBN dan sumber-sumber lain sesuai perundang-undangan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1) Jabatan Fungsional.

- a. Fungsional Penyuluh
- b. Fungsional Arsiparis.
- c. Fungsional POPT.
- d. Pengawas PBT.
- e. Guru.
- f. Veteriner.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Tahun 2018, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh **1.118 orang** Pegawai terdiri dari PNS daerah, PNS pusat dan tenaga kontrak dengan komposisi berdasarkan unit kerja sebagai berikut :



Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah PNS		Tenaga Kontrak	Total
		Daerah	Pusat		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	321	31	139	491
2	UPTD BPTPHP	129	17	60	206
3	UPTD BPSBTPHP	114	1	20	135
4	UPTD Mekanisasi Pertanian	12		26	38
5	UPTD BBHTPP	24		37	61
6	SMK-PP Negeri Saree	94		40	134
7	SMK-PP Negeri Kutacane	19		16	35
8	SMK-PP Negeri Bireuen	5		11	16
9	Pinlak Lhoknga	-		2	2
	Total	718	49	351	1.118

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN KEPEGAWAIAN																JUMLAH
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	2	2	10	18	8	14	66	91	70	24	12	2	2	321
2	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	-	4	15	8	8	22	25	33	10	4	-	-	129
3	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	2	4	14	4	5	23	22	21	14	3	2	-	114
4	UPTD Balai Benih Hortikultura Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	-	-	-	1	3	2	-	5	2	4	5	1	1	-	-	24
5	UPTD Mekanisasi Pertanian	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	2	1	-	-	12
6	SMK-PP Negeri Saree	-	-	1	-	2	8	6	1	15	6	19	30	5	1	-	-	94
7	SMK-PP Negeri Kutacane	-	-	1	-	-	-	1	-	2	8	2	4	1	-	-	-	19
8	SMK-PP Negeri Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	5
	JUMLAH	-	-	2	2	7	30	57	21	50	130	166	168	57	22	4	2	718

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini :



Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

No.	Unit Kerja	Jabatan Struktural			
		Eselon II.a	Eselon III.a	Eselon IV.a	Eselon IV.b
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1	7	21	-
2	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	-	1	3	-
3	UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	-	1	3	-
4	UPTD Balai Benih Hortikultura Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	1	3	-
5	UPTD Mekanisasi Pertanian	-	1	3	-
Total		1	11	33	-

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Formal

KEADAAN : JULI 2018												
NO	INSTANSI	PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2	S-3	
1	Dinas Pertanian an Perkebunan	-	6	154	12	1	14	1	447	83	-	718

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Jabatan Fungsional Tertentu

KEADAAN : DESEMBER 2017														
NO	UNIT KERJA	GOL. RUANG												JUMLAH
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan													
	- Penyuluh Pertanian	-	-	-	-	1	-	1	5	1	5	2	1	16
	- Arsiparis	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
	- Analisis Informasi Pasar	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	UPTD BTPH													
	- POPT	-	-	-	1	-	2	6	27	6	2	-	-	44
	- Arsiparis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPH													
	- PBT (Pengawas Benih Tanaman)	-	-	1	-	2	1	4	15	12	2	2	-	39
	- Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4	SMK-PP Negeri Saree													
	- Guru	-	-	-	-	2	2	13	26	5	-	-	-	48
	- Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	SMK-PP Kutacane													
	- Guru	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4
6	SMK-PP Bireuen													
	- Guru	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
TOTAL														160



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

b. Sarana dan Prasarana.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasana berupa asset mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Pengertian asset dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat asset tetap yang dimiliki meskipun digunakan oleh orang lain.

Asset tetap diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional Dinas. Asset tetap di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari Dinas wajib memelihara atau merehabilitasi asset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk asset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi asset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal harus dikapitalisasi untuk menambah nilai asset tetap tersebut.

Kondisi terakhir Asset lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai sarana penunjang kelancaran terhadap tugas-tugas dan program/kegiatan kedinasan hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan salah satu Dinas Teknis Pemerintah Aceh yang melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh



selama 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012 - 2017 maka mereview kembali capaian program/kegiatan yang direncanakan serta realisasi yang dicapai pada setiap tahunnya.

Usaha peningkatan produksi dan produktivitas pada sub-sektor tanaman pangan merupakan program prioritas yang terus menerus dilakukan dalam rangka pemenuhan akan ketersediaan pangan. Provinsi Aceh dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu telah bebarapa kali mendapat predikat dan penghargaan sebagai “Lumbung Pangan Nasional” atas prestasinya mempertahankan surplus beras. Disamping itu komoditas strategis dan unggulan lainnya dari sub-sektor perkebunan sebagai penghasil devisa diluar Migas di Provinsi Aceh maupun Nasional dalam rangka ekspor yang bertujuan untuk menambah devisa negara tetap menjadi prioritas dan perhatian untuk ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.

Analisa capaian kinerja adalah sasaran startegis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Penjabaran pencapaian tahun 2012 - 2017 dengan tiga indikator output program yaitu 1) peningkatan kesejahteraan petani; 2) peningkatan produksi pertanian/perkebunan; dan 3) perkebunan berdasarkan dukungan *penyediaan bibit unggul, peningkatan prasarana dan sarana pertanian perkebunan serta dukungan teknologi tepat guna pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, dan pertanian potensi, luas lahan bidang pertanian yang tersedia di Provinsi Aceh.*

Pencapaian sasaran tersebut melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian atas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah pengembangan bibit unggul, penyediaan sarana produksi dan sertifikasi bibit unggul serta program peningkatan ketahanan pangan dengan pengembangan diversifikasi tanaman.

Indikator perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPA dengan hasil kinerja dicapai, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.6. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Indikator yang digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA, yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan renstra tahun 2012 - 2017 meliputi :



Tanaman bahan makanan yang meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija yang terdiri dari tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau. Luas panen padi tahun 2016 adalah 429.485,9 hektar, yang terdiri dari luas panen padi sawah sebesar 420.770,9 hektar dan padi ladang sebesar 8.715 hektar. *Perkembangan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Padi.* Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Aceh Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Padi Sawah					
Produktivitas (Kw/Ha)	46.48	47.10	48.99	50.08	51,83
Produksi (Ton)	1.772.982	1.937.890	1.796.100	2.126.765	2.180.754
Luas Panen (Ha)	381.429	411.455	366.590	424.650	420.770,9
Padi Ladang					
Produktivitas(Kw/Ha)	24.72	24.65	25.10	26.20	27,89
Produksi(Ton)	15.756	19.050	23.962	19.879	24.302
Luas Panen(Ha)	6.374	7.728	9.547	7.588	8.715
Padi Sawah + Padi Ladang					
Produksi(Ton)	1.788.738	1.956.940	1.820.062	2.146.644	2.205.056
Luas Panen(Ha)	387.803	419.183	376.137	432.238	429.485,9

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2017

Pada tahun 2016 luas panen jagung sebesar 70.024,2 hektar, kedelai 14.559,2 hektar, kacang tanah 1.823,4 hektar, ubi kayu 1.897,7 hektar, ubi jalar 526,9 hektar dan kacang hijau 1.153,9 hektar. Dari beberapa tanaman tersebut, luas panen terbesar yaitu tanaman jagung yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 2.7. Luas Panen Palawija di Aceh Tahun 2012 - 2016

No	Komoditas	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jagung	Ha	43.675	44.099	47.357	47.967	70.024
2	Kedelai	Ha	35.599	30.579	42.784	32.796	14.559
3	Ubi Kayu	Ha	2.974	2.725	2.432	2.226	1.898

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2017



Tabel 2.8. Produksi Tanaman Palawija di Aceh Tahun 2012 - 2016.

No	Komoditas	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jagung	Ton	167.285	177.842	202.318	205.125	316.645
2	Kedelai	Ton	51.439	45.027	63.352	47.910	22.184
3	Ubi Kayu	Ton	38.257	34.738	31.621	29.131	24.531

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2017

Tabel 2.9. Produktivitas Tananaman Palawija di Aceh Tahun 2012 s/d 2016

No	Komoditas	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jagung	Ku/Ha	38,30	40,33	42,72	42,76	45,22
2	Kedelai	Ku/Ha	14,45	14,72	14,81	14,61	15,24
3	Ubi Kayu	Ku/Ha	128,64	127,48	130,02	130,87	129,25

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2017

Produksi tanaman sayuran pada tahun 2016 mencapai 2.772.596 kuintal. Produksi kentang memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 22,73 persen dari total produksi tanaman sayuran, kemudian disusul cabe rawit dan cabe besar masing-masing berkontribusi sebesar 16,74 persen dan 16,50 persen.

Tabel 2.10. Produktivitas Tananaman Sayuran di Aceh Tahun 2012 - 2016.

No	Komoditas	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bawang Merah	Ton	4.385	3.711	6.707	5.739,00	6.485
2	Cabe Besar	Ton	51.411	42.427	50.189	52.906	66.133
3	Kentang	Ton	6.842	11.310	83.918	700.466	875.583

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan bahwa antara produksi dan produktivitas bahwa target dari indikator kinerja yang ditetapkan pada 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata mengalami kenaikan bahkan ada yang melebihi target (diatas 100%) dan ada pula yang tetap dan hanya dapat dicapai 100%.

Sebagaimana tersebut diatas komoditi yang mengalami penurunan produksi terjadi, selain karena hal-hal tersebut diatas juga disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim (*Global Warming*) berdampak pada pergeseran musim tanam dan faktor teknis seperti jadwal tender yang tidak sesuai dengan waktu tanam di kabupaten,



penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) atau pengiriman data CP/CL yang terlambat ke Provinsi sehingga mengakibatkan penyaluran saprodi juga terlambat karena areal tanam telah ditanam dengan kegiatan lain yang berakibat pada keterlambatan jadwal penanaman.

Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dari sudut peningkatan produksi perkebunan menunjukkan indikasi yang baik, seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan produksi empat jenis tanaman perkebunan unggulan strategis nasional di Aceh.

Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan di Aceh Tahun 2013 – 2017

Komoditi	Produksi (ton) Pada Tahun					Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017 *	
Kelapa Sawit	345.893	375.826	385.175	399.618	426.438	6,58
Kelapa	55.434	63.098	63.702	62.752	61.249	-0,22
Kopi	48.282	44.340	47.444	65.231	68.493	6,04
Kakao	34.795	43.793	44.542	42.889	39.295	2,08
Karet	66.919	69.948	68.802	69.169	66.671	-0,28
Pala	6.451	8.238	8.410	6.620	6.074	2,33
Lada	257	315	330	322	324	3,08
Nilam	3.615	828	758	466	484	-26,39
Cengkeh	3.379	4.055	4.577	5.221	5.268	12,99
Tembakau	1.983	2.340	2.651	1.626	2.017	96,97
Tebu	17.105	19.213	18.440	12.697	40.060	24,84

* = Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2017

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh review selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan terlihat dari jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija, tercapainya produksi dan produktivitas yang diperoleh sangat terkait dengan penggunaan benih unggul bermutu dan persediaan air cukup, pengendalian hama dan penyakit serta penyuluhan pertanian yang efektif sebagai faktor sangat mempengaruhi dalam peningkatan produksi dan produktivitas dalam pengukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah dengan; (a) meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik



dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan, (b) penetapan CP/CL di kabupaten diharapkan tepat waktu dan secepatnya sebelum jadwal pelelangan ditetapkan, dan (c) program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat membuat indikator, sasaran dan target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2012-2016 agar dapat diukur dan diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya. Dari uraian di atas mengenai kinerja pelayanan SKPA tentang Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan pembiayaan yang cukup untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA. Capaian tingkat kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya maupun yang akan datang berdasarkan rasio antara realisasi anggaran sesuai kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi SKPA.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam periode 5 (lima) tahun mendatang akan berusaha lebih baik lagi dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dana yang tersedia dengan memperbaiki faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menunjang pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat petani terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalitas kerja di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Bila kita melihat terhadap aspirasi dan harapan masyarakat baik melalui program dan kegiatan serta berbagai usulan yang masuk ke dinas dan informasi dari lintas sektor kabupaten/kota, masyarakat sangat menaruh perhatian terhadap program dan kegiatan tersebut terutama dalam memenuhi kebutuhan akan ketersediaan pangan dan peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana alsintan serta perbaikan infrastruktur pertanian perkebunan, peningkatan penyuluhan pertanian. Peran dan fasilitasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh masih sangat dibutuhkan sebagai suatu bentuk pendekatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan solusi menurunkan angka kemiskinan/pengangguran yang disebabkan oleh ketidakberdayaan petani dalam memperoleh peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian perkebunan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis serta telaahan dari Rencana Strategis Renstra SKPA lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan RPJM Aceh periode tahun 2017 – 2022 yang diawali sejak tahun 2018. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya akan dituangkan kedalam analisis lingkungan strategi yang berimplikasi sebagai **Tantangan/Ancaman (*Threath*)** dan **Peluang (*Opportunity*)** bagi pengembangan Pelayanan SKPA di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada 5 (lima) tahun mendatang yang diawali sejak 2018 - 2022.

Sumber daya manusia/personil/pegawai yang ada dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional serta non-struktural dan non fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan Bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas. Namun disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan program pembangunan secara maksimal, efektif dan terpadu dengan prinsip dengan pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan Pemerintahan yang bersih (***Clean Government***), akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu pada setiap Bidang dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sangat memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh. Meskipun demikian, secara kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana yang tersedia masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah belum dapat dicapai secara optimal yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Berbagai teknologi juga tersedia di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang sangat berguna dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah dibidang Pertanian dan Perkebunan Aceh. Akan tetapi ketersediaan teknologi tersebut baik secara kuantitas maupun kualitasnya masih terbatas. Demikian halnya dengan anggaran/pembiayaan dalam jumlah tertentu baik yang bersumber dari dana APBA maupun dana APBN juga merupakan faktor yang



sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan dan program pembangunan daerah dibidang Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ditunjukkan pada Tabel 2.12 dan Faktor – Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPA Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.12. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPA Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

NO	MISI PEMERINTAH ACEH DAN PROGRAM ACEH HEBAT	PROGRAM DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PERMASALAHAN	FAKTOR	
			PELAYANAN SKPA	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5	6
1.	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. - Aceh Peumulia	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Disiplin Aparatur.	- Belum terlaksananya pelayanan publik berdasarkan prinsip Good Governance - Minimnya sistem dan prosedur pelayanan administrasi perkantoran	- Belum semua personil mampu melaksanakan komitmen yang diberikan pimpinan akibat kurangnya loyalitas terhadap tugas-tugas dinas. - Rendahnya disiplin aparatur	- Tersedianya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 - Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi .
2	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional. - Aceh Carong	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Peningkatan Kesejahteraan Petani 6. Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan 7. Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan	- Belum terwujudnya kebersamaan (Integritas) dalam lingkungan unit kerja - Rendahnya kualitas SDM Personil/ Pegawai yang mempunyai komitmen terhadap tugas dan fungsi Dinas - Belum terciptanya proaktif, kreatif dan Profesional Petugas terhadap Dinas. - Belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal.	- Masih sedikitnya personel dinas yang berkesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. - Minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Rendahnya Profesionalisme Petugas	- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik. - Tersedianya regulasi peraturan dan perundang-undangan. - Sumber Daya Lahan masih luas - Sumber Daya Komoditas masih berpotensi baik - Prospek pasar yang menjanjikan
3.	Mewujudkan kedaulatan dan Ketahanan Pangan. - Aceh Meugoe dan Meulaot - Aceh Troe	8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Masih lemahnya kelembagaan petani dalam menunjang pembangunan pertanian - Sarana Prasarana Penyuluhan belum memadai - Kelembagaan Penyuluh belum tertata dengan baik - Tingkat kesejahteraan SDM Penyuluh belum memadai - Terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber permodalan	- Sumber daya air belum terkelola dengan baik - Ketersediaan Alat Mesin Pertanian belum memadai - Penggunaan benih unggul bermutu belum sepenuhnya dilaksanakan - Ketersediaan Prasarana Pertanian belum memadai - Gangguan serangan OPT dan Dampak Penomena Iklim masih belum terkelola dengan baik	- Kualitas produk pertanian dan perkebunan kita bernilai tinggi. - Regulasi Kawasan Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
4.	Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif - Aceh Kreatif - Aceh Kaya		- Lemahnya kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan - Kurangnya minat pemuda pedesaan dalam mengusahakan pertanian dan perkebunan - Masih belum optimalnya dukungan dana serta sarana dan prasarana yang memadai - Terjadinya Perubahan Iklim Global & Alih Fungsi lahan yang sera terus menerus - Masih rendahnya Angka Produksi dan Provititas beberapa Komoditas Pertanian dan Perkebunan - Bidang usaha pertanian masih dianggap beresiko tinggi - Terbatasnya akses petani terhadap lahan (0,25 - 0,60 Ha /KK), Saprodi, Alsintan, permodalan dan pasar - Masih terbatasnya ketersediaan Infrastruktur Pertanian - Masih lemahnya kelembagaan petani dalam menunjang pembangunan pertanian - Tidak ada jaminan harga yang menguntungkan petani terutama pada Saat Panen Raya/ Over Produksi. - Masih kurangnya minat pemuda dan swaste terhadap usaha pertanian dan perkebunan	- Ketersediaan Alat Mesin Pertanian belum memadai - Tingkat kehilangan hasil akibat penanganan panen dan pasca panen serta gangguan OPT perlu diturunkan - Perluasan areal pertanian sebagai pengganti akibat alih fungsi lahan	
5.	Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan - Aceh Siat				



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Analisa isu-isu strategis merupakan hal atau bagian yang sangat penting dan untuk menentukan proses penyusunan rencana kegiatan SKPA dalam mendukung pembangunan daerah terutama di Provinsi Aceh khususnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian program/kegiatan terhadap keadaan lingkungan dan aspirasi penerima manfaat sehingga perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Adapun informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah : (a) hasil analisis gambaran pelayanan SKPA, (b) hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPA, (c) hasil telaah RTRW dan (d) hasil analisis KLH (Kajian Lingkungan Hidup).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pada bagian ini akan dikemukakan berbagai permasalahan-permasalahan pelayanan SKPA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi di bawah ini dari hasil analisis gambaran pelayanan SKPA pada Bab II sebelumnya.



Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA
			INTERNAL (Kewenangan SKPA)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPA)	
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur 5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlayannya Seluruh kebutuhan perkantoran dengan maksimal - Terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan baik - Terbentuknya kapasitas sumber daya aparatur yang siap pakai dan professional - Tersedianya data base, terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian serta terlaksananya Monev Bidang Pertanian dan Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator Kinerja Pelayanan SKPA dan Hasil Analisis - Standart kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Qanun dan Pergub yang memberikan kewenangan bidang Dinas Pertanian dan Perkebunan. - Tersedianya dokumen RPJM Aceh periode 2017-2022 - Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi - Tersedianya dukungan dana APBA & APBN untuk pendanaan yang avalible untuk stakeholder bidang pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan politis dari pemerintah aceh dan DPRA - Adanya dukungan lintas sektoral, Akademisi, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program dan Regulasi yang mendukung - Perkembangan usaha-usaha bidang pertanian dan perkebunan - Lingkungan makro yang mendukung pengembangan bidang pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum kuatnya komitmen personil terhadap dinas - Masih belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai - Masih rendahnya kualitas SDM dan produktivitas petugas - Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal - Terus terjadinya <u>Perubah-an Iklim Global & Alih Fungsi Lahan</u> - <u>Masih rendahnya SDM Petani/Pekebun</u>



ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA
			INTERNAL (Kewenangan SKPA)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPA)	
6. Peningkatan Kesejahteraan Petani 7. Peningkatan Produksi Pertanian. 8. Pengembangan Peningkatan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemberdayaan petani melalui pelatihan petani dan pelaku agribisnis - Tersedianya peralatan pasca panen dan pengolahan hasil guna meningkatkan nilai tambah petani - Tersedianya saprodi pengembangan sentra dan kawasan komoditi unggulan dan strategis pertanian dan perkebunan - Terbangunya lining irigasi untuk kawasan sentra padi, dan prasarana 		<ul style="list-style-type: none"> - Kordinasi sinkronisasi, kolaborasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan bidang pertanian dan perkebunan sangat baik - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public - Tersedianya tenaga atau personil dan SDM yang memadai - Tersedianya peraturan dan perundangan bidang pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi yang terus berkembang untuk mendukung perkembangan bidang pertanian dan perkebunan - Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya <u>Angka Provititas</u> komoditi strategis dibanding angka nasional - Terbatasnya <u>akses petani</u> terhadap lahan , saprodi alsintan, permodalan dan pasar. - Masih terbatasnya ketersediaan <u>infrastruktur pertanian dan perkebunan.</u> - Masih <u>lemahnya kelemahan petani</u> dalam menunjang pembangunan pertanian dan perkebunan - Belum ada <u>jaminan harga</u> yang menguntungkan petani terutama pada <u>saat panen raya</u> - Bidang usaha pertanian dan perkebunan masih dianggap berisiko tinggi



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA
			INTERNAL (Kewenangan SKPA)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPA)	
	<p>lainnya JUT, JAPRO untuk pertanian perkebunan di daerah potensial serta terlaksananya penambahan luas baku sawah serta optimasi lahan pola padat karya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alat dan mesin pertanian untuk kawasan agribisnis pangan, hortikultura dan perkebunan. - Terlaksananya peningkatan akreditasi penyuluh melalui upgrading dan supervisi kompetensi penyuluh 				<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya minat pemuda dan swasta berusaha bidang agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.



Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, isu-isu strategis dalam menjalankan agenda pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan iklim global dan alih fungsi lahan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu, saat ini dan masa yang akan datang terus membantu petani dalam peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha taninya. Tercapainya produksi dan produktivitas hasil usaha pertanian sangat tergantung pada sasaran yang ingin dicapai dan kondisi iklim yang mendukung serta ketersediaan lahan terus memadai.

a. Perubahan Iklim Global (*Global Warming*).

Provinsi Aceh termasuk daerah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau di bulan Februari sampai Juli dan musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan rata-rata 131,4 mm dan rata-rata penyinaran matahari 51,2 %. Curah hujan berpengaruh terhadap kelembaban udara dan tanah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang diusahakan.

Lahan yang sesuai sebagai lahan pertanian adalah lahan dengan tingkat kemiringan 0-25 %. Sebesar 32,56 % dari luas wilayah Provinsi Aceh merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tingkat kemiringan tanah diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat yaitu :

- a. Kemiringan wilayah 0 – 2 % seluas 1.284.716 Ha (22,40 %)
- b. Kemiringan wilayah 2 – 15 % seluas 697.868 Ha (12,17 %)
- c. Kemiringan wilayah 15–40% seluas 1.446.075 Ha (25,21%)
- d. Kemiringan wilayah > 40 % seluas 2.307.898 Ha (40,23 %)

Wilayah Provinsi Aceh sebagian besar merupakan dataran rendah dengan luas Wilayah 3.345.987 Ha (98,32 %) merupakan dataran rendah sedangkan 2.378.704 Ha (41,46 %) merupakan dataran tinggi. Berdasarkan klasifikasi tingkat ketinggian wilayah dapat dibagi ke dalam :

- a. Ketinggian 0 – 25 m dpl seluas 1.287.719 Ha (22,24 %)
- b. Ketinggian 25 – 500 m dpl seluas 2.058.268 Ha (35,88%)
- c. Ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 1.050.295 Ha (18,31 %)
- d. Ketinggian > 1.000 seluas 1.328.409 Ha.

Dari perkiraan kedua musim sebagaimana tersebut diatas pada tahun-tahun sebelumnya dapat menetapkan jadwal musim hujan dan musim panas yang pada hakekatnya diiringi dengan jadwal Musim Tanam Petani pada setiap tahunnya. Penjadwalan musim tanam tersebut bertujuan agar meminimalisasi



kemungkinan gagal panen petani (Puso). Jadwal musim tanam tersebut sangat erat kaitannya dengan perencanaan jumlah dan besaran anggaran untuk penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) berupa pupuk, bibit unggul, obat-obat pertanian.

Penyediaan baik sarana dan prasarana pertanian terutama penyediaan saprodi sesuai dengan hukum dan peraturan perlu waktu (Tender/Lelang) dalam rangka penyediaannya. Dengan jadwal musim tanam berdasarkan iklim yang masih tetap dan tidak berubah-ubah maka sangat efektif dalam penjadwalannya dengan musim tanam petani.

Tetapi pada akhir-akhir ini akibat iklim yang tidak menentu dan selalu berubah-ubah (Iklim Global) sangat sulit dapat dideteksi musim tanam yang tepat untuk dilaksanakan dan penjabaran pelaksanaan program serta kegiatan. Bidang pertanian tanaman pangan terhadap perubahan iklim global tersebut merupakan suatu permasalahan serius sekaligus perhatian khusus untuk mencari solusi yang tepat sasaran, efektif dan efisien sejak hulu sampai dengan hilir program dan kegiatan.

b. Alih fungsi lahan terus meningkat.

Provinsi Aceh sebagai sebagai salah satu "*agricultural province*" (provinsi agraris/pertanian). Kondisi objektif didasarkan topografi wilayah provinsi sebagian besar kawasan pertanian yang luas dan subur, dengan konfigurasi penduduk profesi kehidupan mayoritas disub sektor pertanian.

Ancaman yang luar biasa di depan mata sekarang ini adalah konversi lahan (alih fungsi), lahan pertanian produktif menjadi areal non-pertanian, contoh nyata perlombaan pertumbuhan pembangunan gedung, rumah dan toko. Dari tahun ke tahun lahan pertanian terus menciut dan menyusut.

Dasarnya penambahan penduduk, perkembangan industri, perniagaan yang menuntut laju pembangunan infrastruktur, menyebabkan areal pertanian terus dirampas. Tak peduli lahan tersebut yang memproduksi pangan sebagai hajat hidup rakyat bangsa ini. Tanaman Padi (Beras) merupakan komoditas strategis dan bahkan politis karena tidak bisa tidak tersedia dan tidak boleh kekurangan. Luas areal panen dan produktifitas tanaman merupakan faktor utama peningkatan produksi padi di provinsi aceh dan nasional. Beberapa tahun terakhir pertumbuhan luas areal menjadi masalah yang sangat serius seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, karena lahan pertanian sawah kian



dialihfungsikan ke non-pertanian, sehingga daerah yang selama ini sentra produksi beras terus menurun.

Kebijakan perberasan di Indonesia meliputi kebijakan produksi, distribusi, impor dan pengendalian (Proteksi) harga domestik dalam rangka menjaga ketahanan pangan provinsi dan nasional. Usaha tersebut dengan berbagai kebijakan-kebijakan diantaranya Bimbingan Masal (Bimas) tahun 1965, Intensifikasi Khusus (Insus) tahun 1979 dan Supra Insus tahun 1987. Sehingga pada tahun 1984 dapat menghantarkan Indonesia **swasembada beras**. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung sementara karena sampai hari ini Indonesia harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional.

Menurut data Departemen Pertanian pada sebuah media, setiap 20 tahun konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian di seluruh tanah air mencapai 1.627.514 ha. Lahan sawah beririgasi teknis dan nonteknis lenyap sebanyak 81.376 ha. Jika fenomena menyusutnya lahan pertanian sawah akibat konversi lahan seperti perumahan, perkebunan dan lainnya terus dibiarkan, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bagi provinsi yang pernah swasembada beras ini, dampak nyata adalah ancaman produksi pangan.

Upaya menahan laju alih fungsi tersebut, pemerintah segera mengefektifkan peraturan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan. Dengan peraturan tersebut, akan diatur lokasi yang disiapkan untuk lahan pertanian berkelanjutan sehingga alih fungsi lahan tidak bisa dilakukan semudah saat ini. Meskipun demikian, ada program usaha cetak lahan pertanian baru bila dipandang juga tidak efektif, apabila peraturan tersebut terabaikan. Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 jelas dikatakan, bagi perseorangan yang melakukan tindakan alih fungsi lahan akan dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar. Dan bagi perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula dikenakan hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 3 milyar. dan apabila perbuatan tersebut diatas pelakunya pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Jawaban sempurna yang harus ditempuh untuk menekan laju alih fungsi lahan adalah peran penyuluh lapangan ditingkatkan, subsidi pemerintah kepada petani tepat sasaran dan upaya pelarangan pemerintah dengan diberlakukannya



UU No.41 Tahun 2009 dan Qanun Aceh tentang Lahan Pertanian harus tegas. Inilah satu 'PR' pemerintah yang harus segera dituntaskan.

Lahan tidur di Provinsi Aceh yang sebagai dampak konflik dan tsunami menyebar di wilayah pesisir yang terpencil dan pedalaman. Lahan ini tidak diusahakan pemiliknya karena faktor kerusakan lahan dan keamanan yang belum kondusif. Ditambah lagi selama lima tahun terakhir pembangunan fisik mulai dari gedung infrastruktur dan sarana perekonomian lainnya membutuhkan lahan cukup luas. Sebagian besar lahan yang digunakan adalah lahan pertanian produktif, terutama sawah. Di Kabupaten Aceh Besar daerah penyangga ibu kota Provinsi Aceh telah banyak sawah yang di alih fungsikan. Bahkan di Kecamatan Kuta Baro dan Kuta Malaka sebagian besar sawah yang di alih fungsikan adalah sawah beririgasi teknis. Sebagai dampak dari hal ini terjadi pengurangan pemilikan lahan sawah, sehingga jumlah petani yang memiliki lahan sawah kurang dari 0,5 hektar semakin banyak.

2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas dan Petani.

Kondisi saat Aceh kekinian juga akan menghadapi masa krisis prediksi pasca era migas Aceh akan berakhir pada tahun 2022. Langkah konkrit dan komprehensif perlu segera diambil oleh pemerintah untuk meluruskan kebijakan pro rakyat dalam membangkitkan perekonomian dan menambah PAD untuk membiayai keuangan daerah yang sebagian besar banyak terserap untuk belanja aparatur yang dulunya diandalkan dari dana hasil bagi migas. Pembangunan Bidang Pertanian dan perkebunan secara terpadu serta serius oleh pemerintah adalah jawaban kongkrit permasalahan Aceh pasca migas. Tentunya kebijakan ini harus disertai dengan aturan dan dukungan yang penuh dari pemerintah sendiri.

Pelatihan dan Magang terhadap Petugas dan Petani dalam rangka peningkatan Sumber Daya perlu terus dilakukan di Bidang Pertanian dan Perkebunan. Penyediaan sarana dan sarana pendukung merupakan denyut nadi utama dalam keberlanjutan usaha petani. Pendampingan secara serius sampai mandiri juga perlu dilakukan untuk menghasilkan produksi dan produktivitas hasil serta mutu produksi yang tinggi seperti yang diharapkan oleh konsumen.

3. Masih Rendahnya Angka Provititas Komoditas Pertanian dan Perkebunan.

Angka provitas tanaman padi dan jagung di Provinsi Aceh masih rendah dibandingkan dengan Nasional yaitu Padi 5,62 Ton/Ha kita diatas rata-rata Nasional



yaitu 5,35 Ton/Ha, Sedangkan Jagung, Kedelai komoditas Hortikultura dan Perkebunan lainnya masih jauh di bawah rata-rata Nasional. Untuk menunjang kenaikan provitas palawija, hortikultura dan perkebunan tentunya sangat diperlukan kerjasama secara sinergi, kontinue dan sarana dan prasana pertanian yang cukup dan memadai.

4. Terbatasnya akses petani terhadap lahan.

Akses petani terhadap lahan-lahan pertaniannya masih sangat terbatas hal ini ditandai dengan masih rendahnya kepemilikan lahan oleh petani, yang sebagian besar status petani yang ada di Aceh sebagai petani penggarap, bukan sebagai petani pemilik dan penggarap. Hal ini disebabkan oleh karena maraknya alih fungsi lahan akibat perkembangan pembangunan yang sangat cepat. Banyaknya lahan-lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi pertokoan dan perkantoran, juga beralih fungsi menjadi lahan sub sektor lainnya.

Untuk mengantisipasi berkurangnya lahan sawah produktif perlu adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum agar tidak terjadi alih fungsi lahan produktif oleh kepentingan lainnya. Penyusunan Kajian Akademik tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif serta Rancangan Qanunnya telah disusun, Hanya tinggal menunggu diqanunkan pada Tahun 2018. Disamping itu Pemerintah perlu melakukan pencetakan sawah baru sebagai kompensasi pergantian lahan sawah yang hilang akibat alih fungsi tersebut. Sehingga petani penggarap yang selama ini hanya menggarap lahan sawah orang lain dapat menjadi petani pemilik lahannya sendiri. Dengan demikian produksi padi dan komoditi pangan lainnya dapat kita tingkatkan.

5. Masih terbatasnya infrastruktur pertanian.

Infrastruktur pertanian merupakan sarana dan prasarana penunjang utama dalam keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian di Provinsi Aceh. Pada setiap tahunnya terus dilakukan baik kegiatan cetak sawah baru, optimasi lahan, rehab JITUT/JIDES, rehabilitasi/pembangunan JUT, konservasi lahan dan perluasan areal hortikultura. Kondisi sampai dengan tahun 2016 (Aceh Dalam Angka 2017) bahwa luas lahan persawahan di Provinsi Aceh mencapai **245.266 Ha (4,32%)**, Pertanian tanah kering semusim mencapai **571.020,5 Ha (10,06%)**. Dan perkebunan 580.262 Ha (10,22 %). Kurangnya prasarana berupa



jalan usaha tani akan sangat menunjang akses kelancaran petani dalam pengangkutan maupun pendistribusian hasil-hasil pertaniannya.

Selama telah tersedianya akses jalan usaha tani maka sangat meringankan petani atas biaya pengangkutan hasil usahataniannya, rata-rata biaya angkut hasil panen padi dari lahan menuju pabrikan atau rumah berkisar antara Rp.15.000 s/d Rp. 20.000 per karung itu kondisi sebelum ada akses jalan dan setelah ada akses jalan telah dapat meringankan petni atas biaya yang dikeluarkan antara Rp.5.000 s/d Rp. 10.000 per karung.

Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang **360.040 M**, Cetak Sawah Baru sebesar **22.396 Ha**, Optimasi Lahan sebesar **5.770 Ha**, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sebesar **154.770 M**, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar **211.170 Ha**, Konservasi Lahan sebesar **1.300 Ha** dan Perluasan Areal Hortikultura sebesar **3.580 Ha**.

Infrastruktur pertanian yang tersedia serta yang diusahakan baru akan terlaksana usaha bidang pertanian jika juga didukung dengan ketersediaan peralatan berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan). Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus mengusahakan ketersediaan alsintan tersebut sejak tahun 2012 s/d 2017 antara lain : Traktor Besar 4 WD sebanyak **635 unit**, Traktor roda 2 sebanyak **14.419 unit**, pompa air sebanyak **6.036 unit**, power tresher sebanyak **4.192 unit**, Dryer sebanyak **45 unit**, Rice Milling Unit (RMU) sebanyak **77 unit**, APPO sebanyak **212 Unit**, Seed Cleaner sebanyak **52 unit**, Reaper sebanyak **188 unit**, Cultivator sebanyak **188 unit**, Transplater sebanyak **100 unit**, Mini Combine sebanyak **100 unit** dan Corn Seller sebanyak **341 unit**.

Sebagaimana data tersebut diatas yang merupakan infrastruktur pertanian perlu terus dilakukan penyediaan, pemeliharaan maupun rehabilitasi karena fasilitas tersebut sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh petani maka dari tahun ketahun perlu pemeliharaan dan penambahan, mengingat kebutuhan akan alat dan mesin pertanian masih sangat dibutuhkan penambahannya dalam menunjang peningkatan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas usahatani di daerah kawasan pengembangan.

6. Masih lemahnya kelembagaan petani dalam menunjang pembangunan pertanian.

Kelembagaan petani merupakan unsur penunjang dalam pembangunan bidang pertanian hal ini terus dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh



melalui melalui Bantuan Modal Usaha untuk lembaga pertanian (UPJA, LM3, P3A dan Gapoktan).

Selain seperti tersebut diatas juga dilakukan usaha – usaha Pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Gapoktan berupa (Traktor, Dryer, Power Tresher dll), Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM Petani melalui Pelatihan-pelatihan maupun Magang serta Memfasilitasi kemitraan Lembaga Petani dengan swasta dan perbankan.

7. Tidak adanya jaminan harga yang menguntungkan petani terutama pada saat panen raya/over produksi.

Penyediaan pasar juga tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan menampung hasil produksi yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Karena karakteristik produk pertanian, perkebunan dan perikanan tidak tahan lama, musiman dan dipengaruhi oleh iklim. Karena masih bersifat bahan baku utama untuk pengolahan pasca panen produk yang lain ketika sudah dilakukan pengolahan pasca panen. Ini membuktikan bahwa potensi pertanian Aceh sangat besar tetapi belum terorganisir dengan baik, sehingga begitu panen banyak dijual ke Medan dengan sendirinya tanpa ada pengolahan pasca panen, karena belum tersedianya alat-alat pengolahan pasca panen. Pengolahan pasca panen dilakukan di Medan dan bahan jadinya dikirim kembali ke Aceh untuk dikonsumsi dengan harga yang lebih tinggi.

Produk pertaniandan perkebunan saat ini yang dihasilkan oleh para petani dan pekebun masih belum banyak menguntungkan pelaku sendiri. Ini disebabkan masih panjangnya rantai pemasaran yang terjadi. Sehingga yang menikmati keuntungannya adalah para tengkulak/agen masuk kampung. Yang menghasilkan produk adalah petani dengan susah payah, dan memakan waktu lama, tetapi yang menikmati keuntungan berlipat ganda adalah tengkulak dengan rantai pemasaran yang panjang. Walaupun hasil panen banyak, petani dan pekebun masih belum dapat menikmati nilai tambah produk secara wajar.

Dalam kajian ilmu Agribisnis, semakin panjang rantai pemasaran maka semakin sedikit keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Kondisi ini berlaku pada daerah yang dipengaruhi oleh faktor tertentu, diantaranya adalah kemampuan pasar setempat untuk menyerap seluruh produk yang dihasilkan, selera konsumen dan lain sebagainya. Jumlah panen hasil-hasil pertanian tiap tahun di Aceh betapa banyak diangkut ke Medan untuk di ekspor keluar negeri. Padahal, kita sendiri di Aceh sudah



memiliki pelabuhan sendiri untuk peti kemas yang digagas pada masa pemerintahan sebelumnya.

Padahal, kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. Hasil bumi Aceh sangat banyak sekali tetapi masih banyak diculik oleh tengkulak Medan yang memainkan harga, sehingga para pengusaha Aceh masih kalah bersaing dengan pengusaha Medan. Perlu dirumuskan sebuah kebijakan oleh pemerintah agar bisa segera mengoperasikan kembali pelabuhan-pelabuhan Aceh untuk ekspor impor bahan baku dan barang konsumsi dari luar.

Penguasaan pasar yang masih rendah menjadi tantangan baru bagi pengusaha Aceh untuk merebut kembali denyut nadi perekonomian Aceh yang sudah bertahun-tahun dikuasai Medan. Ketergantungan Aceh terhadap Sumatera Utara harus segera diatasi. Karena hasil pertanian dan perkebunan Aceh masih sangat banyak dibawa ke Medan. Kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas dengan tingkat pengetahuan yang masih minim membuat kita masih sulit bersaing dengan daerah lain.

Kebijakan pemerintah yang pro petani perlu segera diwujudkan. Konsentrasi pembangunan dimasa kepemimpinan Gubernur Aceh lima tahun yang akan datang kita harapkan mampu menyulap Aceh dari ketergantungan andalan migas yang hanya tinggal sisanya beberapa tahun lagi menjadi Aceh yang menghasilkan produk pertanian. Sektor inilah yang akan memasok kebutuhan nasional dan bahkan Asia Tenggara seperti pada masa keemasan Sultan Iskandar Muda. Mungkinkah ini akan terwujud dan direalisasikan di tangan kita semua

8. Bidang usaha pertanian dan perkebunan masih dianggap beresiko tinggi.

Usaha bidang pertanian dewasa ini masih dianggap usaha yang beresiko tinggi, hal ini disebabkan karena harapan-harapan petani maupun investor tersebut sangat tergantung dengan keadaan iklim global, keamanan dan kenyamanan serta pasar penunjang hasil-hasil pertanian belum tersedia secara maksimal. Hal tersebut akan terwujud Pembangunan Bidang Pertanian apabila seluruh rantai pendukung secara konkrit dapat disediakan secara maksimal seperti jaminan harga oleh pemerintah, proteksi khusus terhadap petani dan sebagainya.



9. Masih kurangnya minat pemuda dan swasta berusaha dibidang agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Minat pemuda berusaha dibidang agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan memang masih sangat kurang ditandai dengan banyaknya para pemuda di desa-desa lebih memilih dan mencari pekerjaan diluar desa mereka, ada yang menjadi pekerja dipusat-pusat kota dalam provinsi maupun diluar provinsi bahkan menjadi TKI di luar negeri.

Juga swasta tentu masih sangat minim minat berusaha bidang agribisnis karena iklim usaha disektor pertanian belum terjamin secara maksimal hal ini disebabkan keseriusan proteksi terhadap pembangunan bidang pertanian belum tercipta oleh karena itu sejak ini kiranya Proteksi dan Keseriusan Pembangunan Bidang Pertanian dapat terlaksana dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.

Maksud dari penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPA akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPA. Dengan demikian isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rincian mengenai faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan SKPA terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan pada Tabel 3.2 di bawah ini.



Tabel 3.2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPA Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah

No	MISI DAN PROGRAM PEMERINTAHAN ACEH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;	- Masih belum terciptanya proaktif, kreatif dan professional pejabat dan personil terhadap tupoksi dinas	- Masih sedikitnya personil dinas yang berkesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan	- Tersedianya Pergub Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang tata kerja dinas
2.	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;	- Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal dan control	- Masih minimnya ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya	- Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi
3.	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum; dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) - Mencerdaskan masyarakat Aceh yang meliputi pendidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya - Pelayanan kesehatan	- Belum terciptanya SDM Personil/ Pegawai yang berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi dinas - Masih rendahnya kualitas SDM dan proktivitas petugas	- Belum terciptanya pelaksana komitmen yang telah disepakati bersama dan kurang loyalitas personel terhadap tugas-tugas dinas - Belum optimalnya pemberdayaan semua Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya serta	- Terjalinya kordinasi yang baik dengan mitra kerja - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public - Tersedianya tenaga atau personil dengan SDM mulai memadai
4.	Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;	- Tidak ada <u>jaminan harga</u> yang menguntungkan petani terutama pada saat panen raya/over produksi		- Tersedianya peraturan dan perundang-undangan
5.	Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan			- Disiplin pegawai



No	MISI DAN PROGRAM PEMERINTAHAN ACEH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan yang dilaksanakan di Aceh sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan berwawasan daya dukung lingkungan melalui perencanaan yang terpadu, parsipatif, adil dan merata serta berkelanjutan Membangun ekonomi Aceh yang kuat, adil dan maju dengan meningkatkan nilai tambah produk dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam - Melakukan peningkatan ketersediaan modal, bahan baku, tenaga kerja, alat produksi, penguatan kelembagaan dan pasar melalui peningkatan nilai tambah produk - Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian - Masih lemahnya kelembagaan petani dalam menunjang pembangunan pertanian - Masih belum optimalnya dukungan dana serta sarana dan prasaan yang memadai - Terus terjadinya <u>perubahan iklim global&Alih fungsi lahan</u> - Masih rendahnya <u>Angka Provit</u> di banding Nasional - Terbatasnya akses petani terhadap lahan (0,25 – 0,60 Ha), saprodi, alsintan, permodalan dan pasar. - Bidang usaha pertanian masih di anggap berisiko tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya SDM yang tersedia dan berkualitas memadai - Kurang berminatnya personel bertugas pada UPTD yang berada di Kabupaten dan personel terus meminta pindah tugas ke Tingkat Provinsi - Masih kurangnya support / perhatian Pejabat Atasan Langsung Personel terhadap bawahanya yang mempunyai disiplin, kreatifitas dan proaktif tinggi yang mengakibatkan personel merasa didiskriminasi dan menyebabkan tidak disiplin. - Masih tingginya kesenjangan social antar sesama personil dalam satuan kerja dinas 	yang tinggi.
7.	Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;			
8.	Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;			
9.	Memperkuat hubungan antara pemerintahan Aceh dengan semua stakeholder dalam rangka konsolidasi perdamaian			



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No	MISI DAN PROGRAM PEMERINTAHAN ACEH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	<ul style="list-style-type: none">- Menguatkan keberlanjutan perdamaian- Peningkatan pemahaman tentang keberlanjutan perdamaian kepada berbagai stakeholder dalam rangka memelihara perdamaian- Melanjutkan penguatan integrasi sosial <p>Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;</p>	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya minat pemuda dan swasta berusaha dibidang agribisnis	<ul style="list-style-type: none">- Masih minimnya teknologi yang digunakan personil dan menjalankan tugas-tugas dinasnya- Masih kurangnya kebersamaan dan loyalitas antar sesama personil dalam melaksanakan tugas.	



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPA Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPA telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota? Dan apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPA dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Aceh melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPA yang akan menjadi dokumen Renstra SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra SKPA pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan Provinsi/Kabupaten/Kota. Komparasi terhadap capaian sasaran Renstra SKPA terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 3.3, 3.4 dan 3.5.

Bila kita melihat tabel tersebut, capaian sasaran Renstra SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah berkontribusi terhadap sasaran pada Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota terutama dalam meningkatkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pengembangan Komoditi Unggulan sesuai Spesifik lokasi dan Penguatan Kelembagaan.



Tabel 3.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPA Terhadap Sasaran Renstra SKPD dan Renstra K/L

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA	SASARAN PADA RENSTRA K/L
1.	<p>PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Indikator Kinerja Sasaran</i> Pelaksanaan proses administrasi perkantoran dalam pelayanan publik dan kepegawaian</p>	<p>Terlaksananya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik</p>	-	-
2.	<p>PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Indikator Kinerja Sasaran</i> Pelaksanaan proses administrasi perkantoran dalam pelayanan public dan kepegawaian</p>	<p>Terlaksananya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik</p>	-	-
3.	<p>PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Indikator Kinerja Sasaran</i> Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik</p>	<p>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal dalam meningkatkan pemahaman tupoksi guna meningkatkan aparatur yang professional dalam pelayanan publik</p>	<p>Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pertanian dalam pelaksanaan pelatihan serta pengetahuan aparatur</p>	<p>Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur bidang teknis di daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA	SASARAN PADA RENSTRA K/L
4.	<p>PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Ekonomi <i>Indikator Kinerja Sasaran</i> Melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi bidang pertanian di kabupaten/kota</p>	<p>Terlaksananya pembangunan ekonomi bidang pertanian di Kabupaten/Kota</p>	<p>Tersedianya Data Base, Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian serta terlaksananya Monev Bidang Pertanian Tanaman Pangan</p>	<p>Penyempurnaan Data Base, Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian serta terlaksananya Monev Bidang Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka Pembangunan Pertanian Berbasis spesifik lokasi</p>
5.	<p>PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan <i>Indikator Kinerja Sasaran</i> Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembangunan lining irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT) kawasan sentra agribisnis padi daerah potensial 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengembangan intensifikasi kawasan sentra agribisnis padi daerah potensi Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Lining irigasi dan jalan usaha tani (JUT) kawasan sentra agribisnis padi daerah potensi
6.	<p>PROGRAM : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian <i>Indikator Kinerja Sasaran</i> Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kawasan sentra agribisnis padi, jagung, kedelai, hortikultura buah-buahan dan sayuran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengembangan intensifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jalan usaha tani (JUT) jaringan irigasi desa (JIDES) kawasan sentra agribisnis padi, jagung, kedelai, hortikultura buah-buahan dan sayuran



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPA	SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA	SASARAN PADA RENSTRA K/L
7.	<p>PROGRAM : Peningkatan Produksi Pertanian <i>Indikator Kinerja Sasaran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana produksi (Saprodi) - Pengendalian organism pengganggu tanaman pertanian (POPT) - Pengembangan bibit unggul pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kawasan sentra agribisnis padi daerah potensial - Terlaksananya pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kawasan sentra agribisnis padi, jagung, kedelai, hortikultura buah-buahan dan sayuran - Terlaksananya penyediaan sarana produksi (Saprodi) pertanian - Terlaksananya pengendalian organism pengganggu tanaman (POPT) - Terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna kawasan sentra agribisnis padi daerah potensial Kabupaten/Kota - Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna kawasan sentra agribisnis padi, jagung, kedelai, hortikultura buah-buahan dan sayuran Kabupaten/Kota - Peningkatan sarana produksi (Saprodi) pertanian - Peningkatan pengendalian organism pengganggu tanaman (POPT) Kabupaten/Kota - Peningkatan pengembangan bibit unggul pertanian Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alat mesin pertanian (Alsintan) kawasan sentra agribisnis padi daerah potensial - Tersedianya alat dan mesin pertanian (Alsintan) kawasan sentra agribisnis padi, jagung, kedelai, hortikultura buah-buahan dan sayuran - Tersedianya sarana produksi (Saprodi) pertanian - Terkendalinya organism pengganggu tanaman (POPT) - Tersedianya bibit unggul pertanian



Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur bidang teknis di daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik.	Masih minimnya ketrampilan dan pengetahuan aparatur bidang teknis dalam meningkatkan pelayanan publik.	Masih sedikitnya personil/tenaga dinas yang mempunyai kesempatan dalam mengikuti pelatihan dan keterampilan serta Pendidikan Lanjutan.	Besarnya keinginan dari personil/tenaga dinas dalam upaya mengikuti pelatihan yang diadakan dan Pendidikan Lanjutan bila kesempatan tersebut ada.
2.	Penyempurnaan Data Base, Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian serta terlaksananya Monev Bidang Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka Pembangunan Pertanian Berbasis Spesifik Lokasi.	Masih belum optimalnya sistem Data Base yang akurat, sinkronisasi perencanaan dan Monev Bidang Pembangunan Ekonomi Pertanian.	Terus terjadinya Perubahan Iklim Global dan Laju Alih Fungsi Lahan Bidang Pertanian.	Lingkungan makro yang mendukung pengembangan bidang pertanian dan dukungan perencanaan pengembangan pertanian melalui (Food Estate, Claster dan P6S Sare).
3.	Tersedianya Lining Irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi Daerah Potensial.</u>	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian Aceh di banding Nasional Tanaman Padi dan Hasil Produksi Petani Masing Sangat Minim.	Masih Minimnya Infrastruktur Pertanian Lining Irigasi dan Jalan Usaha Tani <u>Kawasan Agribisnis Padi Daerah Potensial.</u>	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan Infrastruktur Pertanian Lining Irigasi dan Jalan Usaha Tani <u>Kawasan Agribisnis Padi Daerah Potensial.</u> Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam menyediakan Infrastruktur pertanian <u>Kawasan Agribisnis Padi Daerah Potensial.</u>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Tersedianya Jalan Usaha Tkebun yang mampu mengakselerasi sentra produksi dan sentra pemasaran	Sentra produksi perkebunan masih sulit dijangkau dengan sara yang minim	Masih Minimnya Jalan Usaha perkebunan yang tersebar di <u>Kawasan Sentra Agribisnis Kelapa Sawit, Kakao, Kopi dan Pala</u>	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan Infrastruktur Jalan Usaha perkebunan terutama <u>Kawasan Sentra Agribisnis kelapa sawit, kakao, kopi, dan pala.</u>
5.	Tersedanya bibit tanaman hortikultura dan perkebunan dengan kualitas prima bersertifikasi dan terjangkau oleh petani	Ketergantungan benih hortikultura dan tanaman perkebunan dari luar Aceh	Masih minimnya kuantitas dan kualitas benih hortikultura dan tanaman perkebunan di Aceh	Mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan benih hortikultura dan perkebunan terutama pada <u>Kawasan Sentra Agribisnis jeruk, pisang, kentang dan cabe; kelapa sawit, kakao, kopi, dan pala.</u>
6.	Tersedianya Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.</u>	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian Aceh di banding Nasional Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran dan Hasil Produksi Petani Masing Sangat Minim.	Masih Minimnya Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.</u>	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan Infrastruktur Pertanian Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah buahan dan Sayuran; serta perkebunan..</u> Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam menyediakan Infrastruktur pertanian <u>Kawasan Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura buah-Buahan dan Sayuran.</u>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Daerah Potensial.</u>	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian dan Perkebunan Aceh di banding Nasional dan Hasil Produksi Petani dan Pekeun masih Sangat Minim.	Masih Minimnya Teknologi Pertanian Tepat Guna berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi Daerah Potensial.</u>	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan Teknologi Pertanian Tepat Gunaberupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) <u>Kawasan Sentra Agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di daerah potensial.</u> Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam menyediakan Teknologi Pertanian Tepat Guna berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
8.	Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.</u>	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian Aceh di banding Nasional Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran. dan Hasil Produksi Petani Masing Sangat Minim.	Masih Minimnya Teknologi Pertanian Tepat Guna berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.</u>	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan Teknologi Pertanian Tepat Guna berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.</u> Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam menyediakan Teknologi Pertanian Tepat Guna berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.
9.	Tersedianya Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian dan Perkebbunan di Aceh.	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian dan Perkebunan Aceh di banding Nasional dan Hasil Produksi Petani dan Pekebun Masing Sangat Minim.	Masih minim dan terbatasnya ketersediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian dan Perkebunan.	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya menyediakan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian. Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam menyediakan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian dan Perkebunan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Terkendalnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian Aceh di banding Nasional dan Hasil Produksi Petani Masing Sangat Minim Akibat Serangan Hama OPT.	Masih belum maksimalnya penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang setiap saat terus mengganggu produksi hasil-hasil pertanian dan perkebunan.	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam upaya penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
11.	Tersedianya Bibit Unggul Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	Masih rendahnya Angka Provititas Pertanian dan Perkebunan Aceh dibanding Nasional dan Hasil Produksi Petani Masing Sangat Minim.	Masih kurang tersedianya bibit unggul pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan rendahnya Produksi dan provitas.	Terus melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dinas dalam upaya Penyediaan Bibit Unggul Pertanian. Melakukan koordinasi dengan pihak K/L dalam dalam upaya Penyediaan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KAB/KOTA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Koordinasi dan sinkronisasi di Bidang Pertanian dan Perkebunan	Masih minimnya pengetahuanpetugas kabupaten/kota dalam bidang teknis pertanian dan Perkebunan akibat kurang keseriusannya dalam rangka pelatihan yang diadakan Provinsi dan K/L.	Belum seriusnya pihak Kabupaten/Kota dalam usaha peningkatan pengetahuan teknis bidang pertanian.dan Perkebunan	Terus melakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten/Kota dalam rangka Peningkatan Pengetahuan Teknis Bidang Pertanian.dan Perkebunan
2.	Tersedianya Data Base, Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian serta terlaksananya Monev Bidang Pertanian Tanaman Pangan.	Masih belum lengkapnya Data Base dan Belum Maksimalnya Perencanaan Pertanian Berbasis Spesifik Lokasi serta belum terlaksananya Monitoring dan Evaluasi secara maksimal terhadap Program/Kegiatan Bidang Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota.	Belum maksimalnya ketersediaan Dana serta Belum akurat dan maksimalnya informasi berupa laporan dari Kabupaten/Kota tentang kemajuan dan permasalahan yang terjadi dilapangan.	Terus melakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten/ Kota dalam rangka sinkronisasi program/ kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan melalui Bimtek dan Pemantapan Perancangan Program Pembangunan Pertanian.
3.	Peningkatan Pengembangan Intensifikasi <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Padi jagung kedelai, bawang, cabe, pisang,</u>	Belum maksimalnya usahaPeningkatan Pengembangan Intensifikasi <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan (Padi jagung kedelai, bawang, cabe, pisang, jeruk, kakao kopi, pala Daerah Potensial</u> Kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Ketahanan	Minimnya Ketersediaan Dana dalam rangka Penyediaan Lining Irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT) <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan (Padi jagung kedelai, bawang, cabe, pisang, jeruk, kakao kopi, pala Daerah Potensial</u> Kabupaten/Kota.	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus Kabupaten/Kota dengan dana otsus provinsi serta Migas Provinsi dan Kab/kota yang tersedia serta Melakukan koordinasi dan konsolidasi program pembangunan Lining Irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan pihak Kabupaten/Kota sebagai mitra



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KAB/KOTA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<u>jeruk, kakao kopi, pala di Daerah Potensial</u> Kabupaten/kota.	Pangan.		kerja lintas sektor.
4.	Peningkatan Pengembangan Intensifikasi <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran, serta unggulan perkebunan</u> Kabupaten/kota.	Belum maksimalnya usaha Peningkatan Pengembangan Intensifikasi <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran</u> , serta unggulan perkebunan Kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan.	Minimnya ketersediaan Dana dalam rangka Penyediaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan JIDES <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran</u> , serta unggulan perkebunan Kabupaten/kota.	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus Kabupaten/Kota dengan dana otsus provinsi serta Migas Provinsi dan Kab/kota yang tersedia serta Melakukan koordinasi dan konsolidasi program pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jides dalam melaksanakan pembangunan <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran</u> , serta unggulan perkebunan dengan pihak Kabupaten/ Kota sebagai mitra kerja lintas sektor.
5.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Daerah Potensial</u> Kabupaten/kota.	Belum maksimalnya usaha Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Daerah Potensial</u> Kabupaten/ kota dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna.	Minimnya ketersediaan Dana dalam rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Daerah Potensial</u> Kabupaten/ kota .	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus, Migas Kabupaten/Kota dengan provinsi yang tersedia dalam melaksanakan pembangunan <u>Kawasan Sentra Agribisnis unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Daerah Potensial</u> .
6.	Peningkatan Penerapan Teknologi	Belum maksimalnya usaha Peningkatan Penerapan Teknologi	Minimnya ketersediaan Dana dalam rangka Penyediaan Sarana dan	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus, Migas



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KAB/KOTA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pertanian <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran</u> Kabupaten/kota.	Pertanian <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran</u> Kabupaten/ kota dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna.	Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran</u> Kabupaten/ kota .	Kabupaten/Kota dengan dengan provinsi yang tersedia dalam melaksanakan pembangunan <u>Kawasan Sentra Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-Buahan dan Sayuran.</u>
7.	Peningkatan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian Kabupaten/kota.	Belum terpenuhinya secara maksimal Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian Kabupaten/ kota dalam rangka Peningkatan Produksi Pertanian.	Minimnya ketersediaan Dana dalam rangka Penyediaan Sarana Produksi Padi (Saprodi) Kabupaten/ kota guna Peningkatan Produksi Padi.	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus, Migas Kabupaten/Kota dengan dengan provinsi yang tersedia dalam melaksanakan Penyediaan Saprodi untuk Peningkatan Produksi Padi.
8.	Peningkatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Kab./kota.	Belum maksimalnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kabupaten/ kota dalam rangka Peningkatan Produksi Pertanian.	Minimnya ketersediaan Dana dalam rangka Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kabupaten/ kota guna Peningkatan Produksi Padi.	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus, Migas Kabupaten/Kota dengan dengan provinsi yang tersedia dalam melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk Peningkatan Produksi Padi.
9.	Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Kabupaten/kota.	Belum maksimalnya usaha Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul Kabupaten/ kota dalam rangka Peningkatan Produksi Pertanian.	Minimnya ketersediaan Dana dalam rangka Penyediaan Bibit Unggul Pertanian Kabupaten/ kota guna Peningkatan Produksi Padi.	Berupaya melakukan sharing dana kegiatan antara dana otsus, Migas Kabupaten/Kota dengan dengan provinsi yang tersedia dalam meningkatkan ketersediaan Bibit Unggul Pertanian untuk Peningkatan Produksi Padi.



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA yang ditinjau dari implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sementara pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPA. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPA akan mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPA dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPA dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Bila kita melihat dari riwayat RTRW 1993 yang disusun sejak tahun 1990 dan di perda-kan pada tahun 1995 (Perda Nomor 9 Tahun 1995 Tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Aceh) dan revisi RTRW tahun 2000 tapi tidak di perdakan serta peninjauan kembali RTRW pada tahun 2004 namun tidak selesai dikerjakan maka pada tahun 2006 melalui Badan Rehab-Rekons (BRR) Nad-Nias kembali disusun tapi belum juga diperdakan karena munculnya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN. Selanjutnya pada tahun 2009 hingga sekarang disusun kembali RTRW Aceh yang disesuaikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 dan PP Nomor 26 Tahun 2008 dimana filosofi dari RTRW Aceh tersebut disusun untuk memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan di Aceh yang berbasiskan kepada sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan ekonomi Aceh ke depan seminimal mungkin menghindari prinsip eksploitasi SDA tetapi mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan (air, energi dan karbon).

Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang menjadi kajian adalah rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Hasil

telaahan terhadap struktur ruang wilayah dan pola ruang dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 serta Grafik 3.1 di bawah ini.



Grafik 3.1. Provinsi Aceh Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional 2009-2029



Tabel 3.6. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Aceh 2009-2029

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Rencana Struktur Tata Ruang Aceh 2010-2029 : (RTRW Aceh).				
1.	10 Ha PKSN Yaitu Kota SABANG.	Terdapat 10 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Sabang melalui pengedaaan Alsintan, Pupuk, Bibit Unggul dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kota Sabang.
2.	2 Buah PKW yaitu KOTA BANDA ACEH.	Terdapat 1 : UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Pengembangan UPTD BTPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura Ramah Lingkungan.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebagai	UPTD BTPH Kota B. Aceh



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	91 Ha PKSN Yaitu Kota BANDA ACEH.	<p>Terdapat 1 : UPTD BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p> <p>Terdapat 91 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Pengembangan UPTD BPSBTPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>pendukung Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kota Banda Aceh dalam Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pangan dan Hortikultura. Sebagai pendukung Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Banda Aceh melalui pengediaan Alsintan, Pupuk, Bibit Unggul dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.</p>	<p>UPTD BPSBTPH Kota B. Aceh.</p> <p>Kota Banda Aceh.</p>
3.	3 Buah PKWyaitu KAB. ACEH BESAR.	<p>Terdapat 1 : UPTD MEKANISASI PERTANIAN. Sebagai Unit</p>	<p>Pengembangan UPTD Mekanisasi Pertanian sebagai Unit Pelaksana</p>	<p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat</p>	<p>UPTD Mekanisasi Pertanian Kabupaten Aceh</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	34.645 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Besar.	<p>Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan Pelayanan, Pengawasan, Promosi dan Pembinaan Alat dan Mesin Pertanian.</p> <p>Terdapat 1 : UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA SAREE. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan pelaksana produksi benih bermutu, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura.</p> <p>Terdapat 1 : SMK-PP Negeri SAREE. Sebagai Sekolah Kedinasan Tingkat Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p>	<p>Teknis Dinas Bidang Mekanisasi Pertanian.</p> <p>Pengembangan UPTD Balai Benih Hortikultura Saree sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang pelaksana produksi benih bermutu, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura.</p> <p>Pengembangan SMK-PP Negeri Saree sebagai Sekolah Kedinasan Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p>	<p>berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kab. Aceh Besar dalam Bidang Mekanisasi Pertanian. Sebagai pendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kab. Aceh Besar dalam Bidang pelaksana produksi benih bermutu, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura. Sebagai pendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan Sekolah SMK-PP Negeri Saree di Kab. Aceh Besar dalam Bidang Kelanjutan Pendidikan Anak Petani Miskin dari Kabupaten. Sebagai pendukung Peningkatan Tenaga Kerja Lapangan.</p>	<p>Besar.</p> <p>UPTD Balai Benih Hortikultura Saree, Kabupaten Aceh Besar.</p> <p>SMK-PP Negeri Saree, Kabupaten Aceh Besar.</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terdapat 34.645 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai salah satu Penyumbang Beras terbesar Aceh di Kabupaten Aceh Besar dengan usaha Rehabilitasi/Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Besar.
4.	1 Buah PKW yaitu KAB. PIDIE.	Terdapat 1 : UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN KEUMALA. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan melaksanakan Produksi dan Penyebarluasan benih	Pengembangan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Keumala, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan kegiatan Produksi dan Penyebarluasan benih bermutu varietas unggul	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kab. Pidie dalam Bidang pelaksana Produksi dan Penyebarluasan benih bermutu varietas unggul	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Keumala, Kabupaten Pidie.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	38.221 Ha PKSN yaitu Kab. Pidie.	bermutu varietas unggul kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Terdapat 34.645 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Sebagai pendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian. Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai salah satu Penyumbang Beras terbesar Aceh di Kabupaten Pidie dengan usaha Rehabilitasi/Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Pidie.
5.	1 Buah PKW yaitu KAB. BIREUEN.	Terdapat 1 : SMK-PP Negeri Bireuen. Sebagai	Pengembangan SMK-PP Negeri Bireuen sebagai	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada	SMK-PP Negeri Bireuen, Kabupaten



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	22.784 Ha PKSN yaitu Kab. Bireuen.	<p>Sekolah Kedinasan Tingkat Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p> <p>Terdapat 22.784 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Sekolah Kedinasan Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan Sekolah SMK-PP Negeri Bireuen di Kab. Bireuen dalam Bidang Kelanjutan Pendidikan Anak Petani Miskin dari Kabupaten. Sebagai pendukung Peningkatan Tenaga Kerja Lapangan.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai salah satu Penyumbang Beras terbesar Aceh di Kabupaten Bireuen dengan usaha Rehabilitasi/Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.</p>	<p>Bireuen.</p> <p>Kabupaten Bireuen.</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	<p>1 Buah PKW yaitu KAB. ACEH TENGGARA.</p> <p>13.689 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Tenggara.</p>	<p>Terdapat 1 : SMK-PP Negeri Kuta Cane. Sebagai Sekolah Kedinasan Tingkat Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p> <p>Terdapat 13.689 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Pengembangan SMK-PP Bireuen sebagai Sekolah Kedinasan Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan Sekolah SMK-PP Bireuen di Kab. Bireuen dalam Bidang Kelanjutan Pendidikan Anak Petani Miskin dari Kabupaten. Sebagai pendukung Peningkatan Tenaga Kerja Lapangan.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam</p>	<p>SMK-PP Bireuen, Kabupaten Bireuen.</p> <p>Kabupaten Bireuen.</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
7.	17.100 Ha PKSN yaitu Kab. Simeulue.	Terdapat 17.100 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Simeulue dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Simeulue.
8.	9.795 Ha PKSN yaitu Kab. Pidie Jaya.	Terdapat 9.795 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif &	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat	Distan Kabupaten Pidie Jaya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Pangan dan Hortikultura.	berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Pidie Jaya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
9.	1.961 Ha PKSN yaitu Kota Lhokseumawe.	Terdapat 1.961 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Lhokseumawe dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme	Kota Lhokseumawe.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
10.	50.238 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Utara.	Terdapat 50.238 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Utara.
11.	41.166 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh	Terdapat 41.166 Ha : Lahan Baku Sawah	Peningkatan dan Pengembangan Lahan	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada	Kabupaten Aceh Timur.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Timur.	Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
12.	18.197 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Tamiang.	Terdapat 18.197 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat	Kabupaten Aceh Tamiang.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
13.	1.679 Ha PKSN yaitu Kota Langsa.	Terdapat 1.679 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Langsa dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kota Langsa.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	7.871 Ha PKSN yaitu Kab. Gayo Lues.	Terdapat 7.871 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Gayo Lues dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Distan Kabupaten Gayo Lues.
15.	7.085 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Tengah.	Terdapat 7.085 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Tengah dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman,	Kabupaten Aceh Tengah.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
16.	2.853 Ha PKSN yaitu Kab. Bener Meriah.	Terdapat 2.853 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Bener Meriah dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Bener Meriah.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	32.401 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Jaya.	Terdapat 32.401 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Jaya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Jaya.
18.	26.531 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Barat.	Terdapat 26.531 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan,	Kabupaten Aceh Barat.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
19.	23.578 Ha PKSN yaitu Kab. Nagan Raya.	Terdapat 23.578 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Nagan Raya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam	Kabupaten Nagan Raya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
20.	11.807 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Barat Daya.	Terdapat 11.807 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Barat Daya.
21.	17.526 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Selatan.	Terdapat 17. Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif &	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat	Kabupaten Aceh Selatan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Pangan dan Hortikultura.	berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Selatan dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
22.	11.320 Ha PKSN yaitu Kota Subulussalam.	Terdapat 11. Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Subulussalam dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan	Kota Subulussalam.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan Food Estate dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
23.	7.401 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Singkil.	Terdapat 7.401 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Singkil dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JIDES, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Singkil.



Tabel 3.7. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Pemerintah Aceh

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<u>Kawasan Lindung :</u> Melindungi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 (Bab XX Pasal 147-150) dan PP No. 26 Tentang RTRWN Bag. 2 Lampiran VII	Menghindari pembukaan lahan /cetak lahan baru yang masuk kawasan lindung yang telah ditetapkan melalui rekomendasi studi tata ruang satuan permukiman (RTSP)	Banyaknya usulan dari petani (CP/CL) masyarakat kab/kota untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura yang tidak mengetahui batas-batas kawasan lindung sehingga tidak bisa di sangat sulit untuk ditindak lanjuti.	Kab. Pidie, Kota Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur.
2.	<u>Kawasan Andalan :</u> <u>Kawasan</u> Banda Aceh, Sabang& Aceh Besar. <u>Kawasan</u> Pidie dan Pidie Jaya <u>Kawasan</u> Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara <u>Kawasan</u> Langsa, Aceh Timur dan Aceh	Pertanian , Pariwisata, Industri dan Perikanan Laut. Pertanian, perkebunan , industry, perikanan dan pertambangan Industri, pertanian , pertambangan dan perikanan Perkebunan ,	Pengembangan & Peningkatkan Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian Berdasarkan Sumber Daya Lokal atau Spesifik Lokasi serta yang telah ditetapkan melalui PP No. 26 / 2008 Tentang RTRW Lamp. IX untuk Penetapan Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Aceh.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan renstra SKPA tidak terdapatnya hal-hal yang menyimpang dalam pemanfaatan ruang terutama dalam Pengembangan & Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian selama memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku serta pemanfaatan lokasi Pengembangan dan	Kota Banda Aceh. Kota Sabang. Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya. Kota Lhokseumawe. Kabupaten Bireuen. Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Tamiang. Kota Langsa.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Tamiang</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Tengah, Bener Meriah</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Tenggara dan Gayo Lues</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Selatan dan Abdya</p> <p><u>Kawasan</u> Subulussalam dan Aceh Singkil</p> <p><u>Kawasan</u> Simeulue</p>	<p>pertanian, industry, perikanan, pertambangan</p> <p>Perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan dan pertanian.</p> <p>Perkebunan, pariwisata dan pertanian.</p> <p>Perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata</p> <p>Perkebunan, perikanan, dan pariwisata</p> <p>Perikanan, perkebunan dan pariwisata.</p>		<p>Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian sangat memungkinkan untuk pengembangan kawasan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan <u>Pertanian yang Tangguh dan Penanganan Kemandirian Kelembagaan Petani serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemerataan Kesempatan Kerja.</u></p>	<p>Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah.</p> <p>Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Gayo Lues.</p> <p>Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Nagan Raya.</p> <p>Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Abdya.</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	<p><u>Kawasan Strategis :</u> Sudut Kepentingan Ekonomi.</p> <p>Sudut Sosial Budaya</p> <p>Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup</p>	<p>Kawasan pengembangan berbasis SDA termasuk kelautan di pesisir barat wilayah Aceh (5 kawasan andalan)</p> <p>Situs peninggalan kesultanan Aceh Kawasan pemakaman massal korban tsunami.</p> <p>Kawasan ekosistem Ulue Masen (Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie)</p> <p>Kawasan Gunung Seulawah (Aceh Besar, Pidie)</p> <p>Wisata Alam Laut Weuh (Sabang)</p> <p>Kawasan Hutan lindung pesisir (Aceh Singkil)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Wisata alam laut (P. Banyak, Singkil) Kawasan DAS Peusangan (PLTA, Irigasi)			



Pembangunan pertanian dan perkebunan dalam wilayah dan tata ruang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas andalan produk pertanian/perkebunan melalui pengembangan kawasan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan dalam rangka penguatan ekonomi lokal dan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan pendukung ketercapaian sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditargetkan setiap tahunnya, seperti penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan benih unggul bermutu, pupuk dan obat-obatan pertanian, rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi tersier, pemanfaatan sumber-sumber pengairan seperti embung, long storage, dam parit, penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, intensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian serta penanggulangan organisme pengganggu tanaman secara intensif dan terpadu.

Selanjutnya untuk peningkatan kesejahteraan petani diawali dengan penyusunan rencana teknis prioritas dan arah pembangunan pertanian meliputi : peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan kawasan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan dalam rangka membangun pertanian yang tangguh berdasarkan sumber daya lokal atau spesifik lokasi dan meningkatkan kemandirian petani serta peningkatan peran kelembagaan pertanian melalui pembangunan sumber daya aparatur serta sumber daya pertanian lainnya.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPA baik faktor penghambat dan faktor pendorong bila ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.



Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Ekonomi melalui Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Masih terkendala dalam kesamaan visi dan misi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten.	<p>Belum akuratnya data base & informasi pertanian secara cepat dan online dari Kabupaten serta selalu berubah-ubah data tersebut akibat tingginya alih fungsi lahan dan keadaan iklim global.</p> <p>Belum terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian berbasis spesifik lokasi di Kabupaten.</p> <p>Belum maksimalnya kabupaten dalam rangka monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan sering mengalami kurang tepat sasaran dan keterlambatan penyelesaiannya.</p>	<p>Bidang Pertanian dan Perkebunan Salah Satu Prioritas Program Pemerintah Aceh.</p> <p>Rekomendasi RTRW Aceh Tentang Penetapan Kawasan Andalan Pertanian dan Perkebunan.</p> <p>Adanya dukungan dana dari Pemerintah Aceh dalam Pembangunan Ekonomi melalui Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan.</p>
2.	Pengembangan Pertanian melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Peningkatan Ketahanan Pangan serta Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna.	<p>Masih terkendala dalam penentuan Musim Tanam yang tepat karena terus terjadi perubahan Iklim Global dan alih fungsi lahan.</p> <p>Masih rendahnya angka provitas</p>	<p>Masih terbatasnya sarana infrastruktur pertanian berupa : JUT, JITUT, Embung, Lining.</p> <p>Belum maksimalnya pengembangan sentra agribisnis padi daerah potensial, Jagung, Kedelai,</p>	<p>Bidang Pertanian Tanaman Pangan Salah Satu Prioritas Program GUBERNUR ACEH 2012-2017.</p> <p>Rekomendasi RTRW Aceh Tentang Penetapan Kawasan</p>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>dibanding nasional, terbatasnya akses petani terhadap lahan, saprodi, alsintan, permodalan dan pasar.</p> <p>Belum ada jaminan harga yang menguntungkan petani dan masih lemahnya kelembagaan petani.</p>	<p>Hortikultura Buah-buahan dan Sayuran.</p> <p>Masih minimnya ketersediaan Saprodi, cadangan benih daerah serta alat dan mesin pertanian di lokasi sentra agribisnis dan spesifik lokasi.</p> <p>Belum maksimalnya penanganan dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman yang didukung ketersediaan obat-obatan pestisida.</p> <p>Belum maksimalnya optimasi lahan produktif dan belum tercapainya cetak sawah baru wilayah RTRW Bidang Pertanian dan Perkebunan.</p>	<p>Andalam Produk Pertanian.</p> <p>Adanya dukungan dana dari Pemerintah Aceh sering dengan Kabupaten dalam usaha Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan.</p>



3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam rangka kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan atau program kegiatan (KRP). Adapun manfaat yang dapat diambil dari KLHS adalah :

- a. Merupakan instrument proaktif dan sarana pendukung dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia.
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan.
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholder*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi.
- f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagai pemanfaatan sumberdaya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memulai suatu perencanaan, mengambil keputusan dengan mengadopsi prinsip berkelanjutan selalu diawali dengan kajian-kajian eksisting periode pembangunan yang telah dilaksanakan maupun studi dengan mitra kerja dari Akademisi, untuk Bidang Pertanian dan Perkebunan yang menyajikan informasi keadaan potensi wilayah untuk pengembangan pertanian, tata ruang lokasi, ketersediaan lahan, potensi lahan yang akan dikembangkan, analisis dampak lingkungan sekitar, keadaan sosial dan budaya daerah sekitar, serta anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dari keseluruhan proses tersebut tetap melibatkan para



pihak yang berkepentingan di daerah, masyarakat sepanjang proses pengambilan keputusan yang diimplementasikan untuk menilai apakah keputusan tersebut harus diamandemen dan memberi basis untuk masa depan.

Dalam menjalankan proses tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melakukan kajian lingkungan hidup strategis yang bermutu melalui beberapa kriteria, yaitu :

a. Sinkronisasi dan Terpadu.

Memastikan bahwa kajian-kajian dalam pembangunan pertanian dan peningkatan produksi dan produktivitas andalan produk pertanian tetap melihat dampak lingkungan dan sasaran yang tepat untuk semua tahap keputusan strategis sudah relevan sehingga tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dalam suatu kawasan. Penyajian isi laporan dalam studi rencana teknis bidang pertanian memuat saling keterkaitan antara aspek kebutuhan sosial dan ekonomi serta adanya keterkaitan secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) untuk pengambilan keputusan.

b. Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan.

Memfasilitasi dan mengidentifikasi opsi-opsi pembangunan/pengembangan dan alternatif proposal yang lebih layak dan tepat sasaran dari penyampaian usulan baik dari Kabupaten/Kota maupun kelompok tani.

c. Fokus.

Menyediakan berbagai informasi yang cukup sesuai kebutuhan informasi dasar dalam bentuk database yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan/pengembangan dan pengambilan keputusan ke isu-isu pembangunan/pengembangan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan efektifitas biaya dan waktu.

d. Akuntabel.

Pengambilan keputusan yang strategis merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang dilakukan secara profesional, tegas, fair, tidak berpihak dan seimbang sehingga perlu dikontrol dan diverifikasi setiap usulan sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritas baik *Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan pada tingkat Kabupaten/Kota, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Teknologi Pertanian Tepat Guna maupun Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan.*



Selanjutnya hasil tersebut dijustifikasikan dan didokumentasikan sebagai isu-isu berkelanjutan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

e. Partisipatif.

Dalam melakukan perencanaan tetap melibatkan para *stakeholder* dan pihak yang berkepentingan, masyarakat dan instansi pemerintah Kabupaten/Kota di sepanjang proses pengambilan keputusan. Mencantumkan secara implisit masukan dan pertimbangan dalam dokumentasi dan pengambilan keputusan serta memiliki kejelasan informasi, permohonan informasi yang mudah dipahami dan menjamin akses yang memadai ke semua informasi yang dibutuhkan.

f. Interaktif.

Dalam melakukan suatu program/kegiatan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terlebih dahulu memastikan tersedianya dokumen atau hasil kajian sedini mungkin sebagai bentuk awal perencanaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan memberikan inspirasi pada perencanaan di masa mendatang. Selanjutnya menyediakan informasi yang cukup perihal dampak aktual dan keputusan strategis.

Pendekatan KLHS dalam Pembangunan/Pengembangan Bidang Pertanian yang diawali dengan studi/kajian eksisting periode pembangunan yang telah dilaksanakan maupun studi dengan mitra kerja dari Akademisi, tata ruang dan aspek lainnya baik lingkungan, sosial dan budaya di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh didasarkan pada kerangka kerja dan metodologi berpikirnya untuk penetapan lokasi Calon Sentra Pengembangan/pembangunan Agribisnis Padi, Palawija dan Hortikultura menggunakan model KLHS sebagai **“Pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*)”**. KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam dan atau sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model ini mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW dan menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Hasil kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) akan menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah



terlampaui, maka kebijakan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS nantinya, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPA yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPA yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.



Tabel 3.9. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPA	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana Teknis Pembangunan Pertaniandan Perkebunan di Kabupaten/Kota.	Informasi tata ruang calon lokasi, keadaan social budaya dan ekonomi, penggunaan lahan di wilayah studi, status lahan kawasan hutan lindung, dampak langsung terhadap petani, kebutuhan dan anggaran biaya pembangunan, dll.	Perlu di lihat dulu sebelum dilaksanakan studi terhadap keadaan status hutan, cagar alam dan kesesuaian dengan RTRWA Aceh agar biaya yang digunakan tidak sia-sia setelah pelaksanaan studi.	Memperhatikan keadaan penggunaan lahan calon studi lokasi untuk pembangunan/ pengembanganbidang pertanian agar tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau cagar alam yang berdampak terhadap lingkungan pada saat pembukaan lahan baru.
2.	Rencana Teknis Peningkatan Ketahanan Pangan.	Rekomendasi terhadap peningkatan pengembangan intensifikasi tanaman unggulan pangan, horti dan perkebunan serta Perluasan Areal Pertanian dan Perkebunan	Perlu di telaah terlebih dahulu lokasi yang akan dilakukan perencanaan terhadap keadaan lahan dalam pengembangan tanamanpangan, horti dan perkebunan serta lahan tidur tetapi produkti.	Memperhatikan keadaan dan kesesuaian lahan yang dikembangkan dan rekomendasi perluasan lahan tidur pertanian produktif yang akan di dibangun dan kembangkan.
3.	Rencana Teknis Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan.	Rekomendasi dan pertimbangan terhadap penyediaan saprodi sentra agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Rekomendasi dan pertimbangan peningkatan penanggulangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan	Perlu pertimbangan penyediaan saprodi dan menghindari terhadap penggunaan pupuk yang berlebihan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan melalui strategi pembinaan dan pelatihan di lokasi sentra agribisnis. Perlu pertimbangan peningkatan penaganganan OPT dan	Memperhatikan kesemimbangan kebutuhan saprodi pupuk dan pestisida serta menghindari pencemaran lingkungan akibat penggunaan kelebihan pupuk dan pestisida.



NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPA	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		hortikultura dan perkebunanserta teknis pembinaan yang akan dilakukan.	menghindari kelebihan penggunaan pestisida menyarankan penanggulangan OPT secara alami dan ramah lingkungan.	
4.	Rencana Teknis Peningkatan Teknologi Pertanian.	Rekomendasi dan pertimbangan terhadap penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna kawasan sentra agribisnis tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan.	Rekomendasi penyesuaian penyediaan untuk penggunaan teknologi pertanian tepat guna berupa alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan pada lokasi sentra agribisnis.	Memperhatikan kebutuhan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan.

Selanjutnya, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan SKPA bila ditinjau dari implikasi KHLS seperti pada Tabel 3.9 tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10. Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Analisis KHLS Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

NO	HASIL KHLS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Keadaan penggunaan lahan dan status kawasan hutan lindung	Kurangnya pengetahuan Kab/Kota sebagai lintas sector dalam pegusunan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam	Banyaknya usulan masyarakat dan kab/kota yang tidak bisa di jalankan akibat lokasi yang diusulkan terbentur oleh keadaan status hutan kawasan lindung	Melakukan kajian awal terhadap seluruh usulan lokasi yang masuk ke SKPA baik status kawasan hutan dan telaahan RTRWA terlebih dahulu sebelum



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

NO	HASIL KHL TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembangunan permukiman transmigrasi dengan menelaah kajian awal terhadap keadaan status kawasan dan RTRWA yang ada		dilaksanakan studi kajian rencana tata ruang calon lokasi oleh pihak SKPA
2.	Penggunaan air di lokasi permukiman	Banyaknya lokasi transmigrasi yang dibangun dengan persediaan air sangat minim dan memerlukan masukan teknologi yang sangat berat	Minimnya persediaan dana dalam melakukan kajian ketersediaan air di lokasi sebelum dilaksanakannya pembangunan permukiman	Banyaknya calon lokasi yang memiliki sumber air bersih sesuai dengan potensi dan syarat pembangunan dan penyiapan calon permukiman
3.	Pencemaran lingkungan akibat penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang berlebihan di lokasi permukiman	Kurangnya tenaga indtrukur pelatihan dalam memberikan pelatihan yang maksimal kepada masyarakat di lokasi dalam memberikan pemahaman penggunaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	Kurangnya keikutsertaan personel dalam mengikuti pelatihan instruktur tenaga Pembina di lokasi dalam pendampingan masyarakat di lokasi permukiman	Tersedianya SDM yang baik di lokasi terutama masyarakat yang telah berpengalaman sehingga ilmu mereka bisa di bagikan antara sesama pemukim



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada sub bagian ini apa saja yang telah diceritakan di atas, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi pelayanannya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, yaitu gambaran pelayanan SKPA, Sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra Kab/Kota, implikasi rencana tata ruang bagi pelayanan SKPA dan implikasi KLHS pada pelayanan SKPA dengan menggunakan metode penentuan isu-isu strategis sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPA tahun rencana.

Hasil analisis dan telaahan dari Rencana Strategis SKPA lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan RPJP Aceh periode tahun 2012 – 2017. Dari hasil analisis tersebut di atas, nantinya di tuangkan ke dalam analisis lingkungan strategi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPA di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (*Evidence Based*) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan tetap mempertimbangkan karakteristik Dinas (SKPA). Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya terutama lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan serta Pengembangan Bidang Pertanian dan Perkebunan secara optimal di Aceh.

Sebelum melakukan analisa lingkungan perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal yang diklasifikasikan dalam kekuatan (*Strength = S*), kelemahan (*Weaknesses = W*) serta



mempertimbangkan peluang (*Opportunity* = O) dan ancaman (*Threats* = T). Identifikasi ini sangat penting sebagai bahan analisis lingkungan dalam menetapkan strategi organisasi di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

3.5.1. Kondisi Lingkungan Strategis.

Analisis lingkungan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode "**Analisis SWOT**" (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal nantinya. Adapun empat unsur *strengths, weakness, opportunities, threats*, yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal.

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*STRENGTH*).

1. Tersedianya dokumen RPJP Aceh periode tahun 2012 – 2017.
2. Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025
3. Tersedianya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032 yang konsisten dengan RPJP Aceh Tahun 2005 – 2025
4. Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022
5. Tersedianya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
6. Bidang Pertanian merupakan salah satu Prioritas Pemerintah Aceh
7. Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi.
8. Tersedianya dukungan dana APBA dan APBN.



9. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja.
10. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik.
11. Tersedianya tenaga atau personel dan SDM yang memadai.
12. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan perkebunan.
13. Disiplin pegawai yang tinggi.
14. Kelembagaan dan otonomi daerah yang mendukung penyelenggaraan aturan pada system pembangunan pertanian dan perkebunan.

b. Kelemahan (*WEAKNESS*).

1. Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap Dinas.
2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Masih kurang profesionalnya beberapa personel dinas.
4. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik).
5. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal.
6. Pola pikir petani di Provinsi Aceh yang masih berorientasi pada produksi dan mental model petani subsistem.
7. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan/ perundang-undangan.
8. Rendahnya tatakelola kerja pada tingkat kabupaten (*Good Governance*).
9. Kinerja aparatur di lapangan yang kurang optimal.
10. Pengelolaan sarana penunjang program yang belum optimal.

2. Lingkungan Eksternal.

Merupakan faktor-faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan "peluang" (*opportunity*) tapi juga memunculkan "tantangan" (*threats*).

Adapun faktor eksternal Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat diidentifikasi sebagai berikut :



a. Peluang (*OPPORTUNITY*)

1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Aceh dan DPRA.
2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program.
3. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta.
4. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain (adanya perubahan paradigma dalam sistem pengembangan pertanian moderen).
5. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang pertanian dan perkebunan.
6. Pertumbuhan konsumen akibat penambahan jumlah penduduk.
7. Peningkatan bahan baku industry, diversifikasi pangan dan peningkatan komoditas ekspor perkebunan.
8. Peningkatan permintaan produk pertanian dan perkebunan yang berkualitas untuk konsumen kelas menengah ke atas terutama kakao dan kopi.
9. Peningkatan peluang pasar akibat perdagangan bebas.
10. Perkembangan teknologi pertanian yang terus menerus menghasilkan inovasi produksi.

b. Ancaman (*THREATS*).

1. Tingginya angka pengangguran yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang tidak disertai kualitas SDM.
2. Tingginya angka kemiskinan.
3. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.
4. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani/pekebun.
5. Kurangnya minat pemuda dan swasta berusaha dibidang agribisnis.
6. Tidak ada jaminan harga produk pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani/pekebun.
7. Terus terjadinya perubahan iklim global dan maraknya alih fungsi lahan pertanian.
8. Pelaku agribisnis yang sangat sedikit dan sistem promosi yang lemah.
9. Degradasi sumber daya lahan di Aceh dan dampak pemanasan Global.



10. Dampak negative Era Perdagangan Bebas yang menonjolkan daya saing produk pangan.
11. Krisis ekonomi dan Finansial secara Global.

3.5.2. Analisis Lingkungan Strategis

Setelah faktor-faktor lingkungan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diidentifikasi, maka dilakukan analisis terhadap interaksi antara : *Kekuatan dan peluang; Kekuatan dan ancaman; Kelemahan dan peluang; dan Kelemahan dan tantangan*. Analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencermatan, pembobotan terhadap masing-masing poin dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal mencapai total nilai 100 seperti Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Kabupaten/Kota.	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPA.	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public.	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.	10
5.	Kemungkinan dan kemudahannya untuk ditangani.	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	25
Total		100

Selanjutnya untuk tiap-tiap unsur dalam faktor lingkungan tersebut diberi *nilai* dari angka 1-4 menurut nilai kepentingan dan pengaruhnya. Nilai **4 = sangat berpengaruh**, nilai **3 = berpengaruh**, nilai **2 = kurang berpengaruh**, nilai **1 = tidak berpengaruh**. Bobot yang ada dikalikan nilai maka akan diperoleh score. Score inilah yang menentukan urutan prioritas mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Secara rinci, penghitungan analisis lingkungan strategis dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini.



Tabel 3.12. Perhitungan Analisis Lingkungan Strategis

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	NILAI	SCORE	RANGKING
1	2	3	4	5
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL.				
1. KEKUATAN (STRENGTH).				
a. Tersedianya Pergub Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.	25	4	100	I
b. Tersedianya dokumen RPJM Aceh periode tahun 2017 – 2022.	25	4	100	III
c. Bidang Pertanian merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Aceh Periode 2017-2022.	25	4	100	II
d. Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi.	10	3	30	VI
e. Tersedianya dukungan dana APBA dan APBN.	20	4	80	IV
f. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja.	10	3	30	X
g. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik.	20	3	60	V
h. Tersedianya tenaga atau personil dan SDM yang memadai.	15	3	45	VIII
i. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang pertanian.	10	3	30	IX
j. Disiplin pegawai yang tinggi.	10	3	30	XI
k. Kelembagaan dan otonomi daerah yang mendukung penyelenggaraan aturan pada system pembangunan pertanian.	20	3	60	VII
2. KELEMAHAN (WEAKNESS).				
a. Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap dinas	20	4	80	III
b. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai	15	4	60	IV
c. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional	10	3	30	VII
d. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal.	10	3	30	VIII



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	NILAI	SCORE	RANGKING
1	2	3	4	5
e. Pola pikir petani di Provinsi Aceh yang masih berorientasi pada produksi dan mental model petani subsistem.	20	4	80	II
f. Rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan/ perundang-undangan.	15	2	30	IX
g. Rendahnya tatakelola kerja pada tingkat kabupaten (<i>Good Governance</i>).	20	4	80	I
h. Kinerja aparaturnya di lapangan yang kurang optimal.	15	3	45	V
i. Pengelolaan sarana penunjang program yang belum optimal.	10	4	40	VI
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL				
1. PELUANG (OPPORTUNITY).				
a. Adanya dukungan politis dari pemerintah Aceh dan DPR Aceh	25	4	100	I
b. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program	20	3	60	II
c. Hubungan industrial yang cukup kondusif	10	3	30	XI
d. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta	10	3	30	VIII
e. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain (adanya perubahan paradigma dalam sistem pengembangan pertanian moderen).	15	3	45	III
f. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang pertanian tanaman pangan dan komoditas ekspor perkebunan.	10	3	30	IV
g. Pertumbuhan konsumen akibat pertambahan jumlah penduduk.	20	3	60	V
h. Peningkatan bahan baku industri dan Diversifikasi Pangan.	20	4	80	X
i. Peningkatan Permintaan Produk Pertanian dan Perkebunan yang Berkualitas untuk konsumen kelas menengah ke atas.	20	3	60	VI
j. Peningkatan Peluang Pasar akibat perdagangan bebas.	20	4	80	IX
k. Perkembangan teknologi pertanian yang terus menerus menghasilkan inovasi produksi.	20	3	60	VI



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	NILAI	SCORE	RANGKING
1	2	3	4	5
2. TANTANGAN (<i>THREAT</i>)				
a. Tingginya angka pengangguran	20	4	80	I
b. Tingginya angka kemiskinan	20	4	80	II
c. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas	15	4	60	III
d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Petani.	10	4	40	IV
e. Makin rendahnya tingkat kesejahteraan Petani.	10	4	40	V
f. Kurangnya minat pemuda dan swasta berusaha dibidang agribisnis.	10	3	30	XII
g. Tidak ada jaminan harga produk pertanian/perkebunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.	10	3	30	XI
h. Terus terjadinya perubahan iklim global dan maraknya alih fungsi lahan	20	4	80	VI
i. Pelaku agribisnis yang sangat sedikit dan sistem promosi yang lemah.	20	3	60	VII
j. Degradasi Sumber daya lahan di Aceh dan dampak pemanasan Global.	20	3	60	VIII
k. Dampak negative Era Perdagangan Bebas yang menonjolkan daya saing produk pertanian dan perkebunan.	15	4	60	IX
l. Krisis ekonomi dan Finansial secara Global.	15	3	45	X



Dari analisis tersebut di atas dapat ditentukan posisi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang mengidentifikasi peluang banyak tetapi posisi kelemahan juga sangat dominan sehingga mengganggu efektifitas organisasi. Strategi yang tepat adalah melakukan pembenahan ke dalam terlebih dahulu terutama memperbaiki yang ada (*konservatif*). Dengan memperhatikan analisis lingkungan maka dilanjutkan dengan analisis strategi sebagai berikut :

1. STRATEGI / SO

Yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menggabungkan **Kekuatan dengan Peluang (S + O)**. Strategi ini bersifat lebih mengarah kepada **Agresive Strategies**.

Dari Analisis lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, antara lain yaitu :

- a. Memanfaatkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran program dalam mendukung Pemerintah Aceh.
- b. Memanfaatkan Dokumen RPJM Aceh sebagai perbandingan dalam pelaksanaan program/kegiatan baik Pemerintah Aceh maupun lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- c. Memanfaatkan Program Prioritas Pemerintah Aceh Bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam rangka Pembangunan Pertanian/Perkebunan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Unggulan Pertanian/Perkebunan yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pemenuhan ketersediaan pangan daerah dan nasional, dengan tidak mengesampingkan peranan perkebunan sebagai komoditas yang memiliki daya saing dan peningkatan pendapatan devisa bagi negara.
- d. Pemimpin yang mempunyai komitmen, profesional, arif dan bijaksana serta berlatar belakang ilmu yang sesuai dengan tujuan dinas.
- e. Memanfaatkan dukungan anggaran dari APBA dan APBN untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan pertanian dan perkebunan yang tangguh bertujuan untuk kesejahteraan petani.



- f. Meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun Pusat.
- g. Mengoptimalkan peranan UPTD, BBU, BBI, Kebun-kebun Benih Sumber, Poktan, Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluh yang ada pada lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Produksi Pertanian maupun Peningkatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
- h. Mengikutsertakan pegawai yang potensial dan kreatif ke berbagai diklat teknis dalam rangka peningjatan kapasitas sumber daya aparatur.
- i. Memanfaatkan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang ada.
- j. Meningkatkan peraturan dan disiplin pegawai yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010.
- k. Memanfaatkan dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan otonomi daerah yang mendukung penyelenggaraan aturan pada system pembangunan pertanian dan perkebunan.

2. STRATEGI / ST.

Yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dengan menggabungkan kekuatan dengan ancaman (S+T). Strategi ini sifatnya lebih mengarah kepada **Competitive Strategies** atau **Diversification Strategies**. Dari analisis lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, yaitu :

- a. Melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh secara optimal.
- b. Menyesuaikan program kegiatan dengan tujuan dan sasaran RPJM Aceh dengan sebaik-baiknya dalam mendukung Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Visi Pemerintah Aceh.
- c. Melaksanakan Program Prioritas Pemerintah Aceh Bidang Pertanian dan Perkebunan serta Penyuluhan dalam rangka Pembangunan Pertanian melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Unggulan Pertanian yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pemenuhan ketersediaan pangan daerah dan nasional **secara sinergis**.
- d. Mendukung komitmen, profesionalisme, arif dan bijaksana pimpinan terhadap tujuan organisasi.



- e. Memanfaatkan dukungan anggaran baik APBA maupun APBN mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan pertanian yang tangguh bertujuan untuk kesejahteraan petani.
- f. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. Meningkatkan peranan UPTD, BBU, BBI, BPP, Poktan, Gapoktan yang ada pada lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Produksi Pertanian maupun Peningkatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
- h. Mengoptimalkan kemampuan tenaga/personil/pegawai yang kreatif sesuai dengan kemampuan teknis pada bidangnya masing-masing.
- i. Menjalankan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan amanah yang ada di dalamnya.
- j. Menegakkan dan menumbuhkan kesadaran pegawai terhadap disiplin sesuai dengan peraturan pegawai PP Nomor 53 Tahun 2010.
- k. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan otonomi daerah yang mendukung penyelenggaraan aturan pada system pembangunan pertanian.

3. STRATEGI / WO

Yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan cara menggabungkan antara kelemahan dengan peluang (W+O). Strategi ini sifatnya lebih mengarah kepada **Conservative Strategies** atau **Turn Around**.

Dari analisis lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, antara lain yaitu :

- a. Membangun dan membentuk kesadaran personil terhadap tujuan dan sasaran program.
- b. Memanfaatkan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam partisipasinya mendukung program.
- d. Meningkatkan kuantitas/jumlah SDM yang memadai dalam peran serta pelaksanaan kegiatan.



- e. Membangun dan memupuk komunikasi yang baik antar sesama pegawai dalam memecahkan permasalahan secara optimal.
- f. Membangun pola pikir petani di Aceh dari orientasi pada produksi dan mental model petani subsistem ke subsistem yang baik.
- g. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan/perundang-undangan.
- h. Membangun tatakeloka kerja pada tingkat kabupaten (*Good Governance*) ke arah yang lebih baik.
- i. Meningkatkan kualitas kerja aparatur di lapangan secara optimal.
- j. Membangun sistem pengelolaan sarana penunjang program yang lebih optimal.

4. STRATEGI / WT

Yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan menghindari ancaman dengan cara menggabungkan kelemahan dengan ancaman (W + T). Strategi ini sifatnya lebih mengarah kepada ***Defensive Strategies***. Dari analisa lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, yaitu :

- a. Berusaha membentuk dan menumbuh kembangkan kesadaran personil/pegawai terhadap pentingnya komitmen terhadap tujuan program.
- b. Berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai sasaran program pada lingkup Dinas.
- c. Upaya peningkatan kualitas SDM dalam mendukung program dan kegiatan Dinas.
- d. Mengoptimalkan koordinasi antar lintas sektor Dinas guna keberhasilan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- k. Meningkatkan pola pikir petani dan pekebun di Aceh dari orientasi pada produksi dan mental model petani subsistem ke subsistem yang baik.
- l. Berusaha meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan/perundang-undangan agar pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- m. Meningkatkan sistem tatakeloka kerja pada tingkat kabupaten (*Good Governance*) ke arah yang lebih baik.
- n. Mengoptimalkan kualitas kerja aparatur di lapangan yang lebih baik.



- e. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana penunjang program yang lebih baik.
- f. Berdasarkan analisa lingkungan strategis di atas pada lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh maka dapat ditemukan issue-issue strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi.

Untuk lebih jelasnya terhadap evaluasi dalam menentukan langkah yang paling tepat seperti tersebut di atas dalam menentukan alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini :



Tabel 3.13. Penentuan Alternatif Strategi Berdasarkan Analisa SWOT.

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>PELUANG (OPPORTUNITY) :</p>	<p>TANTANGAN (TREATHS) :</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Aceh & DPRA. 2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program. 3. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta. 4. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain (adanya perubahan paradigma dalam sistem pengembangan pertanian moderen). 5. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang pertanian dan perkebunan. 6. Pertumbuhan konsumen akibat pertambahan jumlah penduduk. 7. Peningkatan bahan baku industry dan Diversifikasi Pangan. 8. Peningkatan Permintaan Produk Pertanian dan Perkebunan yang Berkualitas untuk konsumen klas menengah ke atas. 9. Peningkatan Peluang Pasar akibat perdagangan bebas. 10. Perkembangan teknologi pertanian yang terusmenerus menghasilkan inovasi produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pengangguran. 2. Tingginya angka kemiskinan. 3. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas. 4. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. 5. Kurangnya minat pemuda dan swasta berusaha dibidang agribisnis. 6. Tidak ada jaminan harga produk pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 7. Terus terjadinya perubahan iklim global dan maraknya alih fungsi lahan pertanian. 8. Pelaku agribisnis yang sangat sedikit dan sistem promosi yang lemah. 9. Degradasi Sumber daya lahan di Aceh dan dampak pemanasan Global. 10. Dampak negative Era Perdagangan Bebas yang menonjolkan daya saing produk pangan. 11. Krisis ekonomi dan Finansial secara Global.
<p>KEKUATAN (STRENGHT) :</p>	<p>ALTERNATIF STRATEGI (S+O) :</p>	<p>ALTERNATIF STRATEGI (S+T) :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ppertanian dan Perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran program dalam mendukung Pemerintah Aceh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh secara optimal.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

<ol style="list-style-type: none">2. Tersedianya dokumen RPJM Aceh periode tahun 2017 – 2022.3. Bidang Pertanian dan Perkebunan merupakan salah satu Prioritas Pemerintah Aceh4. Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi.5. Tersedianya dukungan dana APBA dan APBN.6. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja.7. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik.8. Tersedianya tenaga atau personel dan SDM yang memadai.9. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan perkebunan.10. Disiplin pegawai yang tinggi.11. Kelembagaan dan otonomi daerah yang mendukung penyelenggaraan aturan pada system pembangunan pertanian dan perkebunan.	<ol style="list-style-type: none">2. Memanfaatkan Dokumen RPJM Aceh sebagai perbandingan dalam pelaksanaan program/kegiatan baik Pemerintah Aceh maupun lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.3. Memanfaatkan Program Prioritas Bidang Pertanian dan perkebunan di Aceh.4. Pemimpin yang mempunyai komitmen, profesional, arif dan bijaksana serta berlatar belakang ilmu yang sesuai dengan tujuan dinas.5. Memanfaatkan dukungan anggaran dari APBA dan APBN untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan pertanian dan perkebunan yang tangguh bertujuan untuk kesejahteraan petani.6. Meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun Pusat.7. Mengoptimalkan peranan UPTD yang ada pada lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Produksi Pertanian maupun Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna.8. Mengikutsertakan pegawai potensial % kreatif ke diklat teknis.9. Memanfaatkan segala bentuk peraturan yang ada.10. Meningkatkan peraturan dan disiplin pegawai yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010.11. Memanfaatkan dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga & otonomi daerah.	<ol style="list-style-type: none">2. Menyesuaikan program kegiatan dengan tujuan dan sasaran RPJM Aceh dengan sebaik-baiknya dalam mendukung Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017 - 2022.3. Melaksanakan Program Prioritas Pemerintah Aceh Bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh secara sinergis.4. Mendukung komitmen, profesionalisme, arif dan bijaksana pimpinan terhadap tujuan organisasi.5. Memanfaatkan dukungan anggaran baik APBA maupun APBN mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan perkebunan yang handal menuju petani yang sejahtera.6. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.7. Meningkatkan peranan UPTD yang ada pada lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan maupun Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna.8. Mengoptimalkan kemampuan tenaga/personil/pegawai yang kreatif sesuai dengan kemampuan teknis pada bidangnya masing-masing.9. Menjalankan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan amanah yang ada di dalamnya.10. Menegakkan kesadaran pegawai terhadap disiplin sesuai dengan peraturan pegawai PP
--	---	---



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

		Nomor 53 Tahun 2010. 11. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan otonomi daerah yang mendukung penyelenggaraan aturan pada system pembangunan pertanian dan perkebunan.
KELEMAHAN (WEAKNESS)	ALTERNATIF STRATEGI (W+O)	ALTERNATIF STRATEGI (W+T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap Dinas. 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Masih kurang profesionalnya beberapa personel dinas. 4. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik). 5. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal. 6. Pola pikir petani di Provinsi Aceh yang masih berorientasi pada produksi dan mental model petani dan pekebun subsistem. 7. Rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan/ perundang-undangan. 8. Rendahnya tatakelola kerja pada tingkat kabupaten (<i>Good Governance</i>). 9. Kinerja aparaturnya di lapangan yang kurang optimal. 10. Pengelolaan sarana penunjang program yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan membentuk kesadaran personil terhadap tujuan dan sasaran program. 2. Memanfaatkan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam partisipasinya mendukung program. 4. Meningkatkan kuantitas/jumlah SDM yang memadai dalam peran serta pelaksanaan kegiatan. 5. Membangun dan memupuk komunikasi yang baik antar sesama pegawai dalam memecahkan permasalahan secara optimal. 6. Membangun Pola pikir petani di Aceh dari orientasi pada produksi dan mental model petani subsistem ke subsistem yang baik. 7. Meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan/perundang-undangan. 8. Membangun Tatakelola kerja pada tingkat kabupaten (<i>Good Governance</i>) ke arah yang lebih baik. 9. Meningkatkan kualitas kerja aparaturnya di lapangan secara optimal. 10. Membangun sistem pengelolaan sarana penunjang program yang lebih optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha membentuk dan menumbuhkan kebangsaan kesadaran personil/pegawai terhadap pentingnya komitmen terhadap tujuan program. 2. Berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai sasaran program pada lingkup Dinas. 3. Upaya peningkatan kualitas SDM dalam mendukung program dan kegiatan Dinas. 4. Mengoptimalkan koordinasi antar lintas sektor Dinas guna keberhasilan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 5. Meningkatkan pola pikir petani di Aceh dari orientasi pada produksi dan mental model petani subsistem ke subsistem yang baik. 6. Berusaha meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan/perundang-undangan agar pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 7. Meningkatkan sistem tatakelola kerja pada tingkat kabupaten (<i>Good Governance</i>) ke arah yang lebih baik. 8. Mengoptimalkan kualitas kerja aparaturnya di lapangan yang lebih baik. 9. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana penunjang program yang lebih baik.



Berdasarkan analisis lingkungan tersebut di atas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Optimasi sumberdaya yang ada (tenaga/personel dan dana serta sarana prasarana) untuk mengatasi permasalahan pertanian dengan memanfaatkan dukungan politis dari DPRA dan Pemerintah Aceh (***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanian dan perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan formal***).
- b. Optimasi sumberdaya yang ada (tenaga/personel dan dana serta sarana prasarana) untuk mengatasi ketidak samaan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Aceh dengan kabupaten/kota bidang pertanian dan perkebunan (***Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan yang tangguh melalui sinkronisasi pelaksanaan program, data base dan monitoring serta evaluasi yang relefan dan optimal***).
- c. Optimasi sumberdaya yang ada (tenaga/personel dan dana serta sarana prasarana) dengan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian dan perkebunan untuk mengatasi permasalahan petani dilapangan serta mengurangi tingkat kemiskinan dalam rangka pemenuhan membuka peluang dan kesempatan berusaha (***Program Peningkatan Kesejahteraan Petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman andalan Perkebunan sebagai upaya dapat bangkit dari ketidakberdayaan dan kemiskinan***).
- d. Optimasi sumber daya yang ada (tenaga/personel dan dana serta sarana prasarana) untuk mengatasi permasalahan petani dilapangan serta dukungan lintas sektoral, swasta dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas unggulan pertanian melalui penyediaan sarana produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian tepat guna, perbaikan infrastruktur pertanian dan perkebunan, pemanfaatan benih unggul bermutu dan bersertifikat, penanggulangan gangguan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan. (***Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan untuk mengatasi permasalahan petani dilapangan tentang alat dan mesin pertanian dalam berusaha tani menuju modern melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan***).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah gambaran dari arah pembangunan atau kondisi masa depan Aceh yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi SKPA menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah pada SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dihasilkan dari analisis pada Bab III sebelumnya menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi sehingga visi mampu menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa mendatang yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan pada kondisi dan situasi yang terjadi saat ini di Aceh. Jadi visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*) tetapi dengan fokus pada masa depan.

4.1.1. Visi.

Visi Dinas Pertanian Provinsi Aceh 2018-2022 yaitu mendukung terwujudnya Visi Gubernur 2018-2022. **"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani"**.

4.1.2. Misi

Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yaitu Mendukung terlaksana Misi Gubernur Terpilih, yangke berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, yaitu sebagai Berikut:

- a. Meningkatkan layanan administrasi dan fasilitasi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.



- c. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan yang lebih kompeten.
- d. Meningkatkan Produksi dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan, yang berkelanjutan dan meningkatkan devisa Negara yang mengandalkan produk turunan perkebunan.
- e. Meningkatkan Daya Saing, Nilai Tambah Produk Pertaniandan Perkebunan yang berkeadilan diantara pemangku kepentingan,
- f. Mengurangi Ketergantungan Petani dan Pekebun Terhadap Bantuan Pemerintah.
- g. Meningkatkan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dan Terobosan Pemasaran Produk Pertanian dan Perkebunan terutama yang berorientasi ekspor.
- h. Mendayagunakan adat-istiadat/budaya sebagai kearifan lokal untuk mengembangkan keunggulan produk pertanian dan perkebunan Aceh.

4.1.3. Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

4.1.4. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan kinerja aparatur negara (*good government*) di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, efektivitas pengawasan kinerja untuk pelayanan publik.
- b. Mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Mengurangi ketergantungan petani dan pekebun terhadap bantuan pemerintah.
- d. Meningkatkan Penerapan Teknologi Terbaru untuk Budidaya Tanaman Padi, Palawija, Hortikulturadan Perkebunan.
- e. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk meningkatkan daya saing produk.



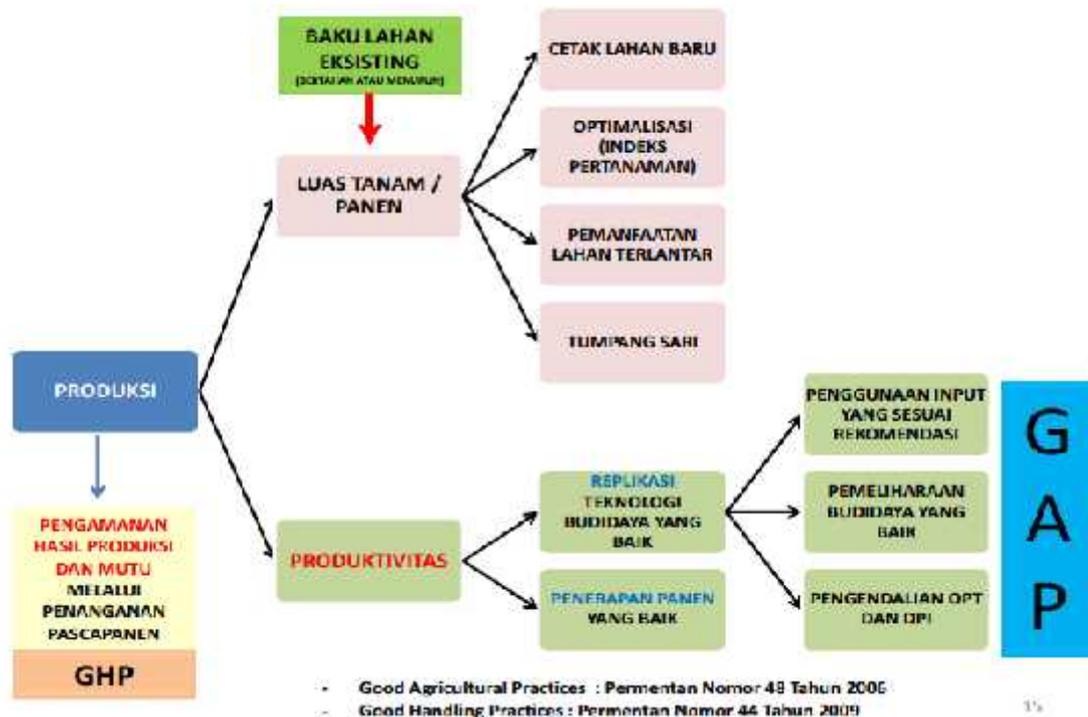
4.1.5. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Adapun sasaran yang ingin di capai berdasarkan Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh secara garis besar meliputi :

- a. Terciptakannya tata kelola organisasi yang efektif, transparan akuntabel, dan bersih dalam proses percepatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik.
- b. Terpenuhinya infrastruktur dasar pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Terlaksananya kegiatan penyediaan data dan informasi, penyusunan program dan tersedianya pelaporan/evaluasi hasil pelaksanaan Program.
- d. Terwujudnya kawasan sentra agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- e. Tersedianya teknologi pertanian dan perkebunan terbaru dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- f. Meningkatnya sumber daya manusia pertanian dan perkebunan dalam rangka inovasi dan alih teknologi pertanian perkebunan di 23 kab/kota.

4.2. Strategi dan kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan dilakukan secara bertahap per tahun untuk 5 selama (lima) tahun.



Gambar 4.1. Strategi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

4.2.1. Strategi.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Peningkatan Kompetensi SDM dan efektifitas pengelolaan SDA sesuai dengan daya dukungnya.
- b. Peningkatan infrastruktur dasar pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai persyaratan konsep pengembangan kawasan.
- c. Peningkatan Sistem Informasi Pertanian dan Perkebunan yang mendukung daya saing produk unggulan.
- d. Peningkatan Penerapan Inovasi dan Teknologi Budidaya Terbaharu di bidang Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berbasis spesifik lokasi.
- e. Penguatan Kelembagaan Petani dan Pekebun yang mandiri dan berdaya saing.
- f. Pengurangan ketergantungan petani dan pekebun terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah.
- g. Penguatan kemitraan agribisnis pada kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- h. Mendorong penerbitan Qanun (Peraturan Daerah) yang berpihak kepada Pelaku Usaha Pertanian dan Perkebunan.



- i. Peningkatan peran fasislitator membangun daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

4.2.2. Kebijakan.

Kebijakan untuk melaksanakan **Visi** dan **Misi** dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sampai tahun 2018 masing mengembangkan lima program utama, selanjutnya untuk periode 4 (empat) tahun mendatang akan disederhanakan menjadi 4 (empat) program dengan program utama yaitu : 1) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 2) program peningkatan kesejahteraan petani; 3) program perencanaan pembangunan ekonomi; dan 4) program pengembangan penyuluhan pertanian. Berikut uraian program dan kegiatan unggulan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

- a. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen perkantoran, dukungan administratif, pengawasan fungsional dan sumberdaya manusia.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 4 Program SKPA, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- b. Meningkatkan peran sektor pertanian dan perkebunan dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 1 Program Spesifik dan 6 Kegiatan SKPA, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

- Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Perencanaan Pembangunan Perkebunan;
 3. Monitorng dan evaluasi pembangunan pertanian TPH;
 4. Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH;
 5. Monitorng dan evaluasi pembangunan perkebunan; dan
 6. Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan.

- c. Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pekebun dengan menumbuh kembangkan kawasan sentra agribisnis dan daerah potensial melalui peningkatan sumberdaya manusia pertanian, pelatihan petani pelaku agribisnis dan



penanganan pasca panen serta pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 1 Program Spesifik dan 11 Kegiatan SKPA, yaitu :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

- Kegiatan :
1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
 2. Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
 3. Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A);
 4. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida;
 5. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah;
 6. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar;
 7. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
 8. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;
 9. Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah;
 10. Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
 11. Promosi dan pemasaran hasil hortikultura.

- d. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pekebun dengan menumbuh kembangkan kawasan sentra agribisnis dan daerah potensial serta tersedianya benih unggul bermutu melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan sarana dan prasarana, optimasi lahan, pengembangan kawasan dan sentra, pengadaan peralatan mesin pertanian, pengendalian OPT, pengembangan usaha perbenihan dan penyediaan benih/bibit pertanian dan perkebunan .

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 1 Program Spesifik dan 61 Kegiatan SKPA, yaitu :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan.

- Kegiatan :
1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
 2. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan;
 3. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;
 4. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan;



5. Operasional brigade petugas hama/penyakit dan cadangan pestisida untuk hama/penyakit tanaman perkebunan;
6. Pembinaan peremajaan karet dan kelapa rakyat;
7. Pembangunan kebun kelapa sawit;
8. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan;
9. Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat;
10. Pembangunan Kebun Karet Rakyat;
11. Perkebunan Kebun Kakao Rakyat;
12. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi;
13. Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat;
14. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar;
15. Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani;
16. Kajian Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan;
17. Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Peralatan Mesin Perkebunan;
18. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan;
19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan;
20. Penyelenggaraan BLUD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura;
22. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura;
23. Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar;
24. Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah;
25. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan;
26. Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi;
27. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan;
28. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura;
29. Optimasi Lahan Pertanian;
30. Perluasan Areal Pertanian;



31. Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen;
32. Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen;
33. Peningkatan Prasarana Pertanian;
34. Peningkatan Prasarana Perkebunan;
35. Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Peredaran Peralatan Mesin Pertanian/Perkebunan;
36. Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian;
37. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian;
38. Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian;
39. Pengembangan Kawasan Padi;
40. Pengembangan Kawasan Jagung;
41. Pengembangan Kawasan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
42. Pengembangan Kawasan Buah-buahan;
43. Pengembangan Sentra Buah-buahan;
44. Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran;
45. Pengembangan Sentra Sayuran-sayuran;
46. Pengembangan Sentra Biofarmaka dan Florikultura;
47. Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis;
48. Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul;
49. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura;
50. Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan;
51. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan;
52. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura;
53. Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan;
54. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat;
55. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
56. Perlindungan Tanaman Perkebunan;
57. Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan;
58. Perlindungan Tanaman Pangan;
59. Perlindungan Tanaman Hortikultura;



60. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan;
dan
 61. Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren.
- e. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan diarahkan terhadap fasilitasi berkembangnya usaha untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan daya saing tinggi baik di pasar domestik maupun luarnegeri, sehingga secara bertahap adanya peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 1 Program Spesifik dan 1 Kegiatan SKPA, yaitu :
1. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan.
Kegiatan : 1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah.
- f. Peningkatan Inovasi Teknologi Mekanisasi Pertanian melalui Alih Teknologi alat mesin pertanian dalam rangka penerapan efisiensi penggunaan alat bantu pertanian melalui modernisasi pertanian dengan penerapan alat mesin pertanian dalam sektor produksi sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan. Kebijakan tersebut diupayakan melalui 1 Program Spesifik dan 3 Kegiatan SKPA, yaitu :
1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan : 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
2. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; dan
3. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- g. Peningkatan SDM selain berkaitan dengan peningkatan produktifitas petani juga diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka melalui organisasi petani mandiri. Peran aktif pemerintah dalam peningkatan SDM petani antara lain melalui reorientasi sistem penyediaan layanan dan pendanaan sistem informasi pertanian. Revitalisasi kinerja kelembagaan dan penyuluh pertanian akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan SDM pertanian. Selain itu pemberian ruang yang cukup untuk sektor swasta melalui privatisasi penyuluhan juga akan mendorong terciptanya penyediaan



layanan informasi pertanian yang lebih kompetitif, efisien, dan efektif. Peningkatan SDM petani dan pertanian sangat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan *community empowerment*. Dalam pengertian luas pemberdayaan merupakan proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan.

Kebijakan tersebut diupayakan melalui 1 Program Spesifik dan 10 Kegiatan SKPA, yaitu :

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

- Kegiatan :
1. Pendidikan bagi Penyuluh pertanian;
 2. Supervisi Penyuluhan Pertanian;
 3. Upgrading Penyuluh Pertanian;
 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian;
 5. Rapat-rapat Koordinasi Penyuluh;
 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 7. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 8. IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian;
 9. Pendidikan Kejuruan Pertanian; dan
 10. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

h. Peningkatan mutu hasil produksi perkebunan rakyat melalui penyediaan dan pemanfaatan peralatan teknologi pengolahan hasil perkebunan rakyat dilakukan dengan program peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan



4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Periode 2017 - 2022.

Pada fase ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh maka kondisi yang seharusnya telah mencapai pada tahap kemandirian. Pada Fase ini diharapkan petani sudah sampai pada tahap mandiri mengembangkan pertanian dan perkebunan berbasis agribisnis. Tujuan dan sasaran adalah tahap untuk perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terutama pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPA selama 5 (lima) tahun.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program untuk lima tahun kedepan (Tahun 2018 – 2022) disesuaikan dengan prioritas program yang tertuang dalam prioritas Pemerintah Aceh pada RPJPA dan RRJMA. Program SKPA pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti yang disajikan pada Tabel 5.1 merupakan bagian program prioritas RPJM Aceh dan Pemerintah Aceh periode 2017-2022 yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPA (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisikan *outcome* program. Sesuai dengan amanah RPJM Aceh maka indikator kinerja utama yang dibebankan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama lima tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Indikator Keluaran Program Prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2018 – 2022.

No.	Angka Produksi	Kondisi Kinerja Awal Periode 2017	Target Capaian Setiap Tahun (ton)					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMA
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Padi	2.600.000	2.539.311	2.625.047	2.713.675	2.805.293	2.900.000	2.900.000
2	Jagung	345.640	363.033	383.059	404.188	426.400	450.000	450.000
3	Kedelai	39.930	40.953	41.930	42.929	43.952	44.975	44.975
4	Bawang Merah	7.003	7.414	7.785	8.172	8.583	9.012	9.012
5	Cabai Merah	47.346	50.108	52.613	55.244	58.006	60.906	60.906
6	Kelapa Sawit	457.898	515.416	554.036	577.828	635.346	693.626	693.626
7	Kelapa Dalam	62.200	62.700	63.500	64.000	64.500	65.000	65.000
8	Kopi	65.044	65.120	65.200	65.300	65.400	65.500	65.500
9	Kakao	42.800	43.500	45.000	46.000	46.200	46.800	46.800

Sumber : RPJMA Tahun 2017 – 2018.

Jadi perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diawali dengan menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah selama periode 5 (lima) tahun mendatang, serta menyusun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

5.1. Program dan Kegiatan Serta Indikator Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan program SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2018-2022 yang mewadahnya. Selanjutnya, untuk mencerminkan program kegiatan menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Aceh secara makro. Adapun rincian program dan kegiatan serta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

A. Program Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator Kinerja Program :

Terlayannya proses pelayanan publik dengan cepat dan tepat melalui peningkatan penyediaan jasa administrasi perkantoran.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- 5) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 7) Penyediaan alat tulis kantor.
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penyediaan makanan dan minuman.
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 14) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator Kinerja Program :

Terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dinas dalam mempercepat proses pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung kantor.
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 3) Pengadaan meubeler.
- 4) Pengadaan komputer
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler.
- 8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Indikator Kinerja Program :

Terlaksananya upaya peningkatan disiplin aparatur dinas dalam mempercepat proses pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
- 2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
- 3) Pengadaan pakaian KORPRI.
- 4) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya kualitas SDM/personel/aparatur dinas dalam menciptakan pemerintahan yang baik guna peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 3) Bimbingan teknis analisa jabatan.
- 4) Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja.

B. Program Spesifik SKPA

Program spesifik SKPA ditujukan untuk memenuhi capaian indikator sasaran dari tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh SKPA. Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam mewujudkan misi Pemerintah Aceh selama kurun waktu lima tahun telah menetapkan indikator kinerja melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas prioritas pertanian dan perkebunan yaitu komoditi tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai dan ubikayu, hortikultura yaitu cabe merah, bawang merah, kentang, pisang dan aneka buah lainnya. Untuk Perkebunan meliputi, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kelapa dalam, pala, lada, nilam, cengkeh dan tembakau.

Tahun 2018 merupakan awal tahun RPJMA masa pemerintahan Irwandi – Nova (2018 – 2022) dan pola penyusunan program dan kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun 2017. Namun untuk Tahun 2019 – 2022 terjadi pergeseran/perubahan nomenkelatur kegiatan menjadi lebih fokus, terarah dan terstruktur sesuai tugas dan fungsi struktural SKPA serta memenuhi kaedah sasaran yang ingin dicapai dalam misi Pemerintah Aceh dan RPJMA 2018-2022.

Adapun Program Kegiatan Spesifik SKPA yang dirancang dalam mewujudkan capaian sasaran indikator yang telah ditetapkan antara lain adalah :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani.

Indikator Kinerja Program :

Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A);

- 4) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida;
- 5) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah;
- 6) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar;
- 7) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- 8) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;
- 9) Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah;
- 10) Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
- 11) Promosi dan pemasaran hasil hortikultura.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya sinkronisasi rancangan rencana program dan kegiatan; pengendalian, monitoring, evaluasi serta penyediaan data statistik pertanian perkebunan dan perkembangan informasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan
- 2) Perencanaan pembangunan perkebunan
- 3) Monitorng dan evaluai pembangunan pertanian TPH;
- 4) Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH;
- 5) Monitorng dan evaluai pembangunan perkebunan; dan
- 6) Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan.

3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya ketersediaan keanekaragaman bahan pangan dan pemenuhan akan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
- 2) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
- 3) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan.
- 4) Perluasan Areal Pertanian.

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura kawasan sentra agribisnis tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna.
- 2) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.
- 3) Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan produktivitas Pertanian dan Perkebunan melalui Pengembangan Kawasan Tanaman Padi, Palawija, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
- 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan;
- 3) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan;
- 5) Operasional brigade petugas hama/penyakit dan cadangan pestisida untuk hama/penyakit tanaman perkebunan;
- 6) Pembinaan peremajaan karet dan kelapa rakyat;
- 7) Pembangunan kebun kelapa sawit;
- 8) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan;
- 9) Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat;
- 10) Pembangunan Kebun Karet Rakyat;
- 11) Perkebunan Kebun Kakao Rakyat;
- 12) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi;
- 13) Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat;
- 14) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar;



- 15) Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani;
- 16) Kajian Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan;
- 17) Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Peralatan Mesin Perkebunan;
- 18) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan;
- 19) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan;
- 20) Penyelenggaraan BLUD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 21) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura;
- 22) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura;
- 23) Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- 24) Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah;
- 25) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Perkebunan;
- 26) Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi;
- 27) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan;
- 28) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura;
- 29) Optimasi Lahan Pertanian;
- 30) Perluasan Areal Pertanian;
- 31) Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen;
- 32) Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen;
- 33) Peningkatan Prasarana Pertanian;
- 34) Peningkatan Prasarana Perkebunan;
- 35) Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Peredaran Peralatan Mesin Pertanian/Perkebunan;
- 36) Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian;
- 37) Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian;
- 38) Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian;
- 39) Pengembangan Kawasan Padi;
- 40) Pengembangan Kawasan Jagung;
- 41) Pengembangan Kawasan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
- 42) Pengembangan Kawasan Buah-buahan;
- 43) Pengembangan Sentra Buah-buahan;
- 44) Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran;

- 45) Pengembangan Sentra Sayuran-sayuran;
- 46) Pengembangan Sentra Biofarmaka dan Florikultura;
- 47) Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Strategis;
- 48) Pengembangan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggul;
- 49) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 50) Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan Perkebunan;
- 51) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan;
- 52) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 53) Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan Perkebunan;
- 54) Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat;
- 55) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
- 56) Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- 57) Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan;
- 58) Perlindungan Tanaman Pangan;
- 59) Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- 60) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan; dan
- 61) Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren.

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan.

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui penyediaan sumberdaya teknologi pengolahan hasil perkebunan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan Peningkatan sumberdaya teknologi pengolahan hasil perkebunan.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
- 2) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; dan
- 3) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian Dan Perkebunan

Indikator Kinerja Program :

Terlaksananya Promosi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah melalui partisipasi pameran promosi produk unggulan daerah melalui berbagai event pameran dan promosi produk unggulan, baik skala daerah, nasional dan internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut

- 1) Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah.

8. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

Indikator Kinerja Program :

Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian dan perkebunan melalui akreditasi petugas penyuluhan pertanian, upgrading penyuluh pertanian, pelatihan dan pendidikan bagi penyuluh dan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan serta pemanfaatan media penyuluhan melalui penerapan demonstrasi plot oleh penyuluh dan petani.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut

- 1) Pendidikan bagi Penyuluh pertanian;
- 2) Supervisi Penyuluhan Pertanian;
- 3) Upgrading Penyuluh Pertanian;
- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian;
- 5) Rapat-rapat Koordinasi Penyuluh;
- 6) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
- 7) Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 8) IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programme) Bidang Pertanian;
- 9) Pendidikan Kejuruan Pertanian; dan
- 10) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.



9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya mutu hasil produksi perkebunan rakyat melalui penyediaan dan pemanfaatan peralatan teknologi pengolahan hasil perkebunan rakyat.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Tabel 5.2. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Bidang dan UPTD pada Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2017 - 2022.

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)	
				1	2	3	4	5		
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)			
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	313.639	488.834	549.913	441.518	443.431	486.513	2.410.210		
	NON PROGRAM	73.261	76.582	81.614	89.775	98.753	108.628	455.353		
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Indikator : Terlaksananya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai	73.261	76.582	81.614	89.775	98.753	108.628	455.353		
		718 Org 100%	718 Org 100%	718 Org 100%	718 Org 100%	718 Org 100%	718 Org 100%	718 Org 100%	718 Org 100%	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	23.381	24.290	18.526	21.677	21.267	22.597	108.357		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator : Terlaksananya Penyampaian Pelayanan Jasa Surat Dalam Percepatan Proses Administrasi	67	74	60	75	65	75	349		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Indikator : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan	2.285	2.513	2.576	3.500	3.210	3.394	15.193		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator : Terlaksananya peningkatan perlengkapan dan peralatan kantor	295	300	308	700	718	900	2.925		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator : Terlaksananya kenyamanan kinerja aparaturnya dalam rangka proses pelayanan public	3.274	3.600	3.690	5.000	5.000	5.125	22.415		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan		1.300	1.333	1.700	1.500	1.538	7.370		
			12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator : Terlaksananya peningkatan kebutuhan ATK pegawai	485	419	429	600	615	630	2.694		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.7	Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Indikator : Peningkatan pengadaan barang cetakan	512	440	451	552	566	580	2.589		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator : tersedianya kebutuhan alat penerangan gedung kantor	125	138	141	400	300	350	1.329		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.9	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Indikator : tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kerja perkantoran	1.374	460					460		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%					12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.10	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Indikator : Meningkatnya kinerja sumberdaya aparaturnya pemerintah	127	140	144	200	200	205	889		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Indikator : terwujudnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik dan makan siswa	5.340	6.164	600	700	718	800	8.982		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.12	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Indikator : terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	1.339	995	1.000	1.050	1.076	1.200	5.321		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	
1.13	Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Indikator : memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan percepatan administrasi perkantoran	8.158	7.747	7.795	7.200	7.300	7.800	37.842		
		12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)	
		Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)						
		1	2	3	4	5		
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.143	17.588	3.232	10.876	10.480	13.004	55.180
2.1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Indikator : Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebagai fasilitas kinerja aparatur didalam percepatan pelayanan publik	4.327	4.378	987	526	1.000	2.504	9.395
		12 Pkt 100%	10 Pkt 32%	6 Pkt 20%	5 Pkt 16%	5 Pkt 16%	5 Pkt 16%	31 Pkt 100%
2.2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Indikator: tersedianya perlengkapan gedung kantor	3.595	2.799	885	3.600	2.680	2.500	12.464
		16 Keg 100%	12 Keg 35%	4 Keg 12%	5 Keg 15%	6 Keg 18%	7 Keg 20%	34 Keg 100%
2.3	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung perkantoran Indikator : Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	1.209		560	2.600	2.200	3.000	8.360
		16 Unit 100%		16 Unit 100%	16 Unit 100%	16 Unit 100%	16 Unit 100%	16 Unit 100%
2.4	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Indikator : Terpeliharanya gedung kantor sebagai aset daerah untuk menunjang kinerja aparatur dalam percepatan pelayanan masyarakat	4.012	10.411	800	4.150	4.600	5.000	24.961
		8 Pkt 100%	22 Pkt 48%	6 Pkt 13%	6 Pkt 13%	6 Pkt 13%	6 Pkt 13%	46 Pkt 100%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	1.383	630	1.542	0	3.555
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Indikator : Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas. 4 UPTD dan 3 sekolah kedinasan			1.383	630	1.542		3.555
				2.766 Stl 100%	2.766 Stl 100%	2.766 Stl 100%		2.766 Stl 100%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	445	-	264	500	500	500	1.764
4.1	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator : Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	369		144	239	239	239	861
		6 Keg 100%		6 Keg 100%	6 Keg 100%	6 Keg 100%	6 Keg 100%	24 Keg 100%
4.2	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Indikator : Tesosialisasinya ketentuan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	76		120	261	261	261	903
		6 Keg 100%		6 Keg 100%	6 Keg 100%	6 Keg 100%	6 Keg 100%	24 Keg 100%
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.431	3.945	22.944	31.993	36.748	42.198	137.828
5.1	Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Indikator : Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	1.431	3.945	4.000	1.440	1.800	2.250	13.435
		12 Kls 100%	32 Kls 23%	24 Kls 17%	26 Kls 18%	28 Kls 20%	32 Kls 23%	142 Kls 100%
5.2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna Indikator : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna			594	1.013	1.266	1.582	4.454
				10 Klp 100%	10 Klp 100%	10 Klp 100%	10 Klp 100%	40 Klp 100%
5.3	Kegiatan Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A) Indikator : Terlaksananya Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A)			2.130	2.769	3.101	3.473	11.474
				20 Kab 100%	20 Kab 100%	20 Kab 100%	20 Kab 100%	20 Kab 100%
5.4	Kegiatan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida Indikator : Terlaksananya Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida			700	840	941	1.035	3.516
				12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%	12 Bln 100%
5.5	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah			3.320	4.980	5.578	6.414	20.292
				4 Unit 100%	5 Unit 100%	5 Unit 100%	5 Unit 100%	19 Unit 100%
5.6	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar			6.250	8.125	9.100	10.237	33.712
				24 Unit 100%	24 Unit 100%	24 Unit 100%	24 Unit 100%	96 Unit 100%
5.7	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.			2.450	3.772	4.484	5.157	15.863
				4 Keg 100%	4 Keg 100%	4 Keg 100%	4 Keg 100%	16 Keg 100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)	
				1	2	3	4	5		
				Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5.8	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura				1.000 8 Kawasan 100%	1.850 8 Kawasan 100%	2.072 8 Kawasan 100%	2.383 8 Kawasan 100%	7.305 8 Kawasan 100%	
5.9	Kegiatan Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah Indikator : Terlaksananya Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah			1.300	8 Keg 100%	4.800 8 Keg 100%	5.520 8 Keg 100%	6.348 8 Keg 100%	17.968 32 Keg 100%	
5.10	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan Indikator : Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan			600	4 Keg 100%	1.295 5 Keg 100%	1.554 5 Keg 100%	1.787 5 Keg 100%	5.236 19 Keg 100%	
5.11	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura Indikator : Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura			600	5 Keg 100%	1.110 5 Keg 100%	1.332 5 Keg 100%	1.532 5 Keg 100%	4.574 20 Keg 100%	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	-	10.489						10.489	
6.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh Indikator : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh		10.489	1 Thn 100%					10.489 1 Thn 100%	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN	5.788	15.497						15.497	
7.1	Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi penyuluhan Indikator : Terlaksananya Rapat-rapat/Koordinasi penyuluhan	804 6 Keg 1 Thn 100%	693 5 Keg 1 Thn 100%						693 5 Keg 1 Thn 100%	
7.2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	4.984 25 Pkt 1 Thn 100%	14.804 274 Pkt 1 Thn 100%						14.804 274 Pkt 1 Thn 100%	
8	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	52.777	10.607						10.607	
8.1	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Indikator : Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	6.537 1 Thn 100%	1.568 1 Thn 100%						1.568 1 Thn 100%	
8.2	Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija Indikator : Terlaksananya Intensifikasi tanaman padi dan palawija	38.349 40000 Ha 100%	3.174 165 Ha 100%						3.174 165 Ha 100%	
8.3	Kegiatan Pengembangan perbenihan/perbibitan Indikator : Terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan	2.308 1 Thn 100%	3.202 12 Kmdt 100%						3.202 12 Kmdt 100%	
8.4	Kegiatan Perluasan areal pertanian Indikator : Terlaksananya perluasan areal pertanian	5.583 507 Ha 1 Thn 100%	2.663 3 Keg 1 Thn 100%						2.663 3 Keg 1 Thn 100%	
9	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	17.059	109.931						109.931	
9.1	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Indikator : Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan	9.319 35 Unt 1 Thn 100%	87.116 65 Unt 1 Thn 100%						87.116 65 Unt 1 Thn 100%	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)						
				Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)											
				1	2	3	4	5							
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)								
		3	4	5	6	7	8	9							
9.2	Kegiatan penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Indikator : Terlaksananya penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	2.535	215 Keg 1 Thn 100%	15.287	278 Keg 1 Thn 100%					15.287	278 Keg 1 Thn 100%				
9.3	Kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan operasional teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	5.205	12 Keg 1 Thn 100%	7.528	12 Keg 1 Thn 100%					7.528	12 Keg 1 Thn 100%				
10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN	108.202		199.450		381.300		261.930		248.192		266.809		1.357.681	
10.01	Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Indikator : Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	16.443	5 Keg 1 Thn 100%	86.100	12 Keg 1 Thn 100%									86.100	12 Keg 1 Thn 100%
10.02	Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	3.981	6 Keg 1 Thn 100%	22.850	14 Keg 1 Thn 100%									22.850	14 Keg 1 Thn 100%
10.03	Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	2.222	4 Keg 1 Thn 100%	3.400	4 Keg 1 Thn 100%									3.400	4 Keg 1 Thn 100%
10.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan Indikator : Terawasinya peredaran bibit unggul tanaman perkebunan			2.250	22 Kab 1 Thn 100%									2.250	22 Kab 1 Thn 100%
10.05	Kegiatan Brigade petugas hama/penyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan hama/penyakit tanaman perkebunan Indikator : Terlaksananya operasi pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan.			3.650	10 SL 1 Thn 100%									3.650	10 SL 1 Thn 100%
10.06	Kegiatan Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan	547	1 Keg 1 Thn 100%												
10.07	Kegiatan Pembangunan kebun kelapa sawit Indikator : Terlaksananya Pembangunan kebun kelapa sawit	5.445	261 Ha 1 Thn 100%	6.200	170 Ha 1 Thn 100%									6.200	170 Ha 1 Thn 100%
10.08	Kegiatan Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan	3.028	18 Kab 1 Thn 100%	6.000	18 Kab 1 Thn 100%									6.000	18 Kab 1 Thn 100%
10.09	Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Indikator: Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	14.625	1110 Ha 1 Thn 100%	32.400	3.402 Ha 1 Thn 100%									32.400	3.402 Ha 1 Thn 100%
10.10	Kegiatan Pembangunan Kebun Karet Rakyat Indikator: Terbangunan Kebun Karet Rakyat	1.316	90 Ha 1 Thn 100%	2.300	40 Ha 1 Thn 100%									2.300	40 Ha 1 Thn 100%
10.11	Kegiatan Pembangunan Kebun Kakao Rakyat Indikator: Terbangunan Kebun Kakao Rakyat	2.240	100 Ha 1 Thn 100%	5.300	320 Ha 1 Thn 100%									5.300	320 Ha 1 Thn 100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)	Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)	
			1	2	3	4	5		
			Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.12	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi Indikator: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi	38.268 22 Kab 1 Thn 100%	10.500 22 Kab 1 Thn 100%						10.500 22 Kab 1 Thn 100%
10.13	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat Indikator: Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	16.574 2270 Ha 1 Thn 100%	17.000 4.070 Ha 1 Thn 100%	12.000 4.020 Ha 1 Thn 100%	13.200 4.000 Ha 1 Thn 100%	12.540 4.000 Ha 1 Thn 100%	13.919 4.000 Ha 1 Thn 100%	68.659 20.090 Ha 5 Thn 100%	
10.14	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar Indikator: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar	620 22 Kab 1 Thn 100%	1.500 23 Kab 1 Thn 100%	1.350 23 Kab 1 Thn 100%	2.310 23 Kab 1 Thn 100%	2.264 23 Kab 1 Thn 100%	2.513 23 Kab 1 Thn 100%	9.937 23 Kab 5 Thn 100%	
10.15	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani Indikator: Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	900 1 Keg 1 Thn 100%			600 23 Kab 1 Thn 100%	540 23 Kab 1 Thn 100%	567 23 Kab 1 Thn 100%	1.707 23 Kab 3 Thn 100%	
10.16	Kegiatan Kajian Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan Indikator: Terlaksananya Kajian Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	594 5 Keg 1 Thn 100%			630 23 Kab 1 Thn 100%		650 23 Kab 1 Thn 100%	1.280 23 Kab 2 Thn 100%	
10.17	Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Peralatan Mesin perkebunan Indikator: Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Peralatan Mesin perkebunan	1.399 22 Kab 1 Thn 100%							
10.18	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan Indikator: Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan			1.250 3 Kmdt 1 Thn 100%	1.925 3 Kmdt 1 Thn 100%	1.829 3 Kmdt 1 Thn 100%	2.012 3 Kmdt 1 Thn 100%	7.015 3 Kmdt 4 Thn 100%	
10.19	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan Indikator: Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan			3.300 165 Ha 1 Thn 100%	3.630 175 Ha 1 Thn 100%	3.449 185 Ha 1 Thn 100%	3.793 200 Ha 1 Thn 100%	14.172 725 Ha 5 Thn 100%	
10.20	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator: Terlaksananya Penyelenggaraan BLUD produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			1.000 1 UPTD 1 Thn 100%	1.200 1 UPTD 1 Thn 100%	1.440 1 UPTD 1 Thn 100%	1.728 1 UPTD 1 Thn 100%	5.368 1 UPTD 4 Thn 100%	
10.21	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura Indikator: Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura			11.200 9 Pkt 1 Thn 100%	11.760 9 Pkt 1 Thn 100%	11.172 9 Pkt 1 Thn 100%	11.731 9 Pkt 1 Thn 100%	45.863 36 Pkt 4 Thn 100%	
10.22	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura Indikator: Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura			2.700 5 Kmdt 1 Thn 100%	2.970 5 Kmdt 1 Thn 100%	2.822 5 Kmdt 1 Thn 100%	3.104 5 Kmdt 1 Thn 100%	11.595 5 Kmdt 4 Thn 100%	
10.23	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar Indikator: Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar			25.200 5 Kmdt 1 Thn 100%	13.000 5 Kmdt 1 Thn 100%	12.350 5 Kmdt 1 Thn 100%	12.968 5 Kmdt 1 Thn 100%	63.518 5 Kmdt 4 Thn 100%	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)					Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)
							1	2	3	4	5	
							Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	
1	2	3					4					9
10.24	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah Indikator : Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah							2.200	2.420	2.299	2.414	9.333
								3 Kmdt 1 Thn 100%	3 Kmdt 1 Thn 100%	3 Kmdt 1 Thn 100%	3 Kmdt 1 Thn 100%	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.25	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan Indikator : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan							3.000	3.300	3.608	3.788	13.696
								4 Keg 1 Thn 100%	5 Keg 1 Thn 100%	5 Keg 1 Thn 100%	5 Keg 1 Thn 100%	5 Keg 4 Thn 100%
10.26	Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura							1.200	2.750	2.888	3.176	10.014
								690 Ha 1 Thn 100%	690 Ha 1 Thn 100%	700 Ha 1 Thn 100%	700 Ha 1 Thn 100%	2.780 Ha 4 Thn 100%
10.27	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan Indikator : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan							7.500	8.250	7.838	8.621	32.209
								650 Ha 1 Thn 100%	650 Ha 1 Thn 100%	650 Ha 1 Thn 100%	650 Ha 1 Thn 100%	2.600 Ha 4 Thn 100%
10.28	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura							3.800	4.180	3.971	4.170	16.121
								11 kmdt 1 Thn 100%	11 kmdt 1 Thn 100%	11 kmdt 1 Thn 100%	11 kmdt 1 Thn 100%	11 kmdt 4 Thn 100%
10.29	Kegiatan Optimalisasi lahan pertanian Indikator : Terlaksananya Optimalisasi lahan pertanian							6.000	7.200	7.560	7.938	28.698
								1.000 Ha 1 Thn 100%	1.000 Ha 1 Thn 100%	1.000 Ha 1 Thn 100%	1.000 Ha 1 Thn 100%	4.000 Ha 4 Thn 100%
10.30	Kegiatan Perluasan Areal Pertanian Indikator : Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian							15.000	15.750	14.175	14.884	59.809
								250 Ha 1 Thn 100%	250 Ha 1 Thn 100%	250 Ha 1 Thn 100%	250 Ha 1 Thn 100%	1.000 Ha 4 Thn 100%
10.31	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen Indikator : Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen							25.000	11.250	10.688	11.222	58.159
								60 Unit 1 Thn 100%	60 Unit 1 Thn 100%	60 Unit 1 Thn 100%	60 Unit 1 Thn 100%	240 Unit 4 Thn 100%
10.32	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen Indikator : Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen							23.000	9.000	8.100	8.505	48.605
								32 Unit 1 Thn 100%	33 Unit 1 Thn 100%	35 Unit 1 Thn 100%	35 Unit 1 Thn 100%	135 Unit 4 Thn 100%
10.33	Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian Indikator : Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian							50.000	7.500	7.125	7.838	72.463
								3 Keg 1 Thn 100%	3 Keg 1 Thn 100%	3 Keg 1 Thn 100%	3 Keg 1 Thn 100%	12 Keg 4 Thn 100%
10.34	Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan Indikator : Terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan							25.000	9.000	8.550	9.405	51.955
								2 Keg 1 Thn 100%	2 Keg 1 Thn 100%	2 Keg 1 Thn 100%	2 Keg 1 Thn 100%	8 Keg 4 Thn 100%
10.35	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan								650		650	1.300
									23 Kab 1 Thn 100%		23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 2 Thn 100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)				
				1	2	3	4	5					
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
10.36	Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian Indikator : Terlaksananya Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian			2.100	8 Keg 1 Thn 100%	2.310	8 Keg 1 Thn 100%	2.079	8 Keg 1 Thn 100%	2.183	8 Keg 1 Thn 100%	8.672	32 Keg 4 Thn 100%
10.37	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian Indikator : Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian			6.500	8 Keg 1 Thn 100%	7.150	8 Keg 1 Thn 100%	6.435	8 Keg 1 Thn 100%	6.757	8 Keg 1 Thn 100%	26.842	32 Keg 4 Thn 100%
10.38	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian Indikator : Terselenggaranya BLUD Mekanisasi Pertanian			1.000	1 Keg 1 Thn 100%	1.650	1 Keg 1 Thn 100%	1.980	1 Keg 1 Thn 100%	2.079	1 Keg 1 Thn 100%	6.709	4 Keg 4 Thn 100%
10.39	Kegiatan Pengembangan kawasan padi Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan padi			40.000	85.000 Ha 1 Thn 22%	26.000	60.000 Ha 1 Thn 24%	25.480	65.000 Ha 1 Thn 26%	28.283	70.000 Ha 1 Thn 28%	119.763	280.000 Ha 4 Thn 100%
10.40	Kegiatan Pengembangan kawasan jagung Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung			12.000	5.500 Ha 1 Thn 17%	4.950	7.500 Ha 1 Thn 24%	4.703	9.000 Ha 1 Thn 29%	5.568	10.000 Ha 1 Thn 32%	27.220	31.500 Ha 4 Thn 100%
10.41	Kegiatan Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi			2.000	500 Ha 1 Thn 100%	2.200	1500 Ha 1 Thn 100%	2.090	2000 Ha 1 Thn 100%	2.299	3500 Ha 1 Thn 100%	8.589	7500 Ha 4 Thn 100%
10.42	Kegiatan Pengembangan kawasan buah-buahan Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan buah-buahan			3.500	2 Kmdt 1 Thn 100%	3.850	2 Kmdt 1 Thn 100%	3.658	2 Kmdt 1 Thn 100%	3.840	2 Kmdt 1 Thn 100%	14.848	2 Kmdt 4 Thn 100%
10.43	Kegiatan Pengembangan sentra buah-buahan Indikator : Terlaksananya Pengembangan sentra buah-buahan			6.500	6 Kmdt 1 Thn 100%	7.150	6 Kmdt 1 Thn 100%	6.793	6 Kmdt 1 Thn 100%	7.132	6 Kmdt 1 Thn 100%	27.575	6 Kmdt 4 Thn 100%
10.44	Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman sayuran Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran			9.000	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.900	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.405	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.875	3 Kmdt 1 Thn 100%	38.180	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.45	Kegiatan Pengembangan sentra sayur-sayuran Indikator : Terlaksananya Pengembangan sentra sayur-sayuran			3.000	3 Kmdt 1 Thn 100%	3.850	3 Kmdt 1 Thn 100%	3.273	3 Kmdt 1 Thn 100%	3.436	3 Kmdt 1 Thn 100%	13.559	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.46	Kegiatan Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura Indikator : Terlaksananya Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura			1.000	2 Kmdt 1 Thn 100%	1.320	2 Kmdt 1 Thn 100%	924	2 Kmdt 1 Thn 100%	785	2 Kmdt 1 Thn 100%	4.029	2 Kmdt 4 Thn 100%
10.47	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis			38.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	15.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	14.250	5 Kmdt 1 Thn 100%	14.963	5 Kmdt 1 Thn 100%	82.213	5 Kmdt 4 Thn 100%
10.48	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul			7.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	13.650	5 Kmdt 1 Thn 100%	12.968	5 Kmdt 1 Thn 100%	13.616	5 Kmdt 1 Thn 100%	47.233	5 Kmdt 4 Thn 100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)	Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)					
			1	2	3	4	5						
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
10.49	Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura			3.000	22 Kab 1 Thn 100%	3.300	22 Kab 1 Thn 100%	3.135	22 Kab 1 Thn 100%	3.292	22 Kab 1 Thn 100%	12.727	22 Kab 4 Thn 100%
10.50	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan Indikator : Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan			3.500	22 Kab 1 Thn 24%	3.850	22 Kab 1 Thn 24%	3.658	22 Kab 1 Thn 18%	3.840	22 Kab 1 Thn 29%	14.848	22 Kab 4 Thn 100%
10.51	Kegiatan Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan			1.400	4 Kmdt 1 Thn 100%	1.870	4 Kmdt 1 Thn 100%	1.777	4 Kmdt 1 Thn 100%	1.865	4 Kmdt 1 Thn 100%	6.912	4 Kmdt 4 Thn 100%
10.52	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura			5.500	9 Keg 1 Thn 100%	2.750	10 Keg 1 Thn 100%	2.613	10 Keg 1 Thn 100%	2.743	10 Keg 1 Thn 100%	13.606	39 Keg 4 Thn 100%
10.53	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan perkebunan Indikator : Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan perkebunan			10.000	18 Kab 1 Thn 24%	2.200	18 Kab 1 Thn 24%	2.090	18 Kab 1 Thn 18%	2.195	18 Kab 1 Thn 29%	16.485	18 Kab 4 Thn 100%
10.54	Kegiatan Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat Indikator : Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat			4.200	1.750 Ha 1 Thn 100%	5.500	2.000 Ha 1 Thn 100%	5.225	2.000 Ha 1 Thn 100%	5.486	2.000 Ha 1 Thn 100%	20.411	7.750 Ha 4 Thn 100%
10.55	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan			1.200	4 Keg 1 Thn 100%	1.650	4 Keg 1 Thn 100%	1.568	4 Keg 1 Thn 100%	1.646	4 Keg 1 Thn 100%	6.063	16 Keg 4 Thn 100%
10.56	Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan Indikator : Terlaksananya Perlindungan Tanaman Perkebunan			600	4 Kab 1 Thn 100%	770	4 Kab 1 Thn 100%	732	4 Kab 1 Thn 100%	768	4 Kab 1 Thn 100%	2.870	16 Kab 4 Thn 100%
10.57	Kegiatan Gerakan pengendalian OPT Perkebunan Indikator : Terlaksananya Gerakan pengendalian OPT Perkebunan			600	2 Kmdt 1 Thn 100%	770	4 Kmdt 1 Thn 100%	732	2 Kmdt 1 Thn 100%	768	4 Kmdt 1 Thn 100%	2.870	12 Kmdt 4 Thn 100%
10.58	Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Indikator : Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan					3.190	18 Kab 1 Thn 100%	3.031	18 Kab 1 Thn 100%	3.182	18 Kab 1 Thn 100%	9.403	18 Kab 3 Thn 100%
10.59	Kegiatan Perlindungan Tanaman Hortikultura Indikator : Terlaksananya Perlindungan Tanaman Hortikultura					500	7 Kab 1 Thn 100%	475	7 Kab 1 Thn 100%	499	7 Kab 1 Thn 100%	1.474	7 Kab 3 Thn 100%
10.60	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan					1.375	4 Kab 1 Thn 100%	1.306	4 Kab 1 Thn 100%	1.372	4 Kab 1 Thn 100%	4.053	12 Kab 3 Thn 100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)						Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)		
				1	2	3	4	5				
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
10.61	Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren				2.750	2.613	2.743	8.106	4 Kab 1 Thn 100%	4 Kab 1 Thn 100%	4 Kab 1 Thn 100%	12 Kab 3 Thn 100%
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	605	1.306					1.306				
	11.1 Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Indikator : Terlaksananya Promosi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah	605	1.306					1.306	1 Thn 100%			4 Keg 100%
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	8.073	8.494	7.750	5.500	5.300	5.400	32.444				
	12.1 Kegiatan Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Indikator : Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	7.201	6.900	2.200	1.900	1.840	1.850	14.690	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%
	12.2 Kegiatan Perencanaan pembangunan perkebunan Indikator : Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	872	1.594	1.500	1.100	1.085	1.050	6.329	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%
	12.3 Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH Indikator : Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH			1.000	700	665	700	3.065	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%
	12.4 Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH Indikator : Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH			1.250	800	760	800	3.610	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%
	12.5 Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan Indikator : Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan			500	400	380	400	1.680	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%
	12.6 Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan Indikator : Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan			1.300	600	570	600	3.070	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%	23 Kab 100%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN			32.900	18.637	20.650	27.377	99.564				
	13.1 Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian Indikator : Meningkatkan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan			2.200	200	210	300	2.910	6 Keg 1 Thn 25%	6 Keg 1 Thn 25%	6 Keg 1 Thn 25%	24 Keg 4 Thn 100%
	13.2 Kegiatan Supervisi penyuluh pertanian Indikator : Terlaksananya Supervisi penyuluh pertanian			500	200	210	300	1.210	23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 4 Thn 100%
	13.3 Kegiatan Upgrading Penyuluh Pertanian Indikator : Meningkatkan Kuantitas dan Rasio Penyuluh Bersertifikat			500	1.500	1.650	2.145	5.795	% 750 Org 25%	% 750 Org 25%	% 750 Org 25%	% 750 Org 100%
	13.4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian Indikator : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian			600	500	600	780	2.480	3 Keg 1 Thn 100%	3 Keg 1 Thn 100%	3 Keg 1 Thn 100%	12 Keg 4 Thn 100%
	13.5 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Penyuluh Indikator : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Penyuluh			1.000	200	220	300	1.720	23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 1 Thn 100%	23 Kab 4 Thn 100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)				
				1	2	3	4	5					
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
13.6	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan			8.000	25 BPP 1 Thn 25%	3.500	25 BPP 1 Thn 25%	4.044	25 BPP 1 Thn 25%	5.493	25 BPP 1 Thn 25%	21.037	100 BPP 4 Thn 100%
13.7	Kegiatan Penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) Indikator : Tersusunnya rencana definitif kelompok kebutuhan pupuk kelompok			800	1 Keg 1 Thn 100%	442	1 Keg 1 Thn 100%	486	1 Keg 1 Thn 100%	632	1 Keg 1 Thn 100%	2.360	4 Keg 4 Thn 100%
13.8	Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian Indikator : Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and			1.300	4 Kab 1 Thn 100%	1.495	4 Kab 1 Thn 100%	1.570	4 Kab 1 Thn 100%	1.884	4 Kab 1 Thn 100%	6.248	4 Kab 4 Thn 100%
13.9	Kegiatan Pendidikan kejuruan Pertanian Indikator : Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian			8.000	3 Unit 1 Thn 100%	7.000	3 Unit 1 Thn 100%	7.700	3 Unit 1 Thn 100%	10.395	3 Unit 1 Thn 100%	33.095	3 Unit 4 Thn 100%
13.10	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Indikator : Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi			10.000	23 Kab 1 Thn 100%	3.600	23 Kab 1 Thn 100%	3.960	23 Kab 1 Thn 100%	5.148	23 Kab 1 Thn 100%	22.708	23 Kab 4 Thn 100%
14	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	9.474	8.655									8.655	
14.01	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Indikator : Tersedianya peralatan pengolahan hasil perkebunan	9.474	11 Unt 1 Thn 100%	8.655	916 Unt 1 Thn 100%							8.655	916 Unt 1 Thn 100%
15	PROGRAM PELAYANAN PERTANIAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)		2.000									2.000	
15.01	Kegiatan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian pada UPTD Mekanisasi Pertanian Indikator : Terselenggaranya Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD		1.000		7 Unit 1 Thn 100%							1.000	7 Unit 1 Thn 100%
15.02	Kegiatan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Indikator : Terselenggaranya Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai		800		465 Ton 1 Thn 100%							800	465 Ton 1 Thn 100%
15.03	Kegiatan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian pada UPTD Balai Benih Hortikultura Indikator : Terselenggaranya Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai		200		21 Kmdt 1 Thn 100%							200	21 Kmdt 1 Thn 100%

Indikator makro tidak hanya merupakan kinerja dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melainkan juga merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Swasta. Rincian lengkap terhadap rencana indikator kinerja *outcome* untuk setiap kegiatan dari masing-masing program beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPA pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 5.1 diatas.

5.2. Kelompok Sasaran dan Prioritas Program

Kelompok sasaran program pertanian diutamakan kelompok rentan yang memerlukan pembinaan dan pendampingan mulai dari kegiatan budidaya, penangan hasil sampai pemasaran produk pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Penentuan kelompok sasaran ini mengacu pada strategi dan kebijakan pertanian pada “Nawacita” pembangunan di Indonesia Periode 2014 – 2019. Pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortukultura (*Food Crops and Horticulture*) yang tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bersih (*Green Job*) melalui pengembangan kawasan pertanian nasional, dan kawasan daerah berbasis agribisnis, agroindustri dan agrowisata. Strategi pembangunan pertanian diprioritaskan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas dan petani/ masyarakat, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani serta pemenuhan akan berbagai bahan pangan dan penguatan ekonomi lokal dan daerah. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam menjalankan program/kegiatan ditujukan kepada kelompok sasaran dalam program bidang pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut :

1. Kaum dhuafa.
2. Masyarakat korban konflik.
3. Masyarakat yang terkena musibah bencana alam.
4. Masyarakat miskin yang tidak punya lahan garapan
5. Masyarakat putus sekolah, pengangguran dan pencari kerja.

Program prioritas dalam pembangunan pertanian terdiri dari :

1. Peningkatan SDM dan Pengelolaan SDA sesuai dengan daya dukungannya.
2. Peningkatan Penerapan Inovasi & Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi.
3. Peningkatan Penguatan Kelembagaan Petani dan Pekebun.
4. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian.
5. Meningkatkan Kerjasama antar sektor, antar Daerah dan Stakeholder terkait.

6. Mengembang Tumbuhkan kawasan nasional dan kawasan daerah untuk pangan pokok dan mengembangkan agribisnis, agroindustri dan agrowisata.

5.3. Kebutuhan Anggaran

Untuk mendukung program prioritas pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Aceh, telah dirancang rencana pencapaian tujuan dan sasaran pada SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Target capaian tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan baik yang bersifat reguler maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun skenario kebutuhan dana kegiatan pada masing-masing program/kegiatan.

Skenario kebutuhan akan dana kegiatan pada masing-masing program selama 5 (lima) tahun 2018 -2022 sebesar Rp. 3.306.420.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.455.353.000.000,-
2. Belanja Rutin Oprasional Kantor (BORK) yang tergabung dalam 4 (empat) Program yaitu : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, termasuk didalamnya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.186.776.000.000,-
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 117.915.000.000,-
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan, alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 2.221.313.000.000.,-
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan, alokasi anggaran yang dibutuhkan Rp. 166.572.000.000,-

Bila kita melihat upaya pencapaian dana untuk masing-masing bidang pada lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yang dialokasikan pada setiap tahunnya

dapat dilihat pada Tabel 5.3 di bawah ini. Dengan adanya rincian kebutuhan anggaran berdasarkan Program pada lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini, diharapkan dapat dialokasikan anggaran secara optimal sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2018 -2022 dapat terpenuhi.

Tabel 5.3. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2018 - 2022.

No.	Program dan Kegiatan	Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)
		Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.290	18.526	21.677	21.267	22.597	108.357
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.588	3.232	10.876	10.480	13.004	55.180
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	1.383	630	1.542	-	3.555
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	264	500	500	500	1.764
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	3.945	22.944	31.993	36.748	42.198	137.828
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	10.489	<i>PERALIHAN KEGIATAN KE PROGRAM BARU</i>				10.489
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN	15.497					15.497
8	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	10.607					10.607
9	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	109.931					109.931
10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN	199.450	381.300	261.930	248.192	266.809	1.357.681
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.306	0	0	0	0	1.306
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	8.494	7.750	5.500	5.300	5.400	32.444
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN	-	32.900	18.637	20.650	27.377	99.564
14	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	8.655	<i>PERALIHAN KEGIATAN KE PROGRAM BARU</i>				8.655
15	PROGRAM PELAYANAN PERTANIAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	2.000					2.000



BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Periode Tahun 2017-2022 menyesuaikan dengan Visi, Misi, dan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022. Oleh karena itu Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Periode Tahun 2017-2022 ini sebagian memuat program kerja periode pemerintahan sebelumnya. Seperti yang kita pahami bahwa Rencana Strategis ini merupakan penjabaran misi Pemerintahan periode lima tahun yang akan datang sesuai sasaran, strategi serta program/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Renstra ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran Bidang di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renstra Tahun 2017-2022 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun-tahun mendatang.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergiskan pembangunan pertanian dan perkebunan, khususnya di Provinsi Aceh untuk lima tahun kedepan (2017-2022). Tugas pelaksanaan pembanguan pertanian dan perkebunan tersebut bukanlah tugas yang ringan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembanguan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tentunya tidak lepas dari peran seluruh stakeholder agribisnis khususnya di Aceh, dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Selain itu, dengan pertimbangan kondisi serta permasalahan, maka rencana strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.



Dengan adanya renstra ini, diharapkan Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Aceh, apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam renstra ini.

Banda Aceh, September 2018
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,

A. HANAN, SP. MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19680705 199103 1 006

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)		
								1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.143	17.588	3.232	10.876	10.480	13.004	55.180	
2.1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Indikator : Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebagai fasilitas kinerja aparatur didalam percepatan pelayanan publik	4.327 12 Pkt 100%	4.378 10 Pkt 32%	987 6 Pkt 20%	526 5 Pkt 16%	1.000 5 Pkt 16%	2.504 5 Pkt 16%	9.395 31 Pkt 100%	
2.2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Indikator : tersedianya perlengkapan gedung kantor	3.595 16 Keg 100%	2.799 12 Keg 35%	885 4 Keg 12%	3.600 5 Keg 15%	2.680 6 Keg 18%	2.500 7 Keg 20%	12.464 34 Keg 100%	
2.3	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung perkantoran Indikator : Terpeliharanya gedung perkantoran yang merupakan aset daerah	1.209 16 Unit 100%		560 16 Unit 100%	2.600 16 Unit 100%	2.200 16 Unit 100%	3.000 16 Unit 100%	8.360 16 Unit 100%	
2.4	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Indikator terpeliharanya gedung kantor sebagai aset daerah untuk menunjang kinerja aparatur dalam percepatan pelayanan masyarakat	4.012 8 Pkt 100%	10.411 22 Pkt 48%	800 6 Pkt 13%	4.150 6 Pkt 13%	4.600 6 Pkt 13%	5.000 6 Pkt 13%	24.961 46 Pkt 100%	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	1.383	630	1.542	0	3.555	
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Indikator : Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas. 4 UPTD dan 3 sekolah kedinasan			1.383 2.766 Stl 100%	630 2.766 Stl 100%	1.542 2.766 Stl 100%		3.555 2.766 Stl 100%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	445	-	264	500	500	500	1.764	
4.1	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator : Terciptanya motivasi, sumber daya Aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	369 6 Keg 100%		144 6 Keg 100%	239 6 Keg 100%	239 6 Keg 100%	239 6 Keg 100%	861 24 Keg 100%	
4.2	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Indikator : Tesosialisasinya ketentuan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	76 6 Keg 100%		120 6 Keg 100%	261 6 Keg 100%	261 6 Keg 100%	261 6 Keg 100%	903 24 Keg 100%	
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.431	3.945	22.944	31.993	36.748	42.198	137.828	
5.1	Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Indikator : Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	1.431 12 Kls 100%	3.945 32 Kls 23%	4.000 24 Kls 17%	1.440 26 Kls 18%	1.800 28 Kls 20%	2.250 32 Kls 23%	13.435 142 Kls 100%	
5.2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna Indikator : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna			594 10 Klp 100%	1.013 10 Klp 100%	1.266 10 Klp 100%	1.582 10 Klp 100%	4.454 40 Klp 100%	
5.3	Kegiatan Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A) Indikator : Terlaksananya Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A)			2.130 20 Kab 100%	2.769 20 Kab 100%	3.101 20 Kab 100%	3.473 20 Kab 100%	11.474 20 Kab 100%	
5.4	Kegiatan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida Indikator : Terlaksananya Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida			700 12 Bln 100%	840 12 Bln 100%	941 12 Bln 100%	1.035 12 Bln 100%	3.516 12 Bln 100%	
5.5	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah			3.320 4 Unit 100%	4.980 5 Unit 100%	5.578 5 Unit 100%	6.414 5 Unit 100%	20.292 19 Unit 100%	
5.6	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan penyegar			6.250 24 Unit 100%	8.125 24 Unit 100%	9.100 24 Unit 100%	10.237 24 Unit 100%	33.712 96 Unit 100%	
5.7	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.			2.450 4 Keg 100%	3.772 4 Keg 100%	4.484 4 Keg 100%	5.157 4 Keg 100%	15.863 16 Keg 100%	
5.8	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura			1.000	1.850	2.072	2.383	7.305	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)	Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)
			1	2	3	4	5	
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
1	Indikator : Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura			8 Kawasan 100%				
5.9	Kegiatan Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah Indikator : Terlaksananya Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah			1.300 8 Keg 100%	4.800 8 Keg 100%	5.520 8 Keg 100%	6.348 8 Keg 100%	17.968 32 Keg 100%
5.10	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan Indikator : Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan			600 4 Keg 100%	1.295 5 Keg 100%	1.554 5 Keg 100%	1.787 5 Keg 100%	5.236 19 Keg 100%
5.11	Kegiatan Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura Indikator : Terlaksananya Promosi dan pemasaran hasil tanaman hortikultura			600 5 Keg 100%	1.110 5 Keg 100%	1.332 5 Keg 100%	1.532 5 Keg 100%	4.574 20 Keg 100%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	-	10.489					10.489
6.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh Indikator : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh		10.489 1 Thn 100%					10.489 1 Thn 100%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN	5.788	15.497					15.497
7.1	Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi penyuluhan Indikator : Terlaksananya Rapat-rapat/Koordinasi penyuluhan	804 6 Keg 1 Thn 100%	693 5 Keg 1 Thn 100%					693 5 Keg 1 Thn 100%
7.2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	4.984 25 Pkt 1 Thn 100%	14.804 274 Pkt 1 Thn 100%					14.804 274 Pkt 1 Thn 100%
8	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	52.777	10.607					10.607
8.1	Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Indikator : Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	6.537 1 Thn 100%	1.568 1 Thn 100%					1.568 1 Thn 100%
8.2	Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija Indikator : Terlaksananya Intensifikasi tanaman padi dan palawija	38.349 40000 Ha 100%	3.174 165 Ha 100%					3.174 165 Ha 100%
8.3	Kegiatan Pengembangan perbenihan/perbibitan Indikator : Terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan	2.308 1 Thn 100%	3.202 12 Kmdt 100%					3.202 12 Kmdt 100%
8.4	Kegiatan Perluasan areal pertanian Indikator : Terlaksananya perluasan areal pertanian	5.583 507 Ha 1 Thn 100%	2.663 3 Keg 1 Thn 100%					2.663 3 Keg 1 Thn 100%
9	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	17.059	109.931					109.931
9.1	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Indikator : Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan	9.319 35 Unt 1 Thn 100%	87.116 65 Unt 1 Thn 100%					87.116 65 Unt 1 Thn 100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)						
		Tahun 0 (2017)		Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	Tahun 5 (2022)						
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	3		4	5	6	7	8	9						
9.2	Kegiatan penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Indikator : Terlaksananya penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	2.535	215 Keg 1 Thn 100%	15.287	278 Keg 1 Thn 100%					15.287	278 Keg 1 Thn 100%				
9.3	Kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan operasional teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	5.205	12 Keg 1 Thn 100%	7.528	12 Keg 1 Thn 100%					7.528	12 Keg 1 Thn 100%				
10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN	108.202		199.450		381.300		261.930		248.192		266.809		1.357.681	
10.01	Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Indikator : Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	16.443	5 Keg 1 Thn 100%	86.100	12 Keg 1 Thn 100%									86.100	12 Keg 1 Thn 100%
10.02	Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	3.981	6 Keg 1 Thn 100%	22.850	14 Keg 1 Thn 100%									22.850	14 Keg 1 Thn 100%
10.03	Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	2.222	4 Keg 1 Thn 100%	3.400	4 Keg 1 Thn 100%									3.400	4 Keg 1 Thn 100%
10.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan Indikator : Terawasinya peredaran bibit unggul tanaman perkebunan			2.250	22 Kab 1 Thn 100%									2.250	22 Kab 1 Thn 100%
10.05	Kegiatan Brigade petugas hama/penyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan hama/penyakit tanaman perkebunan Indikator : Terlaksananya operasi pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan.			3.650	10 SL 1 Thn 100%									3.650	10 SL 1 Thn 100%
10.06	Kegiatan Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan	547	1 Keg 1 Thn 100%												
10.07	Kegiatan Pembangunan kebun kelapa sawit Indikator : Terlaksananya Pembangunan kebun kelapa sawit	5.445	261 Ha 1 Thn 100%	6.200	170 Ha 1 Thn 100%									6.200	170 Ha 1 Thn 100%
10.08	Kegiatan Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan	3.028	18 Kab 1 Thn 100%	6.000	18 Kab 1 Thn 100%									6.000	18 Kab 1 Thn 100%
10.09	Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Indikator: Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	14.625	1110 Ha 1 Thn 100%	32.400	3.402 Ha 1 Thn 100%									32.400	3.402 Ha 1 Thn 100%
10.10	Kegiatan Pembangunan Kebun Karet Rakyat Indikator: Terbangunan Kebun Karet Rakyat	1.316	90 Ha 1 Thn 100%	2.300	40 Ha 1 Thn 100%									2.300	40 Ha 1 Thn 100%
10.11	Kegiatan Pembangunan Kebun Kakao Rakyat Indikator: Terbangunan Kebun Kakao Rakyat	2.240	100 Ha 1 Thn 100%	5.300	320 Ha 1 Thn 100%									5.300	320 Ha 1 Thn 100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)								Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)			
		Tahun 0 (2017)		Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)				
		3	4	5	6	7	8	9							
10.12	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi Indikator: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi	38.268	22 Kab 1 Thn 100%	10.500	22 Kab 1 Thn 100%									10.500	22 Kab 1 Thn 100%
10.13	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat Indikator: Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	16.574	2270 Ha 1 Thn 100%	17.000	4.070 Ha 1 Thn 100%	12.000	4.020 Ha 1 Thn 100%	13.200	4.000 Ha 1 Thn 100%	12.540	4.000 Ha 1 Thn 100%	13.919	4.000 Ha 1 Thn 100%	68.659	20.090 Ha 5 Thn 100%
10.14	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar Indikator : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar	620	22 Kab 1 Thn 100%	1.500	23 Kab 1 Thn 100%	1.350	23 Kab 1 Thn 100%	2.310	23 Kab 1 Thn 100%	2.264	23 Kab 1 Thn 100%	2.513	23 Kab 1 Thn 100%	9.937	23 Kab 5 Thn 100%
10.15	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani Indikator: Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	900	1 Keg 1 Thn 100%					600	23 Kab 1 Thn 100%	540	23 Kab 1 Thn 100%	567	23 Kab 1 Thn 100%	1.707	23 Kab 3 Thn 100%
10.16	Kegiatan Kajian Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan Indikator: Terlaksananya Kajian Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	594	5 Keg 1 Thn 100%					630	23 Kab 1 Thn 100%			650	23 Kab 1 Thn 100%	1.280	23 Kab 2 Thn 100%
10.17	Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Peralatan Mesin perkebunan Indikator: Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Peralatan Mesin perkebunan	1.399	22 Kab 1 Thn 100%												
10.18	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan					1.250	3 Kmdt 1 Thn 100%	1.925	3 Kmdt 1 Thn 100%	1.829	3 Kmdt 1 Thn 100%	2.012	3 Kmdt 1 Thn 100%	7.015	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.19	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan Indikator : Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan					3.300	165 Ha 1 Thn 100%	3.630	175 Ha 1 Thn 100%	3.449	185 Ha 1 Thn 100%	3.793	200 Ha 1 Thn 100%	14.172	725 Ha 5 Thn 100%
10.20	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator : Terlaksananya Penyelenggaraan BLUD produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.000	1 UPTD 1 Thn 100%	1.200	1 UPTD 1 Thn 100%	1.440	1 UPTD 1 Thn 100%	1.728	1 UPTD 1 Thn 100%	5.368	1 UPTD 4 Thn 100%
10.21	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura Indikator : Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura					11.200	9 Pkt 1 Thn 100%	11.760	9 Pkt 1 Thn 100%	11.172	9 Pkt 1 Thn 100%	11.731	9 Pkt 1 Thn 100%	45.863	36 Pkt 4 Thn 100%
10.22	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura					2.700	5 Kmdt 1 Thn 100%	2.970	5 Kmdt 1 Thn 100%	2.822	5 Kmdt 1 Thn 100%	3.104	5 Kmdt 1 Thn 100%	11.595	5 Kmdt 4 Thn 100%
10.23	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar Indikator : Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Penyegar					25.200	5 Kmdt 1 Thn 100%	13.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	12.350	5 Kmdt 1 Thn 100%	12.968	5 Kmdt 1 Thn 100%	63.518	5 Kmdt 4 Thn 100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)				
				1	2	3	4	5					
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
10.24	Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah Indikator : Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah			2.200	3 Kmdt 1 Thn 100%	2.420	3 Kmdt 1 Thn 100%	2.299	3 Kmdt 1 Thn 100%	2.414	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.333	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.25	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan Indikator : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan			3.000	4 Keg 1 Thn 100%	3.300	5 Keg 1 Thn 100%	3.608	5 Keg 1 Thn 100%	3.788	5 Keg 1 Thn 100%	13.696	5 Keg 4 Thn 100%
10.26	Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura			1.200	690 Ha 1 Thn 100%	2.750	690 Ha 1 Thn 100%	2.888	700 Ha 1 Thn 100%	3.176	700 Ha 1 Thn 100%	10.014	2.780 Ha 4 Thn 100%
10.27	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan Indikator : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan			7.500	650 Ha 1 Thn 100%	8.250	650 Ha 1 Thn 100%	7.838	650 Ha 1 Thn 100%	8.621	650 Ha 1 Thn 100%	32.209	2.600 Ha 4 Thn 100%
10.28	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura			3.800	11 kmdt 1 Thn 100%	4.180	11 kmdt 1 Thn 100%	3.971	11 kmdt 1 Thn 100%	4.170	11 kmdt 1 Thn 100%	16.121	11 kmdt 4 Thn 100%
10.29	Kegiatan Optimasi lahan pertanian Indikator : Terlaksananya Optimasi lahan pertanian			6.000	1.000 Ha 1 Thn 100%	7.200	1.000 Ha 1 Thn 100%	7.560	1.000 Ha 1 Thn 100%	7.938	1.000 Ha 1 Thn 100%	28.698	4.000 Ha 4 Thn 100%
10.30	Kegiatan Perluasan Areal Pertanian Indikator : Terlaksananya Perluasan Areal Pertanian			15.000	250 Ha 1 Thn 100%	15.750	250 Ha 1 Thn 100%	14.175	250 Ha 1 Thn 100%	14.884	250 Ha 1 Thn 100%	59.809	1.000 Ha 4 Thn 100%
10.31	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen Indikator : Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen			25.000	60 Unit 1 Thn 100%	11.250	60 Unit 1 Thn 100%	10.688	60 Unit 1 Thn 100%	11.222	60 Unit 1 Thn 100%	58.159	240 Unit 4 Thn 100%
10.32	Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen Indikator : Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen			23.000	32 Unit 1 Thn 100%	9.000	33 Unit 1 Thn 100%	8.100	35 Unit 1 Thn 100%	8.505	35 Unit 1 Thn 100%	48.605	135 Unit 4 Thn 100%
10.33	Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian Indikator : Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian			50.000	3 Keg 1 Thn 100%	7.500	3 Keg 1 Thn 100%	7.125	3 Keg 1 Thn 100%	7.838	3 Keg 1 Thn 100%	72.463	12 Keg 4 Thn 100%
10.34	Kegiatan Peningkatan Prasarana Perkebunan Indikator : Terlaksananya Peningkatan Prasarana Perkebunan			25.000	2 Keg 1 Thn 100%	9.000	2 Keg 1 Thn 100%	8.550	2 Keg 1 Thn 100%	9.405	2 Keg 1 Thn 100%	51.955	8 Keg 4 Thn 100%
10.35	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan					650	23 Kab 1 Thn 100%			650	23 Kab 1 Thn 100%	1.300	23 Kab 2 Thn 100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)				
				1	2	3	4	5					
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
10.36	Kegiatan Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian Indikator : Terlaksananya Pelatihan Operasionalisasi Alat Mesin Pertanian			2.100	8 Keg 1 Thn 100%	2.310	8 Keg 1 Thn 100%	2.079	8 Keg 1 Thn 100%	2.183	8 Keg 1 Thn 100%	8.672	32 Keg 4 Thn 100%
10.37	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian Indikator : Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian			6.500	8 Keg 1 Thn 100%	7.150	8 Keg 1 Thn 100%	6.435	8 Keg 1 Thn 100%	6.757	8 Keg 1 Thn 100%	26.842	32 Keg 4 Thn 100%
10.38	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian Indikator : Terselenggaranya BLUD Mekanisasi Pertanian			1.000	1 Keg 1 Thn 100%	1.650	1 Keg 1 Thn 100%	1.980	1 Keg 1 Thn 100%	2.079	1 Keg 1 Thn 100%	6.709	4 Keg 4 Thn 100%
10.39	Kegiatan Pengembangan kawasan padi Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan padi			40.000	85.000 Ha 1 Thn 22%	26.000	60.000 Ha 1 Thn 24%	25.480	65.000 Ha 1 Thn 26%	28.283	70.000 Ha 1 Thn 28%	119.763	280.000 Ha 4 Thn 100%
10.40	Kegiatan Pengembangan kawasan jagung Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan jagung			12.000	5.500 Ha 1 Thn 17%	4.950	7.500 Ha 1 Thn 24%	4.703	9.000 Ha 1 Thn 29%	5.568	10.000 Ha 1 Thn 32%	27.220	31.500 Ha 4 Thn 100%
10.41	Kegiatan Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan aneka kacang dan umbi			2.000	500 Ha 1 Thn 100%	2.200	1500 Ha 1 Thn 100%	2.090	2000 Ha 1 Thn 100%	2.299	3500 Ha 1 Thn 100%	8.589	7500 Ha 4 Thn 100%
10.42	Kegiatan Pengembangan kawasan buah-buahan Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan buah-buahan			3.500	2 Kmdt 1 Thn 100%	3.850	2 Kmdt 1 Thn 100%	3.658	2 Kmdt 1 Thn 100%	3.840	2 Kmdt 1 Thn 100%	14.848	2 Kmdt 4 Thn 100%
10.43	Kegiatan Pengembangan sentra buah-buahan Indikator : Terlaksananya Pengembangan sentra buah-buahan			6.500	6 Kmdt 1 Thn 100%	7.150	6 Kmdt 1 Thn 100%	6.793	6 Kmdt 1 Thn 100%	7.132	6 Kmdt 1 Thn 100%	27.575	6 Kmdt 4 Thn 100%
10.44	Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman sayuran Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan tanaman sayuran			9.000	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.900	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.405	3 Kmdt 1 Thn 100%	9.875	3 Kmdt 1 Thn 100%	38.180	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.45	Kegiatan Pengembangan sentra sayur-sayuran Indikator : Terlaksananya Pengembangan sentra sayur-sayuran			3.000	3 Kmdt 1 Thn 100%	3.850	3 Kmdt 1 Thn 100%	3.273	3 Kmdt 1 Thn 100%	3.436	3 Kmdt 1 Thn 100%	13.559	3 Kmdt 4 Thn 100%
10.46	Kegiatan Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura Indikator : Terlaksananya Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura			1.000	2 Kmdt 1 Thn 100%	1.320	2 Kmdt 1 Thn 100%	924	2 Kmdt 1 Thn 100%	785	2 Kmdt 1 Thn 100%	4.029	2 Kmdt 4 Thn 100%
10.47	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis			38.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	15.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	14.250	5 Kmdt 1 Thn 100%	14.963	5 Kmdt 1 Thn 100%	82.213	5 Kmdt 4 Thn 100%
10.48	Kegiatan Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul Indikator : Terlaksananya Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul			7.000	5 Kmdt 1 Thn 100%	13.650	5 Kmdt 1 Thn 100%	12.968	5 Kmdt 1 Thn 100%	13.616	5 Kmdt 1 Thn 100%	47.233	5 Kmdt 4 Thn 100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)				
				1	2	3	4	5					
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
10.49	Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura			3.000	22 Kab 1 Thn 100%	3.300	22 Kab 1 Thn 100%	3.135	22 Kab 1 Thn 100%	3.292	22 Kab 1 Thn 100%	12.727	22 Kab 4 Thn 100%
10.50	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan Indikator : Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan			3.500	22 Kab 1 Thn 24%	3.850	22 Kab 1 Thn 24%	3.658	22 Kab 1 Thn 18%	3.840	22 Kab 1 Thn 29%	14.848	22 Kab 4 Thn 100%
10.51	Kegiatan Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih unggul tanaman perkebunan			1.400	4 Kmdt 1 Thn 100%	1.870	4 Kmdt 1 Thn 100%	1.777	4 Kmdt 1 Thn 100%	1.865	4 Kmdt 1 Thn 100%	6.912	4 Kmdt 4 Thn 100%
10.52	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator : Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura			5.500	9 Keg 1 Thn 100%	2.750	10 Keg 1 Thn 100%	2.613	10 Keg 1 Thn 100%	2.743	10 Keg 1 Thn 100%	13.606	39 Keg 4 Thn 100%
10.53	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi TPH dan perkebunan Indikator : Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Balai Proteksi TPH dan perkebunan			10.000	18 Kab 1 Thn 24%	2.200	18 Kab 1 Thn 24%	2.090	18 Kab 1 Thn 18%	2.195	18 Kab 1 Thn 29%	16.485	18 Kab 4 Thn 100%
10.54	Kegiatan Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat Indikator : Terlaksananya Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat			4.200	1.750 Ha 1 Thn 100%	5.500	2.000 Ha 1 Thn 100%	5.225	2.000 Ha 1 Thn 100%	5.486	2.000 Ha 1 Thn 100%	20.411	7.750 Ha 4 Thn 100%
10.55	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan			1.200	4 Keg 1 Thn 100%	1.650	4 Keg 1 Thn 100%	1.568	4 Keg 1 Thn 100%	1.646	4 Keg 1 Thn 100%	6.063	16 Keg 4 Thn 100%
10.56	Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan Indikator : Terlaksananya Perlindungan Tanaman Perkebunan			600	4 Kab 1 Thn 100%	770	4 Kab 1 Thn 100%	732	4 Kab 1 Thn 100%	768	4 Kab 1 Thn 100%	2.870	16 Kab 4 Thn 100%
10.57	Kegiatan Gerakan pengendalian OPT Perkebunan Indikator : Terlaksananya Gerakan pengendalian OPT Perkebunan			600	2 Kmdt 1 Thn 100%	770	4 Kmdt 1 Thn 100%	732	2 Kmdt 1 Thn 100%	768	4 Kmdt 1 Thn 100%	2.870	12 Kmdt 4 Thn 100%
10.58	Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Indikator : Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan					3.190	18 Kab 1 Thn 100%	3.031	18 Kab 1 Thn 100%	3.182	18 Kab 1 Thn 100%	9.403	18 Kab 3 Thn 100%
10.59	Kegiatan Perlindungan Tanaman Hortikultura Indikator : Terlaksananya Perlindungan Tanaman Hortikultura					500	7 Kab 1 Thn 100%	475	7 Kab 1 Thn 100%	499	7 Kab 1 Thn 100%	1.474	7 Kab 3 Thn 100%
10.60	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan					1.375	4 Kab 1 Thn 100%	1.306	4 Kab 1 Thn 100%	1.372	4 Kab 1 Thn 100%	4.053	12 Kab 3 Thn 100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)						
				1	2	3	4	5							
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
10.61	Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren Indikator : Terlaksananya Pengembangan Perkebunan di Lahan Dayah/Pesantren					2.750	4 Kab 1 Thn 100%	2.613	4 Kab 1 Thn 100%	2.743	4 Kab 1 Thn 100%	8.106	12 Kab 3 Thn 100%		
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	605	1.306								1.306				
11.1	Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Indikator : Terlaksananya Promosi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah	605	1.306	1 Thn 100%	4 Keg 100%							1.306	4 Keg 100%		
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	8.073	8.494		7.750	5.500		5.300		5.400		32.444			
12.1	Kegiatan Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Indikator : Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	7.201	6.900	23 Kab 100%	23 Kab 100%	2.200	23 Kab 100%	1.900	23 Kab 100%	1.840	23 Kab 100%	1.850	23 Kab 100%	14.690	23 Kab 100%
12.2	Kegiatan Perencanaan pembangunan perkebunan Indikator : Terwujudnya sinkronisasi rancangan program dan pengendalian serta informasi pelaksanaan kegiatan	872	1.594	23 Kab 100%	23 Kab 100%	1.500	23 Kab 100%	1.100	23 Kab 100%	1.085	23 Kab 100%	1.050	23 Kab 100%	6.329	23 Kab 100%
12.3	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH Indikator : Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian TPH				1.000	23 Kab 100%	700	23 Kab 100%	665	23 Kab 100%	700	23 Kab 100%	3.065	23 Kab 100%	
12.4	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH Indikator : Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi pertanian TPH				1.250	23 Kab 100%	800	23 Kab 100%	760	23 Kab 100%	800	23 Kab 100%	3.610	23 Kab 100%	
12.5	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan Indikator : Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan				500	23 Kab 100%	400	23 Kab 100%	380	23 Kab 100%	400	23 Kab 100%	1.680	23 Kab 100%	
12.6	Kegiatan Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan Indikator : Terlaksananya Penyusunan data statistik dan informasi perkebunan				1.300	23 Kab 100%	600	23 Kab 100%	570	23 Kab 100%	600	23 Kab 100%	3.070	23 Kab 100%	
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN				32.900	18.637		20.650		27.377		99.564			
13.1	Kegiatan Pendidikan bagi penyuluh pertanian Indikator : Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan				2.200	6 Keg 1 Thn 25%	200	6 Keg 1 Thn 25%	210	6 Keg 1 Thn 25%	300	6 Keg 1 Thn 25%	2.910	24 Keg 4 Thn 100%	
13.2	Kegiatan Supervisi penyuluhan pertanian Indikator : Terlaksananya Supervisi penyuluhan pertanian				500	23 Kab 1 Thn 100%	200	23 Kab 1 Thn 100%	210	23 Kab 1 Thn 100%	300	23 Kab 1 Thn 100%	1.210	23 Kab 4 Thn 100%	
13.3	Kegiatan Upgrading Penyuluh Pertanian Indikator : Meningkatnya Kuantitas dan Rasio Penyuluh Bersertifikat				500	% 750 Org 25%	1.500	% 750 Org 25%	1.650	% 750 Org 25%	2.145	% 750 Org 25%	5.795	% 750 Org 100%	
13.4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian Indikator : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pertanian				600	3 Keg 1 Thn 100%	500	3 Keg 1 Thn 100%	600	3 Keg 1 Thn 100%	780	3 Keg 1 Thn 100%	2.480	12 Keg 4 Thn 100%	
13.5	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan Indikator : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan				1.000	23 Kab 1 Thn 100%	200	23 Kab 1 Thn 100%	220	23 Kab 1 Thn 100%	300	23 Kab 1 Thn 100%	1.720	23 Kab 4 Thn 100%	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2017 - 2022

No.	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2017 (dalam juta)		Target Capaian Setiap Tahun (dalam juta)					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (dalam juta)				
				1	2	3	4	5					
				Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)			Tahun 5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
13.6	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Indikator : Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan			8.000	25 BPP 1 Thn 25%	3.500	25 BPP 1 Thn 25%	4.044	25 BPP 1 Thn 25%	5.493	25 BPP 1 Thn 25%	21.037	100 BPP 4 Thn 100%
13.7	Kegiatan Penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) Indikator : Tersusunnya rencana definitif kelompok kebutuhan pupuk kelompok tani			800	1 Keg 1 Thn 100%	442	1 Keg 1 Thn 100%	486	1 Keg 1 Thn 100%	632	1 Keg 1 Thn 100%	2.360	4 Keg 4 Thn 100%
13.8	Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian Indikator : Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and			1.300	4 Kab 1 Thn 100%	1.495	4 Kab 1 Thn 100%	1.570	4 Kab 1 Thn 100%	1.884	4 Kab 1 Thn 100%	6.248	4 Kab 4 Thn 100%
13.9	Kegiatan Pendidikan kejuruan Pertanian Indikator : Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian			8.000	3 Unit 1 Thn 100%	7.000	3 Unit 1 Thn 100%	7.700	3 Unit 1 Thn 100%	10.395	3 Unit 1 Thn 100%	33.095	3 Unit 4 Thn 100%
13.10	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Indikator : Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			10.000	23 Kab 1 Thn 100%	3.600	23 Kab 1 Thn 100%	3.960	23 Kab 1 Thn 100%	5.148	23 Kab 1 Thn 100%	22.708	23 Kab 4 Thn 100%
14	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	9.474		8.655								8.655	
14.01	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Indikator : Tersedianya peralatan pengolahan hasil perkebunan	9.474	11 Unt 1 Thn 100%	8.655	916 Unt 1 Thn 100%							8.655	916 Unt 1 Thn 100%
15	PROGRAM PELAYANAN PERTANIAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)			2.000								2.000	
15.01	Kegiatan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian pada UPTD Mekanisasi Pertanian Indikator : Terselenggaranya Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD			1.000	7 Unit 1 Thn 100%							1.000	7 Unit 1 Thn 100%
15.02	Kegiatan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Indikator : Terselenggaranya Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai			800	465 Ton 1 Thn 100%							800	465 Ton 1 Thn 100%
15.03	Kegiatan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian pada UPTD Balai Benih Hortikultura Indikator : Terselenggaranya Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Balai			200	21 Kmdt 1 Thn 100%							200	21 Kmdt 1 Thn 100%

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

A. HANAN SP. MM.
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19680705 199103 1 006

BANDA ACEH, SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Ir. CUT HUZAIMAH. MP
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19660217 199203 2 003